

Analisis Bentuk Pemerintahan di Lingkup Negara ASEAN

by Siti Marwiyah

Submission date: 18-Oct-2023 06:57PM (UTC-0400)

Submission ID: 2200119262

File name: Analisis_Bentuk_Pemerintahan_di_Lingkup_Negara_ASEAN.pdf (1.53M)

Word count: 42263

Character count: 273637



ANALISIS BENTUK PEMERINTAHAN DI LINGKUP NEGARA ASEAN

Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si

ANALISIS BENTUK PEMERINTAH DI LINGKUP NEGARA ASEAN

Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si

**Mitra Ilmu
2023**

**ANALISIS BENTUK PEMERINTAH DI LINGKUP NEGARA
ASEAN**

Penulis :

Dr. Hj. Siti Marwiyah, M.Si

Editor :

Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si

ISBN: 978-623-145-016-6

Desain Sampul dan Tata Letak:

Sulaiman

Penerbit :

Mitra Ilmu

Kantor:

Jl. Kesatuan 3 No. 11 Kelurahan Maccini Parang

Kecamatan Makassar Kota Makassar

Hp. 0813-4234-5219/081340021801

Email : mitrailmua@gmail.com

Website : www.mitrailmumakassar.com

Anggota IKAPI Nomor: 041/SSL/2022

Cetakan pertama: April 2023

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah.SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik dan tepat waktu.

ASEAN merupakan singkatan dari *Association Of Southeast Asian Nations* (Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Negara di ASEAN memiliki macam-macam bentuk dalam menjalankan sebuah pemerintahannya. Masing-masing negara di ASEAN pastinya memiliki bentuk pemerintahan berbeda dan masing-masing negara tersebut saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau pembaca, khususnya dalam memahami Bentuk Pemerintahan Di Lingkup Negara Asean. Segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dari buku ini.

Tidak lupa pula, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua rekan-rekan yang ikut serta dalam penyelesaian buku ini.

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I BENTUK-BENTUK PEMERINTAHAN	1
A. Definisi Bentuk pemerintahan.....	1
B. Macam-macam bentuk pemerintahan	11
C. Ruang Lingkup Bentuk Pemeritahan di ASEAN	16
BAB II BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA	22
A. Sejarah Negara Indonesia.....	22
B. Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia	30
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Indonesia.....	32
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Indonesia	37
BAB III BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MALAYSIA	39
A. Sejarah Negara Malaysia.....	39
B. Bentuk Pemerintahan Negara Malaysia	48
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Malaysia.....	60
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Malaysia	67
BAB IV BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA THAILAND	67
A. Sejarah Negara Thailand	70
B. Bentuk Pemerintahan Negara Thailand	80
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Thailand	82
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Thailand	84
BAB V BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM	87
A. Sejarah Negara Brunei Darussalam.....	87
B. Bentuk Pemerintahan Negara Brunei Darussalam	105
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Brunei Darussalam	107
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Brunei Darussalam	110
BAB VI BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA VIETNAM	113
A. Sejarah Negara Vietnam.....	113
B. Bentuk Pemerintahan Negara Vietnam	118

C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Vietnam	120
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Vietnam	125
BAB VII BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA KAMBOJA	130
A. Sejarah Negara Kamboja.....	130
B. Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja	134
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Kamboja	138
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Kamboja	145
BAB VIII BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA SINGAPURA	147
A. Sejarah Negara Singapura	147
B. Bentuk Pemerintahan Negara Singapura	152
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Singapura.....	160
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Singapura	164
BAB IX BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA LAOS	166
A. Sejarah Negara Laos.....	166
B. Bentuk Pemerintahan Negara Laos	170
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Laos	175
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Laos	177
BAB X BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR	181
A. Sejarah Negara Myanmar	181
B. Bentuk Pemerintahan Negara Myanmar	186
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Myanmar.....	191
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Myanmar	197
BAB XI BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA FILIPINA	199
A. Sejarah Negara Filipina	199
B. Bentuk Pemerintahan Negara Filipina	211
C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Negara Filipina	221
D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Filipina	223
DAFTAR PUSTAKA	227

BAB I

PENDAHULUAN

A. Bentuk-bentuk Pemerintahan

1. Pengertian Bentuk Pemerintahan

Sering kali, kita menyebutkan jika bentuk pemerintahan dan bentuk negara itu sama. Tanpa kita sadari, bentuk pemerintahan dengan bentuk negara itu sangatlah berbeda. Karena keduanya memiliki pengertian dan perspektif yang berbeda. Hampir di seluruh dunia, masing-masing negara memiliki bentuk pemerintahannya yang masing. Bentuk pemerintahan ada yang berbentuk monarki, ada yang republik. Jangankan perbedaan bentuk pemerintahan dan bentuk negara, itu juga memiliki perbedaan dengan sistem pemerintahan.

Oleh karena itu di buku ini, akan dibahas lebih mendalam secara spesifik dengan penggunaan bahasa yang menarik dan memiliki kandungan isi yang bermanfaat bagi para pembaca. Pada sub bab yang pertama ini, kita akan membahas seluk beluk secara spesifik mengenai bentuk pemerintahan. Apa sih yang di maksud dengan bentuk pemerintahan itu ?, sering kali kita mendengar dan salah mengartikan bukan?, oleh sebab itu disini akan kita bahas bersama.

Bentuk pemerintahan, dapat dipahami dengan dua konotasi yang memiliki pengertiannya masing-masing. Pengertian bentuk menurut kbbi yaitu berupa atau wujud. Dan pemerintahan itu sendiri adalah ¹³ suatu sistem

yang di dalamnya terdapat penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kewenangan dan tugas yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku. Tersebut merupakan pengertian pemerintahan secara sempit, jika secara luas yaitu sistem pemerintah yang berdaulat secara penuh untuk mengatur rakyat yang menduduki suatu wilayah sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dengan berbagai lembaga negara yang berkuasa, seperti badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹

Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara dalam menegakkan kekuasaannya atas suatu komunitas politik. Definisi ini tetap berlaku bahkan untuk pemerintahan yang tidak sah atau tidak berhasil menegakkan kekuasaannya.² Tidak tergantung dari kualitasnya, pemerintahan yang gagal pun tetap merupakan suatu bentuk pemerintahan. Jadi dapat dikatakan bentuk pemerintahan tersebut ialah mutlak bagi sebuah negara.

Bentuk pemerintahan itu juga yang menjadi dasar atau pondasi suatu negara untuk menjalankan pemerintahannya. Semacam ingin dibawa kemana negara ini, ingin dibawa ke dalam bentuk pemerintahan yang monarki ataupun republik. Agar sebuah negara tersebut jelas dalam

¹ Prianto septian wira, "BAB II. Tinjauan Pustaka," in *Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, vol. 1, 2018, 5–24.

² Serafica Ghisca Ani Rachman, "Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku Dunia," MPAS.Com, last modified 2022, accessed November 3, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/190000969/bentuk-dan-sistem-pemerintahan-yang-berlaku-dunia-?page=all>.

menentukan bentuk pemerintahan di dalamnya. Contoh seperti negara kita, Indonesia. Bentuk pemerintahannya yaitu republik. Lalu kita dapat menengok tetangga sebelah kita yaitu Malaysia. Negara tersebut memiliki bentuk pemerintahan yaitu monarki.

Tak hanya bentuk pemerintahan saja, di dalam sebuah negara juga memiliki sistem pemerintahan. ¹³ Sistem pemerintahan bisa diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan.³ Namun, masing-masing ahli memiliki pengertian masing-masing mengenai pemerintahan, berikut pengertian pemerintahan dari para ahli yaitu :

- a. ¹³ Menurut Polybius, menurut jumlah orang yang memerintah serta sifat pemerintahannya dibedakan menjadi enam jenis pemerintahan, yakni monarki, tirani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan anarki (oklokiasi).
- b. Menurut Kranenburg, adanya ketidakpastian penggunaan istilah monarki dan republik untuk menyebutkan bentuk negara atau pemerintahan.
- c. Sementara itu, menurut Leon Duguit, membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjukan kepala negaranya, yakni sistem republik yang kepala negaranya diangkat lewat

³ septian wira, "BAB II. Tinjauan Pustaka."

pemilihan dan sistem monarki yang kepala negaranya diangkat secara turun menurun.

- d. Menurut Jellinec, membagi bentuk pemerintahan menjadi dua, yakni republik dan monarki. Sistem pemerintahan negara-negara di dunia ini berbeda-beda sesuai dengan keinginan dari negara yang bersangkutan dan disesuaikan dengan keadaan bangsa dan negaranya. Sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer merupakan dua model sistem pemerintahan yang dijadikan acuan oleh banyak negara. Amerika Serikat dan Inggris masing-masing dianggap pelopor dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan Parlementer
- e. Menurut Utrecht, ada 3 pengertian pemerintahan, yaitu: pertama. Pemerintahan adalah gabungan dari semua badan kenegaraan yang memiliki kekuasaan untuk memerintah (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif); kedua Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang memiliki kekuasaan memerintah (Presiden, Raja, Yang dipertuan Agung); dan ketiga Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama kabinetnya.
- f. Menurut Offe, Pemerintahan adalah hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang, bukan hanya hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan undang -

undang melainkan hasil dari kegiatan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing - masing.

- g. Sedangkan menurut Kooiman, Pemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.

2. Perbedaan Bentuk Pemerintahan dan Bentuk Negara

Bentuk pemerintahan sudah secara rinci di jelaskan pada sub bab sebelum ini, namun terkadang kita juga melupakan ¹⁹ apa yang dimaksud dengan bentuk negara. Apakah bentuk negara sama dengan bentuk pemerintahan?, tentunya berbeda. Kedua bentuk tersebut memiliki substansi yang berbeda. Tak hanya itu, bentuk negara juga memiliki macam yang beraneka ragam juga.

Dalam buku Bentuk Negara dan Pemerintah RI (2010) karya Muh. Nur El Ibrahim, jika kita berbicara mengenai bentuk negara maka tengah membicarakan bagaimana sifat atau hubungan antara kekuasaan pusat saat berhadapan dengan daerah. Hubungan seperti itu disebut pula sebagai hubungan vertikal, artinya pusat yang diasumsikan berada di atas daerah.⁴ Sehingga dapat dijelaskan secara mendalam, bagaimana peran dari bentuk negara tersebut di dalam sebuah negara menghasilkan sebuah hubungan yang saling mengisi satu sama lain. Tak hanya itu, bentuk negara tersebut juga membicarakan bagaimana negara tersebut menjalankannya. Seperti jika sebuah negara yang memiliki bentuk negara yang kesatuan, seperti Indonesia. Memiliki bentuk negara kesatuan yang biasa disebut NKRI(Negara Kesatuan Republik Indonesia). Jadi seluruh wilayah yang ada di Indonesia mulai dari sabang hingga merauke harus patuh dan taat kepada satu kepala negara yaitu presiden dan semua wilayah juga harus menjalankan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, walau pada

⁴ Muh. Nur El Ibrahim, *Bentuk Negara Dan Pemerintah RI* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010).

pelaksanaannya masing-masing wilayah juga diberikan hak untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing atau biasa disebut dengan otonomi daerah.

Tidak hanya bentuk negara kesatuan, namun juga ada bentuk negara yaitu federal. Bentuk negara ini banyak dianut dan diadaptasikan oleh masing-masing negara di dunia. Kebanyakan negara yang menganut bentuk negara ini adalah negara kepulauan, atau negara yang memiliki wilayah yang berbentuk pulau. Seperti contohnya Amerika Serikat (AS). Masing-masing wilayah di sana, memiliki bentuk seperti negara bagian. Jadi masing-masing wilayah tersebut bertanggung jawab dengan negara bagiannya masing-masing.

Bentuk negara dapat diartikan juga seperti batas antara peninjauan secara sosiologis dan peninjauan secara yuridis mengenai negara. Peninjauan secara sosiologis jika negara dilihat secara keseluruhan (*ganzhit*) tanpa melihat isinya, sedangkan secara yuridis jika negara/peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya. Sedangkan secara yuridis jika negara peninjauan hanya dilihat dari isinya atau strukturnya.⁵

Bentuk negara juga dapat dibagi kedalam kedua zaman, seperti pada saat zaman Yunani kuno dan zaman modern. Berikut beberapa penjelasannya, yaitu :

⁵ Desri tiara Salsabila, "Pengertian Dan Macam-Macam Bentuk Negara" (2020).

a. Masa Yunani kuno

¹¹ Adapun tiga bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah: *Monarchi*, *Oligarchi*, dan Demokrasi. Dipergunakan sebagai ukuran untuk ¹¹ membedakan bentuk-bentuk tersebut di atas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan. Jika yang memegang kekuasaan itu satu orang maka bentuk negaranya Monarchi (bahasa Yunani “*monos*” berarti “satu” sedangkan “*archien*” berarti “memerintah”). Jika memegang pemerintahan itu beberapa orang maka bentuk negaranya itu Oligarchi (bahasa Yunani “*oligai*” berarti “beberapa”). Jika yang memegang pemerintahan rakyat maka bentuk negaranya disebut Demokrasi (bahasa Yunani “*Demos*” berarti “rakyat”).⁶

b. Masa modern

Menurut teori-teori modern sekarang ini, bentuk negara yang terpenting ialah: negara kesatuan (Unitarianisme) dan negara serikat (Federasi)

1. Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi kedalam 2 macam sistem pemerintahan yaitu: Sentral dan Otonomi.

⁶ Ibid.

- ¹¹ Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah pemerintahan yang langsung dipimpin oleh pemerintahan pusat, sementara pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini.
- Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayah sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan paske Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan kedalam model ini.

2. Negara serikat

Negara serikat atau Federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat.

Pada mulanya negara-negara bagian tersebut merupakan negara ¹¹ yang merdeka, berdaulat dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian dari kekuasaannya dan menyerahkannya kepada Negara Serikat. Penyerahan kekuasaan

dari negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif (satu demi satu) dimana hanya kekuasaan yang diberikan oleh negara-negara bagian saja (delegated powers) yang menjadi kekuasaan Negara Serikat. Namun pada perkembangan selanjutnya, negara serikat mengatur hal yang bersifat strategis seperti kebijakan politik luar negeri, keamanan dan pertahanan negara.⁷

⁷ Ibid.

B. Macam-macam Bentuk Pemerintahan

Bentuk pemerintahan memiliki macam-macam bentuknya dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Dalam menjabarkan bentuk pemerintahan, Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih memberikan sebuah pendapat tentang bentuk pemerintahan yaitu bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang berlaku dalam mengatur alat-alat perlengkapan negara dan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tersebut.⁸

Pada dasarnya, sistem pemerintahan juga dibagi kedalam pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itulah yang menjadikan sebuah pemerintahan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan semestinya. Seperti jika kita mengenal didalam sebuah organisasi yaitu *jobdesk*. Hal itu memiliki arti yaitu masing-masing kelompok atau bagan memiliki tugas pokok dan tugas fungsinya masing-masing. Sistem pembagian kekuasaan juga dapat diartikan kepada pemancaran kekuasaan dari instansi atau organ negara yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Secara karakteristik dapat dikatakan bila pembagian kekuasaan tersebut yaitu bersifat vertikal.

Lanjut kepada bentuk pemerintahan, yaitu terdiri dari 2. Yang pertama adalah bentuk pemerintahan republik dan yang kedua yaitu monarki.⁹ Berikut beberapa penjelasan dari kedua bentuk pemerintahan tersebut :

⁸ Bintan R. Saragih Moh. Koesnardi, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995).

⁹ Prhikmah, "Bab III. Kerangka Teori," in *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGUATAN KONSEP SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL DALAM AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945* (Riau: repository-uin-suska.ac.id, 2022), 23–45, <https://repository.uin-suska.ac.id/58634/>.

1. Republik

Republik (berasal dari bahasa Latin: *res publica* = kepentingan umum) ialah negara dengan pemerintahan rakyat yang dikepalai oleh seorang Presiden sebagai kepala negara yang dipilih dari dan oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu (Amerika Serikat 4 tahun, Indonesia 5 tahun). Biasanya presiden dapat dipilih kembali setelah masa jabatannya.¹⁰

2. Monarki

Kerajaan (Monarki) ialah negara yang dikepalai oleh seorang raja dan bersifat turun temurun dan menjabat untuk seumur hidup. Selain raja, kepala negara suatu monarki dapat berupa kaisar atau syah (kaisar kerajaan Jepang, Syah Iran, dan sebagainya).

Ada beberapa sistem Monarki, yaitu :

- Monarki Mutlak (*absolut*), seluruh kekuasaan dan wewenang tidak terbatas (kekuasaan mutlak). Perintah raja merupakan undang-undang yang harus dilaksanakan. Kehendak raja adalah kehendak rakyat. Terkenal ucapan Raja Louis XIV dari Prancis, *L'Etat cest moi* (negara adalah saya).
- Monarki Konstitusional, kekuasaan raja dibatasi oleh suatu konstitusi (UUD). Raja tidak boleh berbuat sesuatu yang

¹⁰ S.H. Prof.Drs.C.S.T.Kansil and M.H. Christine S.T.Kansil, S.H., *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

19

bertentangan dengan konstitusi dan segala perbuatannya harus berdasarkan dan sesuai dengan isi konstitusi.

- Monarki Parlemitter, ialah suatu monarki dimana terdapat suatu parlemen (DPR), para menteri, baik perseorangan maupun secara keseluruhan, bertanggung jawab sepenuhnya pada parlemen tersebut. Dalam sistem parlementer, raja selaku kepala negara merupakan lambang kesatuan negara, yaitu tidak dapat diganggu – gugat, tidak dapat dipertanggung jawabkan (*The King can do no wrong*) yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah adalah menteri baik bersama-sama untuk seluruhnya maupun untuk perseorangan untuk bidangnya sendiri (sistem pertanggung jawaban menteri, tanggung jawab politik, pidana dan keuangan).

Sama seperti halnya monarki, republik itu pun juga mempunyai sistem pemerintahannya, seperti :

- Republik mutlak (*absolut*)
- Republik konstitusional
- Republik parlementer

Dalam pengertian bentuk pemerintah, termasuk juga diktator, yaitu negara yang diperintah oleh seorang diktator dengan kekuasaan mutlak. Diktator memperoleh kekuasaan yang tak terbatas bukan karena hak turun

¹⁹ temurun (raja) melainkan karena revolusi yang dipimpinnya, biasanya dengan cara kekerasan. ¹⁹ Ia memerintah selama ia dapat mempertahankan dirinya.¹¹

Adapun istilah asing yang sama pengertiannya dengan “bentuk pemerintah” ialah:

1. *The form of government* (Inggris) bukan *governing*,
2. *La forme de gouvernement* (Prancis), bukan *gouverner*,
3. *Regeringsvorm* (Belanda), bukan *regerensvorm*.

Dalam bidang ilmu negara dan ilmu politik, sejak dari zaman dahulu, sudah diadakan pembedaan antara “Republik dan “Monarki” sebagai bentuk-bentuk negara. Teori yang paling tua adalah Aristoteles, yang membedakan adanya bentuk-bentuk negara dalam bentuknya yang murni dan bentuknya yang merosot. Bentuk-bentuk negara menurut Aristoteles adalah :

1. Monarki (bentuk murni)- tirani (bentuk merosot),
2. Aristokrasi (bentuk murni)- oligarki (bentuk merosot),
3. Demokrasi (bentuk murni)-oklokasi (bentuk merosot).

Pembagian oleh Aristoteles ini didasarkan kepada jumlah orang yang memerintah. Monarki diperintah oleh seseorang, aristokrasi diperintah oleh sekelompok orang dan demokrasi diperintah oleh banyak orang, yaitu rakyat seluruhnya.

Teori kedua yang terkenal ialah dari Machiavelli yang mengemukakan bahwa di dunia ini hanya ada dua bentuk negara : republik dan monarki.¹²

¹¹ Ibid.

¹² Ibid.

Teori ketiga ialah dari Jellinek yang juga membagi negara dalam dua bentuk, yaitu monarki dan republik. Jellinek mengambil kriteria cara membentuk kehendak negara (*staatswill*). Kehendak negara dalam monarki ditentukan oleh seorang raja, dan dalam republik oleh banyak orang.

Disamping ketiga teori tersebut, timbul teori dari Leon Duguit yang menggunakan istilah “*formele gouvernement*” (bentuk pemerintah) yang dibaginya dalam bentuk monarki dan republik. Kriteria yang dipakai oleh Duguit, ialah cara penunjukan kepala negara, jika monarki kepala negaranya turun temurun, sedangkan republik tidak.

Adapun teori yang paling modern dalam bidang ilmu-ilmu negara dan politik mengenai istilah ini, ialah seperti yang dikemukakan oleh Prof. Kranenburg dalam bukunya *Algemene Staatsleer* (halaman 73, 1955). Kranenburg menyatakan adanya ketidakpastian dalam penggunaan istilah monarki dan republik, dan tidak terang apakah monarki/republik itu bentuk pemerintah atau bentuk negara. Kranenburg condong kepada pendapat Leon Duguit dan mengemukakan juga pendapat Otto Koelreutter, yang mengikuti pula teori dari Leon Duguit.

Otto Koelreutter bahkan menambah lagi bentuk pemerintahan yang ketiga yaitu negara pemimpin otoriter. Kelompok petugas mengikuti dan bersandar pada teori dari Kranenburg itu, karena Kranenburg menganjurkan pembedaan pengertian bentuk pemerintah dan bentuk negara.¹³

¹³ *Ibid.*, 19.

C. Ruang Lingkup Bentuk Pemerintahan di ASEAN

Asean⁹ merupakan salah satu kawasan di benua Asia yang memiliki beberapa negara di dalamnya. Masing-masing negara tersebut saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang saling menguntungkan satu sama lain. Tak jarang, masing-masing negara tersebut saling bahu-membahu untuk membantu negara lain yang sedang tertimpa masalah.

Asean terdiri dari 10 negara, berikut negara-negara yang tergabung di dalam kawasan ASEAN, yaitu :

1. Indonesia;
2. Malaysia;
3. Thailand;
4. Singapura;
5. Vietnam;
6. Kamboja;
7. Laos;
8. Filipina;
9. Myanmar;
10. Brunei darussalam.

Namun, ada satu negara lagi yang masih belum tergabung kedalam kelompok negara ASEAN yaitu Timor Leste(Timor-timor). Negara tersebut masih berstatus sebagai negara peninjau anggota ASEAN. Mereka masih belum dipastikan masuk karena masih terdapat beberapa negara yang masih

belum memberikan izin kepada mereka untuk masuk kedalam organisasi tersebut. Beberapa faktor yang menentukan mengapa Timor Leste masih belum diizinkan yaitu faktor ekonomi dan sumber daya manusianya. Salah satu negara yang vokal menentang yaitu negara Singapura.

Masing-masing negara di ASEAN pastinya memiliki bentuk pemerintahan di dalam negaranya. Berikut beberapa penjelasan secara singkat mengenai bentuk pemerintahan di negara anggota ASEAN, yaitu :

- ¹⁴ Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. ¹⁴ Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara ¹⁴ menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri (*Council of Minister*).
- ¹⁷ Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Peran utama terdahulu Partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. Presiden Vietnam adalah kepala negara Peran presiden sebagai kepala negara tidak pernah lepas dari bantuan seorang kepala pemerintahan, yaitu

Perdana Menteri. ¹⁷ Perdana Menteri Vietnam adalah kepala pemerintahan mengepalai kabinet yang terdiri atas 3 deputi perdana menteri dan kepala 26 menteri-menteri dan perwira-perwira.

- **Laos**, satu-satunya partai politik yang diakui adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negara adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen. Sistem pemerintahan adalah presidensial dan parlemennya merupakan unikameral.
- **Myanmar** merupakan salah satu Negara yang terletak di Asia Tenggara, ²⁰ dan merupakan salah satu anggota dari ASEAN yang berbentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Myanmar adalah Junta Militer yang di kenal dengan nama The State Peace and Development Council (SPDC). Kepala Negara Myanmar di pegang oleh Junta (Jendral), sedangkan kepala pemerintahan dikepalai oleh perdana menteri.
- **Thailand** adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah pada masa kolonialisasi. Bentuk pemerintahan Thailand adalah monarki konstitusional berbentuk legislatif bikameral demokratis. Pemerintahan

Thailand dikepalai oleh oleh Perdana Menteri dengan raja sebagai kepala negara turun-temurun

- **Indonesia** secara bentuk negara yaitu berbentuk negara kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Indonesia menganut bentuk pemerintahan Republik Konstitusional, merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden. Kekuasaan presiden dibatasi oleh UUD atau konstitusi. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Indonesia dapat dikatakan menganut *Trikameral* (Tiga Kamar).
- **Brunei Darussalam** terkenal sebagai negara yang bernuansa islami, hal ini terlihat dari dijadikannya Istana Nurul Iman sebagai ikon negara Brunei. Mayoritas penduduk Brunei menganut agama Islam dan beretnis melayu. Sistem pemerintahan Brunei menggunakan sistem kesultanan konstitusional atau Monarki Islam Melayu.
- **Malaysia** adalah sebuah federasi dari 13 negara bagian dan 3 wilayah federal. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Malaysia adalah sistem parlementer. Dalam sistem pemerintahan Malaysia yang menjadi kepala pemerintahan adalah seorang ⁶perdana menteri. Konstitusi Malaysia

menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen.

- **Filipina** merupakan negara kepulauan yang sistem pemerintahannya berbentuk republik. Presiden berfungsi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, dan Panglima Tertinggi angkatan bersenjata. Presiden dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 6 tahun, dan memilih dan mengepalai kabinet. Bentuk negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial.
- **Singapura** adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan parlementer unicameral atau Westminster yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menetapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Singapura merupakan negara republik dengan bentuk pemerintahan parlementer. Kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Kepala Negaranya seorang Presiden yang dipilih berdasarkan Undang-undang Presiden, dalam Undang-undang Presiden, dinyatakan bahwa pemilihan Presiden dilakukan sekali dalam enam tahun melalui pemilihan umum. Perdana Menteri sebagai pemimpin kabinet

yang menjalani pemerintahan sehari-hari dipilih dari pimpinan partai yang memegang mayoritas di Parlemen¹⁴.

¹⁴ Fikry Z Pamungkas, "Sistem Pemerintahan Negara Di ASEAN Secara Singkat," 2022.

BAB II

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA

A. Sejarah Negara

Indonesia, merupakan salah satu negara yang tidak asing menurut kita. Betul sekali karena kita tinggal dan lahir di negara yang indah ini. Indonesia telah berdiri sejak kemerdekaan yang diraih dengan susah payah dengan berlumurkan keringat dan darah dari para pejuang yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara yang indah ini telah menjadi primadona bagi seluruh bangsa dan negara di dunia. Tak khayal, banyak sekali bangsa timur dan barat berbondong-bondong ke bumi nusantara untuk sekedar mengunjungi bahkan menetap cukup lama disini.¹⁵

Salah satunya yaitu bangsa Belanda, sebelum itu terlebih dahulu datang bangsa Portugis dan Inggris ke bumi nusantara. Cukup lama Belanda menguasai negeri ini, hampir sekitar 3,5 abad mereka mengeruk dan menguasai negeri ini. Namun para tokoh pejuang bangsa baik di daerah maupun di nasional tak tinggal diam, mereka berjuang dengan sekuat dan sebisa mereka. Ada yang berjuang melalui pengorbanan fisik, ada yang berupa materi dan ada juga yang berupa diplomasi. Kemerdekaan yang diraih adalah hasil kerja keras para tokoh pejuang bangsa. Tidak serta merta kemerdekaan yang di dapat itu dengan mudah. Oleh karena itu sejarah panjang berdirinya negara ini cukup menarik untuk disimak.

¹⁵ Linda Sunarti, "Sejarah Indonesia Dalam Konteks Politik Global Dan Regional," *Sejarah dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya* 10, no. 2 (2016): 164.

1 Awal Kemerdekaan Indonesia

Berawal dari pecahnya “Perang Asia Timur Raya “ , dan Amerika menyatakan perang kepada Jepang karena serbuan tentara Jepang di Pusat Pertahanan Amerika Serikat “Pearl Harbour” pada tgl 8 Desember 1941. Tentara Jepang dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya semakin agresif beraksi mendarat di wilayah Indocina ,Filipina , Malaya dan Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda ikut ikutan Sekutu menyatakan perang dengan Jepang. Jepang mendarat ke Indonesia dengan tujuan melumpuhkan pasukan Belanda .

Pendaratan pertama tentara Jepang di Tarakan kemudian merambah ke daerah Balikpapan, Manado, Ambon, Makasar, Pontianak dan Palembang. Daerah daerah di Jawa juga dikuasainya ,pada tgl 1 Maret 1942 Jepang mendarat di Banten, Indramayu dan Rembang. Wilayahnya semakin meluas dengan dikuasainya Batavia tgl 5 Maret 1942 , dan semakin merajalela ke wilayah Surakarta, Cikampek, Semarang dan Surabaya . Belanda semakin terdesak dengan penyerangan Jepang dan Ooh akhirnya Pemerintah Hindia Belanda menyatakan “menyerah tanpa syarat”.¹⁶

Masyarakat Indonesia pada awalnya menyambut dengan ramah kedatangan militer Jepang , dapat dilihat dari sikap kooperatif tokoh tokoh Nasional kita Ir. Soekarno dan Moh Hatta. Pemerintahan Jepang mulai aktif merangkul

¹⁶ Ratna Widiastuti, “Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia,” *KOMPASIANA*, last modified 2012, accessed November 27, 2022, <https://www.kompasiana.com/widiastuti.ratna/551c12d7813311b67f9de257/sejarah-singkat-kemerdekaan-indonesia>.

¹ rakyat dengan pembentukan organisasi masyarakat, yang sebenarnya “ada udang di balik batu” sebenarnya dibalik itu untuk kepentingan Jepang di Perang Dunia II. Organisasi itu antara lain :Gerakan Tiga A, Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), Jawa Hokokai, Seinendan, Keibodan, Fujinkai, Heiho, MIAI, Pembentukan BPUPKI

BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan RI) dibentuk pada th 1943 dibawah pemerintah Perdana Menteri Tojo, bertugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal hal yang penting dan perlu bagi pembentukan pemerintah Indonesia. Dalam perkembangannya selanjutnya BPUPKI dibubarkan dan diganti nama oleh tokoh pejuang kita, dari BPUPKI menjadi PPPKI atau dikenal dengan Docoritsu Junbi Inkai, dengan penggantian nama ini terkesan bahwa organisasi PPPKI bukan bentukan Jepang tetapi hasil kesepakatan dan perjuangan para tokoh kemerdekaan Indonesia.¹⁷

Peristiwa penting yaitu pertemuan Soekarno, M Hata dan Rajiman Wedyodiningrat dengan Jenderal Terauchi di Dalat menyampaikan bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang wilayahnya meliputi bekas wilayah Hindia-Belanda.

Kekalahan Jepang Atas Sekutu dan Kemerdekaan Indonesia

Pasukan Jepang mulai melemah, kekalahan dan kekalahan diperolehnya dan Amerika semakin kuat, apalagi setelah menarik pasukannya yang ada di

¹⁷ Ibid.

Eropa. Serangan Jepang dapat dihentikan oleh tentara Amerika antara lain pada bulan Mei 1942 di pertempuran Laut Koral dan Juni 1942 di Pertempuran Midway. Jepang semakin klepek klepek karena Amerika mengamuk sehingga pada tgl 6 Agustus 1945 AS menjatuhkan Bom Atom pertamanya di Hiroshima . Amerika belum puas juga dan tiga hari kemudian tanggal 9 Agustus Bom Atom kedua mendarat kembali di kota Nagasaki, dua pusat kota pemerintahan Jepang menjadi hancur rata dengan tanah. Akhirnya Ohhhh Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tgl 14 Agustus 1945. Penyerahan kalah itu dilakukan di kapal Missouri pada tanggal 2 September 1945 oleh Kaisar Hirohito(Jepang) dan Jendral Douglas Mc Arthur(Sekutu)

Berita kekalahan Jepang terhadap Sekutu tidak dapat disembunyikan, dengan perjanjian Post Dam Jepang menyerahkan kekuasaannya kepada Sekutu dan otomatis di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan . Kesempatan ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia dengan memproklamasikan “KEMERDEKAAN INDONESIA”.

Peristiwa Rengasdengklok

Soekarno enggan untuk langsung memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sebab, ia memilih menunggu lebih dulu kesepakatan dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Para golongan muda yang tidak ingin Soekarno dan Hatta terintimidasi oleh Jepang, memutuskan untuk menculik dua tokoh bangsa itu pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno dan Mohammad Hatta diculik oleh golongan pemuda ke

Rengasdengklok, Karawang. Selama berada di sana, Soekarno dan Hatta terus didesak agar segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, Soekarno dan Hatta sepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia selambat-lambatnya pada 17 Agustus 1945.

Soekarno dan Hatta kemudian dibawa kembali ke Jakarta dan tiba pukul 02.00 WIB. Setibanya di Jakarta, mereka singgah di rumah Laksamana Muda Tadasi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Hatta, dan tokoh nasionalis lainnya menyusun naskah proklamasi. ¹ Para penyusun teks proklamasi adalah Soekarno, Hatta, dan Achmad Soebardjo. ¹ Konsep teks proklamasi ditulis oleh Soekarno. Setelah perundingan panjang, akhirnya teks proklamasi berhasil diselesaikan dan akan dibacakan di depan seluruh rakyat Indonesia pada 17 Agustus 1945.¹⁸

Pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, acara pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimulai. Setelah itu, dilakukan pengibaran ¹ Sang Saka Merah putih, yang telah ¹ dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Keesokan harinya, pada 18 Agustus 1945, PPKI ¹ mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara Republik Indonesia. Selain pengesahan UUD, dilakukan juga pemilihan pemimpin negara

¹⁸ Verelladevanka Adryamarthanino, "Resume Sejarah Kemerdekaan Indonesia," *KOMPAS.Com*, last modified 2022, accessed November 27, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/16/170000379/resume-sejarah-kemerdekaan-indonesia?page=all>.

Indonesia. Hasilnya, Soekarno terpilih sebagai Presiden Indonesia (1945-1967) dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia (1945-1956).

Segera begitu Soekarno membacakan teks proklamasi, kabar kemerdekaan Indonesia langsung tersebar hingga ke seluruh pelosok negeri. Pada masa itu, berita proklamasi disebarakan melalui beragam cara, mulai dari siaran radio, telegram, surat kabar, pamflet, hingga dari mulut ke mulut. Adapun tokoh-tokoh yang menyebarkan berita proklamasi adalah sebagai berikut: Sukarni Supardjo BM Diah Syahrudin Ki Hajar Dewantara Demikianlah resume kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.¹⁹

Terkait Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tokoh-tokoh Proklamasi Kemerdekaan dan Perannya Museum Perumusan Naskah Proklamasi: Sejarah, Perkembangan, dan Isinya Isi Teks Proklamasi dan Sejarah Singkatnya Kisah di Balik Perumusan Teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.²⁰

Kondisi Geografis Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan yang terbesar di dunia. Kepulauan Indonesia sebanyak 17.508 pulau (dulu 13.667 buah). Sebab itu Indonesi disebut sebagai negara kepulauan atau nusantara. Nusa berarti tanah air, pulau, antara berarti terletak di antara, berada, diapit oleh. Nusantara berarti tanah air / pulau yang terletak di antara. Nusantara digunakan sebagai menggambarkan suatu wilayah perairan dan gugusan - gugusan pulau yang terletak diantara

¹⁹ MC Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008).

²⁰ Adryamarthanino, "Resume Sejarah Kemerdekaan Indonesia."

samudra pasifik dan samudra Indonesia, dan diapit oleh dua buah benua Asia dan Australia. Berikut beberapa negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesiam yaitu:

- a. Barat : Malaysia, Singapura
- b. Utara : Malaysia, Brunei Darussalam
- c. Timur : Papua Nugini
- d. Selatan : Timor Leste

Total provinsi yang ada di Indonesia yaitu 38 provinsi. Hal itu diperkuat karena baru di sahkan nya daerah provinsi papua barat daya. Pemekaran ini dituangkan dalam Undang-Undang (UU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang bau saja disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang melibatkan pemerintah.²¹

Provinsi Papua Barat Daya mencakup enam wilayah yaitu:

1. Kota Sorong,
2. Kabupaten Sorong,
3. Kabupaten Sorong Selatan,
4. Kabupaten Raja Ampat,
5. Kabupaten Tambrauw, dan
6. Kabupaten Mambreamo.

²¹ Tim Redaksi CNBC, "Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftar Lengkapnya," accessed November 27, 2022, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-daftar-lengkapnya>.

Adapun Kota Sorong sendiri ditetapkan sebagai ibu kotanya. Sebagai informasi, belum lama ini pemerintah juga meresmikan tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua. Ketiga provinsi tersebut adalah Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

B. Bentuk Pemerintahan Negara Indonesia

¹⁵ Setiap negara modern menganut sistem pemerintahan yang berbeda-beda tergantung bagaimana kondisi sosial budaya dari masyarakat yang berada dalam negara tersebut, yang lazimnya termuat dalam konstitusi negara. Demikian halnya Indonesia sebagai salah satu negara modern juga memiliki Konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang memuat pencerminan sistem pemerintahannya. ¹⁵ Pada awal kemerdekaan Indonesia, tanggal 18 Agustus 1945, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, yang tercerminalam ¹⁵ Pasal 4 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.²²

Dengan demikian Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. ⁴ Oleh karena itu, gelombang tuntutan perubahan di tahun 1998 merupakan salah satu bentuk tuntutan zaman agar Indonesia melakukan berbagai penyesuaian-penyesuaian secara konstitusi. Untuk menghasilkan produk hukum yang berkarakter responsif dan tidak otoriter, tentu sesuai atas keinginan rakyat diperlukan adanya peningkatan peranan Lembaga Negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara mendasar kekuasaan lazimnya dipetakan ke dalam beberapa fungsi yang berkaitan satu sama lain. John Locke dalam bukunya *“Two Treatises of*

²² Muslimin Budiman, “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial,” *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum* 20, no. 1 (2017): 29.

⁴ *Government*”, membagi kekuasaan negara dalam tiga fungsi, tetapi berbeda isinya. Menurut Locke fungsi-fungsi kekuasaan negara terdiri dari; fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Dengan mengikuti jalan pikiran John Locke, Montesquieu dalam bukunya “*L’Esprit des Lois*” yang ditulis tahun 1784 atau versi bahasa Inggris-nya dikenal “*The Spirit of The Laws*“, mengklasifikasikan kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu:

- a. Kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang;
- b. Kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang.
- c. Kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif.²³

⁴ Masnur Marzuki, “Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip Checks and Balances Dalam UUD 1945. . Makalah Pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi Untuk Guru SMP” (Kota Yogyakarta, n.d.).

C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan di Indonesia

Proses Sistem Pemerintahan Dari Orde Lama Hingga Saat Ini

¹⁵ Sistem pemerintahan berdasarkan UUD Tahun 1945, kemudian berubah pada tahun 1949 yang ditandai dengan diberlakukannya Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), yaitu sistem parlementer. Dalam ¹⁵ Pasal 69 ayat (1) menyatakan “Presiden sebagai Kepala Negara”. Dengan demikian, yang melaksanakan dan bertanggungjawab tugas-tugas pemerintahan adalah Perdana Menteri dan menteri-menteri.

Dalam sistem pemerintahan parlementer, pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sedangkan kedudukan Presiden adalah sebagai Kepala Negara. Masa berlaku Konstitusi RIS tersebut, ¹⁵ kemudian berubah menjadi UUD Sementara yang diberlakukan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1950, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 7 tahun 1950.

¹⁵ Sistem pemerintahan berdasarkan UUDS adalah sistem pemerintahan Parlementer. Dalam ¹⁵ Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan Presiden ialah Kepala Negara. Selain itu, dalam Pasal 84 menyatakan Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu, memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan ²⁴.

Dewan Perwakilan Rakyat baru dalam 30 hari. ¹⁵ UUDS 1950 tersebut sama sekali tidak membuat perubahan pada konstalasi politik saat itu, sebagaimana yang menjadi dasar diterbitkannya UUDS 1950 yaitu mengubah dan

²⁴ Budiman, “Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial,” 31–32.

¹⁵ membentuk UUD baru, sehingga Presiden Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden dan menganggap, Konstituante telah gagal menjalankan amanat yaitu membentuk Undang Undang Dasar baru. Dengan kembali diberlakukannya ¹⁵ UUD Tahun 1945.

Sistem pemerintahan presidensial dalam pelaksanaan menyimpang jauh dari sistem presidensial sebagaimana mestinya. Dekrit Presiden tidak dapat meredam konflik politik, sehingga diterbitkanlah Surat Perintah Sebelas Maret. Peralihan kekuasaan tersebut, dikenal dengan nama Orde Baru dimana sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan presidensial, hanya saja terjadi sakralisasi terhadap UUD Tahun 1945. Sakralisasi tersebut mencapai puncaknya dengan dikeluarkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum dan UU Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum.

Dengan sakralisasi tersebut, menimbulkan gejolak politik di masyarakat, sehingga terjadi peralihan kekuasaan yang dikenal dengan sebutan Era Reformasi, yang ditandai dengan dimungkinkannya perubahan atas UUD Tahun 1945, dimana Sistem pemerintahannya oleh sebagian ahli hukum tata negara menyebutnya dengan sistem pemerintahan presidensial atau ¹⁵ sistem pemerintahan Quasi Parleментар Presidensial dengan mendasarkan pada amandemen UUD NRI Tahun 1945.²⁵

Amandemen terhadap UUD Tahun 1945 yang tidak berubah adalah Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Dalam Pasal 4 menyatakan;

²⁵ Ibid.

- 1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
- 2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
- 3) Selain itu, UUD NRI Tahun 1945 sama sekali tidak menentukan agar jabatan Presiden diatur dalam sebuah undang-undang.

Hal ini menimbulkan konsekuensi terjadinya pemusatan kekuasaan presiden (concentrated on president power)", sehingga mengarah pada sistem kekuasaan pemerintahan yang otokrasi konstitusional. Kekuasaan Presiden tidak hanya semata-mata pada bidang Eksekutif, tetapi juga pada bidang legislatif dan yudikatif.

Dalam bidang Legislatif, Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta berhak menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Pasal 5 jo Pasal 22 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dalam bidang Yudikatif, Presiden memiliki kewenangan memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi serta menetapkan Hakim Agung dan juga memiliki hak prerogatif lainnya (Pasal 14 jo Pasal 24A ayat 3 UUD NRI). Hal ini menunjukkan betapa luasnya kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden, sehingga sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam lagi.²⁶

⁴ Hal yang tidak boleh dilupakan, struktur negara Indonesia, selain eksekutif dan legislatif juga memiliki lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung (MA).

²⁶ Ibid.

Sebagai lembaga peradilan, peran MA memerlukan ketegasan dalam UUD 1945. Kekuasaan Kehakiman harus diberikan ketegasan sebagai lembaga peradilan yang memiliki independensi. Meminjam pemikiran yang diusulkan oleh Sri Soemantri bahwa Mahkamah Agung semestinya diberi wewenang untuk melakukan hak uji terhadap undang-undang (*judicial review*) sebelum lahirnya Mahkamah Konstitusi.²⁷

Dengan demikian, pembagian kekuasaan yang jelas di antara tiga cabang kekuasaan yang disebutkan dalam trias politika yaitu Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif berdasarkan prinsip “*checks and balances*” sudah tertuang sejak perumusan sampai pengesahan. Akan tetapi diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas dari Presiden/eksekutif sehingga Presiden/eksekutif tidak sewenang-wenang. Selanjutnya, perlu ada kejelasan peran dan fungsi DPR dalam hal fungsi perundang-undangan, fungsi pengawasan kekuasaan pemerintahan dan fungsi perwakilan rakyat. Sehingga DPR atau legislatif dapat benar-benar melaksanakan fungsinya sebagai pengemban kedaulatan rakyat.²⁸

Di samping itu juga perlu kejelasan fungsi dan peran MPR dalam rangka memberdayakan lembaga negara yang berdasarkan konstitusi kita dianggap sebagai pegejewantahan kedaulatan rakyat Indonesia. Masalah peningkatan

²⁷ Mahkamah Konstitusi, “Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Latar Belakang, Proses, Dan Hasil Pembahasan, 1999-2002,” in *Buku I Edisi Revisi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal, n.d.), 225.

²⁸ Ahmad Yani, “Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 121–122.

4 wewenang lembaga kehakiman (yudikatif) juga menjadi perhatian dalam sistem pemerintahan yang digunakan dalam rangka menegakkan “*checks and balances*” di antara tiga cabang kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia.

D. Kelebihan Dan Kelemahan Bentuk Pemerintahan di Indonesia

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia menganut bentuk pemerintahan yaitu berbentuk Republik. Dengan sistem pemerintahan yaitu presidensial. Negara Indonesia termasuk kedalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi. “Kedaulatan berada di tangan rakyat”, itu adalah slogan yang selalu dikatakan oleh penganut demokrasi.

Berikut beberapa kelebihan dan kelemahan dari diberlakukannya sistem pemerintahan presidensial di Indonesia, yaitu:²⁹

1. Kelebihan

Berikut beberapa kelebihan dari diterapkannya sistem pemerintahan presidensial, yaitu :

- Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya sebab tidak tergantung pada parlemen
- Bahwa seorang Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen karena bertanggung jawab kepada presiden.
- Pemerintah dapat leluasa karena tidak ada bayang-bayang krisis kabinet
- Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga anggota parlemen sendiri.

²⁹ Fisipol, “Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Parlementer · Fakultas Isipol Terbaik Di Sumut,” *Fisipol.Uma.Ac.Id*, accessed November 27, 2022, <https://fisipol.uma.ac.id/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer/>.

- Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
- Penyusun program kerja kabinet lebih mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

2. Kelemahan

Berikut beberapa kelemahan dari diterapkannya sistem pemerintahan presidensial, yaitu :

- Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
- Pengawasan rakyat lemah
- Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
- Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
- Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik negara kurang mendapat perhatian

BAB III

BENTUK PEMERINTAHAN MALAYSIA

A. Sejarah Negara

Malaysia merupakan negara federal di Asia Tenggara yang memiliki 13 negara bagian dan satu wilayah persekutuan. Negara ini terdiri dari beberapa kelompok atau suku asli yang telah mendiami selama ribuan tahun lamanya.

Sebelum merdeka, Malaysia pernah dijajah oleh Inggris di Semenanjung Malaya pada 1786. Pada 1824, Traktat London resmi membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Selama abad ke-19, Inggris memiliki pengaruh yang besar karena telah membantu untuk menyelesaikan konflik internal negara-negara Melayu. Ketika Jepang menginvasi Malaya, semangat rakyat untuk memperjuangkan kemerdekaan pun tumbuh.

Negara ini mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Melansir dari situs Pemerintahan Malaysia, sejarah berdirinya Malaysia dimulai dari Kesultanan Malaka yaitu sekira tahun 1400 Masehi.

Pada masa kejayaannya, wilayah kesultanan meliputi sebagian besar Pantai Timur Semenanjung Malaysia dan Sumatera. Malaka muncul sebagai Pemerintahan yang gemilang karena letaknya yang strategis yang merupakan titik pertemuan antara Asia Timur dan Timur Tengah. Situasi

ini memungkinkan Malaka muncul sebagai pusat perdagangan utama untuk perdagangan rempah-rempah, terutama di Asia Tenggara. Islam adalah agama utama yang muncul dan menjadi agama utama penduduk karena Penguasa sendiri yang menganut agama tersebut.

Pada 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis dan itulah awal dari era penjajahan di Malaya. Setelah itu, Malaya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641 dan Inggris pada 1824 melalui Perjanjian Anglo-Belanda. Penjajahan Inggris adalah yang terpanjang dibandingkan dengan yang lain. Inggris telah mengintegrasikan semua administrasi Melayu yang sebelumnya dikelola oleh Penguasa Melayu dengan bantuan pejabat negara.

Intervensi Inggris telah menimbulkan ketidakpuasan di antara penduduk setempat. Beberapa individu bangkit melawan kolonial namun dengan mudah dikalahkan oleh Inggris karena upaya mereka lebih ke arah individualitas. Di antara para pahlawan yang melawan penjajah adalah Dol Said, Tok Janggut, Datuk Bahaman, Rentap, Dato Maharajalela, Rosli Dobi dan beberapa lainnya.

Selama periode 1920-an dan 1930-an, banyak penduduk Malaya yang mulai mengenyam pendidikan, baik dari Timur Tengah maupun pendidikan lokal. Akibatnya, kelompok terpelajar ini muncul untuk berjuang atas nama nasionalisme. Mereka menggunakan media seperti koran dan majalah untuk menyebarkan ideologi mereka. Di antara mereka

juga ada yang membentuk Perhimpunan seperti Kesatuan Melayu Muda (KMM) dan Kesatuan Melayu Singapura (KMS) yang bertujuan mengusir penjajah dan membentuk pemerintahan sendiri.

Ketika rakyat negeri itu begitu ingin mengakhiri invasi, mereka dikejutkan dengan pendaratan Jepang di penghujung 1941 yang membawa Malaya ke era kolonial lagi. Jepang pernah menduduki Malaya sampai 1945 sebelum menyerah akibat pengeboman Hiroshima dan Nagasaki.

Pengunduran diri Jepang telah memberi ruang kepada Partai Komunis Malaya (PKM) untuk menguasai Malaya. PKM telah melancarkan serangan ke Malaya melalui kekerasan, mereka telah membunuh tiga manajer pertanian karet Eropa di Sungai Siput, Perak. Dengan demikian, pada bulan Juni 1948, Sir Edward Gent telah mengumumkan keadaan darurat atas Malaya. PKM tidak berhasil Malaya dan Inggris kembali berkuasa. Administrasi Militer Inggris atau BMA adalah antara akhir Perang Dunia II dan pembentukan Persatuan Malaya. Pada 1 April 1946, Inggris mendirikan Persatuan Malaya. Namun, ide ini mendapat perlawanan dari orang Melayu untuk penghapusan institusi kerajaan dan hak istimewa orang Melayu.

Kemunculan Tunku Abdul Rahman telah memberi hikmah bagi perjuangan kaum nasionalis Melayu ketika aksinya membentuk Partai Aliansi mulai membuka mata Inggris untuk mengizinkan orang Melayu memerintah negaranya sendiri. Persatuan antara tiga kelompok etnis besar yaitu Melayu, Cina dan India menyebabkan Perjanjian London yang

ditandatangani pada tanggal 8 Februari 1956 dan telah memberikan tanda-tanda bahwa Malaya akan mencapai kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Sekembalinya Tunku Abdul Rahman Al-haj dari London Tunku telah membuat deklarasi kemerdekaan Malaya di Padang Bandar Hilir, Melaka pada tanggal 20 Februari 1956. Pada 27 Mei 1961, Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj telah mengusulkan penggabungan lima koloni yaitu Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membentuk sebuah negara baru.

Pada 9 Juli 1963, perwakilan pemerintah Inggris, Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura kecuali Brunei menyebabkan hal tersebut tidak dapat dihindari. Keinginan untuk membentuk negara yang disebut MALAYSIA tercapai pada 16 September 1963.³⁰

Jauh sebelum merdeka, Malaysia pernah dijajah oleh beberapa negara lain :

A. Portugal

Negara pertama yang menjajah Malaysia adalah Portugal. Penjajahan bangsa Portugis pun, berlangsung sangat lama, yakni sekitar 400 tahun. Secara geografis, Malaysia terbagi ke dalam dua bagian, yakni Semenanjung Malaysia atau Malaysia Barat dan Malaysia Timur yang ada di Pulau Kalimantan. Semenanjung Malaya merupakan salah satu bagian negara yang letaknya sangat strategis, sehingga menjadi pusat perdagangan utama di Asia Tenggara.

³⁰ Nadilla Syabriya, "Sejarah Berdirinya Negara Malaysia : Okezone News."

Berkembangnya perdagangan antara Tiongkok, India, dan beberapa negara lain membuat Selat Malaka menjadi jauh lebih sibuk. Setelah itu, berdiri Kerajaan Melayu bercorak Hindu-Buddha di Malaysia, yang dipengaruhi oleh Sriwijaya dan Kerajaan Chola dari India. Pada abad ke-15, berdiri Kesultanan Malaka yang dibentuk oleh Parameswara dari Indonesia. Sekitar satu abad setelahnya, Kesultanan Malaka berhasil ditaklukkan oleh bangsa Portugis.

Salah satu alasan Portugis menjajah Malaysia adalah karena kekayaan sumber daya alam di sana. Mengingat bahwa Malaysia saat itu tengah menjadi pusat perdagangan bagi sebagian besar negara lain, seperti Tiongkok dan India. Pada 1614, Portugis dikalahkan oleh Kesultanan Johor, yang turut dibantu oleh Belanda.

B. Belanda

Setelah sempat membantu Kesultanan Melaka melepaskan diri dari Portugis, Belanda juga turut menjajah Malaysia pada 1641. Belanda menjajah Malaysia dalam dua periode. Periode pertama berlangsung antara 1641-1795, dan periode kedua pada 1818-1825. Malaysia, yang dulu disebut sebagai Malaka, diduduki oleh Belanda selama lebih dari 100 tahun. Wilayah yang diduduki Belanda memang tidak terlalu menghasilkan sumber daya alam, tetapi lokasinya dinilai cukup strategis untuk jalur perdagangan rempah dan sutra.

C. Inggris

Inggris mendirikan koloni pertamanya di Semenanjung Malaya, Malaysia, pada 1786. Sejak saat itu, antara Inggris dan Belanda terus terjadi selisih paham lantaran memperebutkan kepemilikan wilayah. Akhirnya, pada 1824, Traktat London resmi dibuat yang salah satu isinya adalah membagi kepemilikan Malaya untuk Inggris dan Indonesia untuk Belanda. Sepanjang abad ke-19, negeri-negeri Melayu terus berusaha meminta bantuan kepada Inggris untuk menyelesaikan masalah internal mereka.

Akhirnya, pada 20 Februari 1874, Inggris menandatangani Perjanjian Pangkor, di mana Inggris diberi kuasa penuh untuk mencampuri urusan negeri Malaysia. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Inggris kembali berkuasa di Malaysia, dibentuk Uni Malaya. Lewat Uni Malaya, semua negeri Melayu disatukan menjadi koloni, kecuali Singapura. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II dan Inggris kembali berkuasa di Malaysia, dibentuk Uni Malaya. Lewat Uni Malaya, semua negeri Melayu disatukan menjadi koloni, kecuali Singapura.

Hal ini membuat golongan nasionalis Melayu merasa tidak senang, sehingga Kepala Menteri Johor, Dato Onn bin Jaafar, membentuk Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) supaya perjuangan mereka untuk memerdekakan Melaya bisa berjalan baik. Perjuangan UMNO pun membuahkan hasil. Pada 1948, Uni Malaya dibubarkan dan diganti dengan Federasi Malaya. Federasi Malaya mencakup

sembilan kerajaan Melayu ditambah dua provinsi, yaitu ⁸ Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Penang, Perak, Perlis, Selangor, dan Trengganu.

Inggris, yang melihat Malaysia terus berkembang, akhirnya berunding dengan para pemimpin Federasi Malaysia pada 1949. Pada 8 Februari 1956, Inggris sepakat untuk memberi kemerdekaan kepada Federasi Malaya. Proklamasi kemerdekaan Malaysia digelorakan pada 31 Agustus 1957 di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur, Malaysia.

D. Jepang

Ketika pasukan Sekutu gagal membendung kekuatan Jepang selama Perang Dunia II, Malaysia turut jatuh ke tangan Malaysia. Ketika Jepang menginvasi Malaya pada Desember 1941, rakyat mulai sadar bahwa sudah saatnya mereka memerdekakan diri dari para penjajah. Jepang menduduki Malaya, atau saat ini Malaysia dan Singapura, selama empat tahun, hingga ¹ Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada Agustus 1945. Namun, setelah lepas dari Jepang, Malaysia masih harus berurusan dengan Inggris, sebelum akhirnya benar-benar merdeka pada 31 Agustus 1957.³¹

³¹ Verelladevanka Adryamarthanino, "Siapa Yang Pernah Menjajah Malaysia? Halaman All - Kompas.Com."

Kronologi Kemerdekaan Malaysia.

27 Juli 1955 Pemilihan Federal pertama diadakan. (UMNO telah bekerja sama dengan MCA (didirikan pada 27 Februari 1949) dan MIC (didirikan pada Agustus 1946) untuk membentuk Partai Aliansi untuk menghadapi pemilihan.³²

a. 10 Agustus 1955.

Tunku Abdul Rahman membentuk Kabinet pertama yang terdiri dari 6 wakil Melayu, 3 wakil Cina dan 2 wakil India.

b. 18 Januari – 6 Februari 1956.

Tunku Abdul Rahman memimpin delegasi untuk merundingkan kemerdekaan Malaysia di London.

c. 8 Februari 1956.

Perjanjian Merdeka ditandatangani dengan menetapkan tanggal 31 Agustus 1957 sebagai tanggal kemerdekaan Malaysia.

³² Ani Early, "Mengenal Sejarah Kemerdekaan Malaysia - Qelola Blog."

d. 20 Februari 1956.

Tunku Abdul Rahman membuat Proklamasi Kemerdekaan di Padang Pahlawan, Bandar Hilir, Melaka.

e. 21 Maret 1956.

Komisi Konstitusi Reid, sebuah komisi independen dibentuk untuk mempelajari dan merancang Konstitusi Federasi Malaysia.

f. 28 – 29 Desember 1956.

Tunku Abdul Rahman ditantang untuk menyelesaikan masalah pemberontakan komunis. Kemudian diadakan Perundingan Baling pada 28-29 Desember 1956 dengan Chin Peng, Sekretaris Jenderal Partai Komunis Malaysia (CPM)

g. 30 Agustus 1957.

12.00 detik, Union Jack diturunkan di depan Gedung Sultan Abdul Samad dan diganti dengan bendera Federasi Malaysia menandai kemerdekaan negara.

h. 31 Agustus 1957.

Deklarasi kemerdekaan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadion Merdeka, Kuala Lumpur.

B. Bentuk Pemerintahan Negara ²¹Malaysia

Negara Malaysia resmi masuk ASEAN pada 8 Agustus 1967. Malaysia memiliki bentuk pemerintahan berupa kerajaan yang dipimpin seorang raja dengan gelar “Yang Dipertuan Agung” sebagai kepala negara. Roda pemerintahan di Malaysia berjalan di bawah kepemimpinan "Perdana Menteri" yang dipilih berdasar dukungan mayoritas anggota di parlemen setiap enam tahun sekali. Maka itu, bentuk kerajaan di Malaysia dapat disebut juga sebagai monarki konstitusional. Malaysia memiliki ibu kota yang bernama Kuala Lumpur. Terkait dalam menjalankan proses jual beli sehari-hari, negara ini menggunakan mata uang resmi, Ringgit Malaysia (MYR).³³

Monarki Konstitusional merupakan negara yang dipimpin oleh raja sebagai kepala negara dimana kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang atau konstitusi. Bentuk pemerintahan Malaysia adalah monarki konstitusional, yaitu berupa Negara kerajaan yang diatur oleh konstitusional. Dimana kepala negaranya merupakan ²⁰seorang raja yang disebut dengan Yang di-Pertuan Agong (Raja Malaysia). Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran; empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan .

³³ Yopi Nadia, “Bentuk-Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN Halaman All - Kompas.Com.”

Yang di-Pertuan Agong ialah gelaran resmi ketua negara Malaysia. Gelaran resmi yang penuh adalah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Oleh sebab Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan, peranan Yang di-Pertuan Agong kebanyakannya hanyalah sebagai istiadat. Perlembagaan menyatakan dengan jelas bahwa kuasa eksekutif, secara teorinya di bawah kuasa ketua negeri, dilaksanakan oleh Kabinet atau Jemaah Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri.

¹² Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensial, karena kefleksibilitasnya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Prancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini. Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Monarki terpilih atau monarki elektif adalah monarki yang dipimpin oleh seorang penguasa yang dipilih, berbeda dengan monarki herediter yang jabatannya diturunkan sebagai warisan keluarga. Tata cara pemilihannya, jenis kualifikasi kandidatnya, serta siapa pemilihnya berbeda dari satu kasus ke kasus lainnya. Menurut sejarah, sangat wajar sebuah monarki terpilih berubah menjadi herediter dari waktu ke waktu, maupun bentuk herediter menerapkan aspek elektif sesekali.

Sistem Pemerintahan Malaysia

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa

disebut Raja Malaysia. Yang di-Pertuan Agong dipilih dari dan oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran: empat pemimpin negeri lainnya, yang bergelar Gubernur, tidak turut serta di dalam pemilihan. Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan yudikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan yudikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. ⁸ Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia).

¹⁴ Malaysia sebuah negara federal yang terdiri dari tiga belas negeri (negara bagian) dan tiga wilayah federal di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan federal. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan Malaysia Barat dan Malaysia Timur oleh Kepulauan Natuna, wilayah Indonesia di Laut Tiongkok Selatan. Malaysia berbatasan dengan Thailand, Indonesia, Singapura, Brunei, dan Filipina. Negara ini terletak

di dekat khatulistiwa dan beriklim tropika. Kepala negara Malaysia adalah seorang Raja atau seorang Sultan yang dipilih secara bergiliran setiap 5 tahun sekali, hanya negeri-negeri (negara bagian) yang diperintah oleh Raja/Sultan saja yang diperbolehkan mengirimkan wakilnya untuk menjadi Raja Malaysia. Raja Malaysia biasanya memakai gelar Sri Paduka Baginda ¹⁴ Yang di-Pertuan Agong, dan pemerintahannya dikepalai oleh seorang Perdana Menteri. Model pemerintahan Malaysia mirip dengan sistem parlementer Westminster.

Malaysia sebagai negara federal tidak pernah ada sampai tahun 1963. Sebelumnya, sekumpulan koloni didirikan oleh Britania Raya pada akhir abad ke-18, dan bagian barat Malaysia modern terdiri dari beberapa kerajaan yang terpisah-pisah. Kumpulan wilayah jajahan itu dikenal sebagai Malaya Britania hingga pembubarannya pada 1946, ketika kumpulan itu disusun kembali sebagai Uni Malaya. Karena semakin meluasnya tentangan, kumpulan itu lagi-lagi disusun kembali sebagai Federasi Malaya pada tahun 1948 dan kemudian meraih kemerdekaan pada 31 Agustus 1957.

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara

pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi).

Sistem politik Malaysia dapat dikatakan demokrasi, hal ini dapat dilihat dari adanya pembagian kekuasaan dan adanya pelaksanaan pemilu meskipun kalau dilihat lebih dalam tidak begitu demokratis karena tidak jurdil. Di Malaysia, seperti kebanyakan Negara lainnya kekuasaan Negara terdiri dari badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

a. Kekuasaan Legislatif.

Dalam kekuasaan legislatif Malaysia memiliki sistem bikameral yang terdiri dari Senat (Dewan Negara) dan House of Representatives (Dewan Rakyat). Senat menguasai 70 kursi di parlemen sementara HoR menguasai 219 kursi. 44 anggota Senat ditunjuk oleh pemimpin tertinggi sementara 26 lainnya ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian. Anggota HoR dipilih melalui popular vote untuk masa jabatan selama 5 tahun.

Kekuasaan legislatur dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatur negeri. Parlemen bikameral terdiri dari dewan rendah, Dewan Rakyat (mirip "Dewan Perwakilan Rakyat" di Indonesia) dan dewan tinggi, Senat atau Dewan Negara (mirip "Dewan Perwakilan Daerah" di Indonesia). 222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari daerah pemilihan beranggota-tunggal yang diatur berdasarkan jumlah penduduk untuk masa

jabatan terlama 5 tahun. 70 Senator bertugas untuk masa jabatan 3 tahun; 26 di antaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian (masing-masing mengirimkan dua utusan), dua mewakili wilayah persekutuan Kuala Lumpur, masing-masing satu mewakili wilayah persekutuan Labuan dan Putrajaya, dan 40 diangkat oleh raja atas nasihat perdana menteri. Di samping Parlemen di tingkatan persekutuan, masing-masing negara bagian memiliki dewan legislatif unikameral (Dewan Undangan Negeri) yang para anggotanya dipilih dari daerah-daerah pemilihan beranggota-tunggal. Pemilihan umum parlemen dilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. Pemilih terdaftar berusia 21 tahun ke atas dapat memberikan suaranya kepada calon anggota Dewan Rakyat dan calon anggota dewan legislatif negara bagian juga, di beberapa negara bagian. Voting tidak diwajibkan.

b. Kekuasaan Eksekutif.

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri; konstitusi Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota dewan rendah (Dewan Rakyat), yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan mayoritas di dalam parlemen. Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu.; sedangkan kabinet merupakan anggota parlemen yang dipilih dari Dewan Rakyat atau Dewan Negara.

c. Kekuasaan Yudikatif.

Dalam hal ⁶kekuasaan Yudikatif, sistem hukum di Malaysia berdasar pada hukum Inggris dan kebanyakan UU serta konstitusi diadaptasi dari hukum India. Di Malaysia terdapat Federal Court, Court of Appeals, High Courts, Session's Courts, Magistrate's courts dan Juvenile Courts. Hakim Pengadilan Federal ditunjuk oleh pemimpin tertinggi dengan nasehat PM. Pemerintah federal memiliki kekuasaan atas hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan dalam negeri, keadilan, kewarganegaraan federal, urusan keuangan, urusan perdagangan, industri, komunikasi serta transportasi dan beberapa urusan lain. Badan Kehakiman (Yudikatif). Badan Kehakiman merupakan badan ketiga dalam sistem kerajaan Malaysia. Kekuasaan kehakiman ini dipengang oleh Mahkamah Tinggi & Mahkamah Rendah. Pengadilan tertinggi di sistem peradilan adalah Pengadilan Federal, diikuti oleh Pengadilan Banding dan dua Pengadilan Tinggi, satu untuk Semenanjung Malaysia dan satunya lagi untuk Malaysia Timur.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaya atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai mayoritas di dalam Dewan Undangan Negeri. Di tiap-tiap negara bagian yang memelihara monarki lokal, Menteri Besar haruslah seorang Suku Melayu Muslim, meskipun penguasa ini menjadi subjek kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan politik di Malaysia amat penting untuk memperjuangkan suatu isu dan hak. Oleh karena itu

kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan.

⁶ Di Malaysia, yang menganut sistem parlementer, pelaksanaan pemilu bisa disederhanakan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemilih dalam menentukan pilihan. ⁶ Partai-partai dengan latar belakang ras dan ideologi yang beragam itu bertarung dalam dua bendera koalisi, yang dijalin sebelum dan sesudah pemilu, serta dilakukan secara permanen. Kerangka konstitusional sistem politik Malaysia memang bersifat demokratis.

Namun, kerangka demokratis itu disertai kontrol otoritarian yang luas untuk menyumbat oposisi yang efektif. Karena itu, sulit dibayangkan partai pemerintah bisa kalah. Sejak awal, sistem politik Malaysia merupakan campuran dari karakteristik responsif dan represif. Sistem pemilu Malaysia juga tidak jujur. ⁶ Sistem dirancang untuk cenderung menguntungkan partai pemerintah sehingga hampir mustahil ia dapat dikalahkan. Dalam setiap pemilu, BN selalu memenangkan sekitar 3/5 ⁶ suara dan menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Bahkan, dalam Pemilu 1990 dan 1999, ketika UMNO dilanda perpecahan serius dan BN dalam tekanan politis yang kuat oleh gerakan reformasi, oposisi tetap kalah. Dengan demikian, pemilu pada praktiknya tidak bisa mengganti pemerintahan, tetapi hanya memaksa pemerintah untuk lebih responsif. Pemilu Malaysia hanyalah casting suara dari ritual rutin empat atau lima tahun sekali untuk memperbarui sampul legitimasi

⁶ pemerintahan otoritari. Cara-cara UMNO memenangkan pemilu masih sama dengan cara hegemonik Golkar pada era Orde Baru di Indonesia.

Sistem kekuasaan legelatif di Malaysia dibagi antara legeslatur persekutuan dan legeslatur negeri. ⁸ Parlemen Bikameral sendiri terdiri dari Dewan Rendah, Dewan Rakyat-DPR dalam sistem di Indonesia, Dewan Tinggi Senat Dan Dewan Negara Sebanyak 222 anggota Dean selama 5 tahun. Sementara 70 senator akan memegang masa jabatan selama 2 tahun dimana 26 orang diantaranya dipilih oleh 13 majelis negeri bagian. Sementara kekuasaan eksekutifnya dilaksanakan oleh cabinet ⁶ yang dipimpin oleh seorang perdana menteri.

Dalam Konstitusi Malaysia ditetapkan bahwa perdana menteri Malaysia haruslah anggota Dewan Rakyat yang kepemimpinannya direstui oleh yang di Pertuan Agong dan mendapatkan mayoritas di parlemen. Sedangkan cabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang kemudian bertanggungjawab kepada badan tersebut.

Kepala Pemerintahan Malaysia.

Kepala pemerintahan (eksekutif) Malaysia adalah seorang Perdana Menteri yang secara tidak langsung dipilih. Perdana Menteri ditunjuk secara resmi oleh ²⁰ Yang di-Pertuan Agong, atau kepala negara. ²⁰ Perdana Menteri memimpin Kabinet dimana anggotanya ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong.

Perdana Menteri dan kabinetnya bertanggung jawab secara kolektif terhadap Parlemen. Kantor pusat Perdana Menteri adalah tempat di mana Perdana Menteri menjalankan fungsi dan wewenangnya.

Pemerintah Negara Bagian.

Pemerintah Negara bagian dipimpin oleh menteri besar di negeri-negeri Malaysia atau ketua Menteri di Negara bagian yang tidak memiliki monarki lokal, kemudian di tiap-tiap Negara bagian yang memiliki monarki lokal maka Menteri besar haruslah seorang suku Melayu Muslim berkuasaan politik di Malaysia amat penting untuk perjuangan suatu isu dan hak.

Oleh karena itu kekuasaan memainkan peranan yang amat penting dalam melakukan perubahan. Setiap pemerintah negara bagian di Malaysia diciptakan oleh konstitusi masing-masing. Setiap negara bagian memiliki legislatif unikameral (Melayu: Dewan Undangan Negeri) yang anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Utama, Menteri Besar, atau Ketua Menteri yang merupakan anggota dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri. Mereka menyarankan sultan atau gubernur masing-masing. Di masing-masing negara bagian dengan penguasa turun-temurun, Kepala Menteri diharuskan menjadi seorang Melayu yang ditunjuk oleh Sultan atas rekomendasi Perdana Menteri.

Pemerintahan Lokal di Malaysia.

Pemerintah daerah (Melayu: kerajaan tempatan atau pihak berkuasa tempatan) adalah tingkat terendah dalam sistem pemerintahan di Malaysia setelah federal dan negara bagian. Pemerintah daerah memiliki kekuatan untuk mengumpulkan pajak, menciptakan undang-undang dan peraturan, dan memberikan izin perdagangan di wilayah yurisdiksinya. Pemerintah daerah juga menyediakan fasilitas daerah, pengelolaan sampah, dan perencanaan wilayah yurisdiksinya. Pemerintah daerah di Malaysia umumnya berada di bawah pengawasan pemerintah negara bagian.

Batas-batasnya biasanya sesuai dengan batas kabupaten tetapi ada beberapa tempat yang memiliki batas tidak konsisten dan mungkin saling tumpang tindih, terutama di perkotaan. Berbeda dengan pemerintah federal dan negara bagian, pemerintah daerah di Malaysia tidak dipilih namun ditunjuk oleh pemerintah negara bagian setelah pemilihan dewan daerah dihentikan oleh pemerintah federal pada tahun 1965.

8

Sistem Hukum di Malaysia.

Hukum Malaysia terutama didasarkan pada sistem hukum common law. Hal tersebut akibat langsung dari penjajahan Malaya, Sarawak, dan Kalimantan bagian utara oleh Inggris antara awal abad ke-19 sampai 1960-an. Hukum tertinggi yakni Konstitusi Malaysia menetapkan kerangka hukum dan hak warga negara Malaysia. Undang-undang federal yang diberlakukan oleh Parlemen Malaysia berlaku di seluruh negeri. Ada juga undang-undang negara bagian yang disahkan oleh Sidang Legislatif Negara Bagian yang berlaku di negara bagian tertentu. Konstitusi

8

Malaysia juga menyediakan sistem peradilan ganda yang unik yakni hukum sekuler (hukum pidana dan perdata) dan hukum syariah.

Pasal 73 sampai 79 Konstitusi Federal menentukan pemerintah federal dan negara bagian dapat membuat undang-undang. Parlemen memiliki kewenangan eksklusif untuk membuat undang-undang mengenai hal-hal yang termasuk dalam Daftar Federal seperti kewarganegaraan, pertahanan, keamanan dalam negeri, hukum perdata dan pidana, keuangan, perdagangan, industri, pendidikan, tenaga kerja, dan pariwisata.

Sedangkan setiap negara bagian melalui dewan legislatif memiliki kekuasaan legislatif mengenai hal-hal di bawah Daftar Negara seperti tanah, pemerintah daerah, pengadilan Syariah, hari libur Negara Bagian, dan pekerjaan umum negara. Namun, di dalam Pasal 75 diatur bahwa jika terjadi konflik, undang-undang Federal akan berlaku di atas undang-undang negara bagian.³⁴

C. Bukti Pelaksanaan.

Sistem Pemilu Malaysia

Malaysia adalah demokrasi parlementer dan monarki konstitusional di mana raja memainkan sebagian besar peran seremonial, meskipun ia memiliki kekuasaan diskresi tertentu. Pemilihan umum diadakan setiap lima tahun kecuali perdana menteri meminta pemilihan awal.

³⁴ moniqui ginting, "(8) Sistem Pemerintahan Negara Malaysia | Monique Ginting - Academia.Edu."

Proses pemilihan adalah "first past the post", artinya partai atau koalisi yang memenangkan 112 dari 222 kursi di majelis rendah dapat membentuk pemerintahan. Dalam parlemen gantung, tanpa partai atau koalisi yang memenangkan mayoritas, blok saingan perlu membentuk aliansi baru untuk mengamankan kursi yang cukup

Komisi Pemilihan biasanya mengumumkan hasilnya pada hari pemilihan dan perdana menteri dilantik pada hari berikutnya. Tetapi mengingat persaingan yang ketat kali ini, tidak jelas seberapa cepat pemerintahan baru akan terbentuk.

Pemilih Dalam Pemilu Malaysia

Lebih dari 21 juta warga Malaysia berhak memilih dalam pemilihan ini, termasuk 6 juta pemilih baru. Sekitar 1,4 juta warga Malaysia berusia 18 hingga 20 tahun diperkirakan akan memilih untuk pertama kalinya setelah pemerintah menurunkan usia minimum menjadi 18 tahun dari 21 tahun lalu.

Jumlah pemilih Malaysia berfluktuasi. Dalam jajak pendapat terakhir tahun 2018, 82,3 persen dari pemilih yang memenuhi syarat memberikan suara mereka, salah satu yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Jumlah pemilih yang tinggi biasanya cenderung mendukung oposisi, sementara partisipasi yang lebih rendah mendukung petahana.

Partai Dalam Pemilu Malaysia

Tidak ada partai yang pernah membentuk pemerintahan sendiri, dan susunan multietnis masyarakat Malaysia memiliki pengaruh besar pada

komposisi koalisi. Ada tiga koalisi utama yang memperebutkan kekuasaan, tidak seperti pemilu sebelumnya yang hanya ada dua. Barisan Nasional petahana Ismail dipimpin oleh Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), sebuah partai nasionalis Melayu yang mengutamakan kepentingan mayoritas etnis Melayu.

Aliansi tersebut, yang mencakup partai-partai kecil yang mewakili minoritas etnis-China dan India, memerintah Malaysia selama enam dekade sebelum digulingkan oleh aliansi oposisi Pakatan Harapan dalam jajak pendapat 2018 karena tuduhan korupsi yang meluas. Tetapi UMNO kembali berkuasa pada tahun 2020 sebagai bagian dari aliansi lain setelah koalisi oposisi runtuh.

Koalisi utama kedua adalah Pakatan Harapan multietnis yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim, yang memenangkan pemilihan 2018 di bawah kepemimpinan mantan perdana menteri Mahathir Mohamad tetapi kehilangan kekuasaan dua tahun kemudian karena pertikaian. Mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin memimpin aliansi ketiga, yang mencakup partai nasionalis Melayu dan partai Islam yang mengembargemborkan hukum syariah.³⁵

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Malaysia Tentang Renjim Hukum Negara Nusantara Dan Hak-Hak Malaysia

³⁵ Tito Hilmawan Reditya, "Berbeda Dengan Indonesia, Begini Cara Kerja Dan Sistem Pemilu Di Malaysia Halaman All - Kompas.Com."

Di Laut Territorial Dan Perairan Nusantara Serta Ruang Udara Di Atas Laut Territorial, Perairan Nusantara Dan Wilayah Republik Indonesia Yang Terletak Di Antara Malaysia Timur Dan Malaysia Barat

Dalam rangka memantapkan kedudukan negara Republik Indonesia sebagai Negara Nusantara dan memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia khususnya dalam menjaga serta melaksanakan hubungan bertetangga baik, maka Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia pada tanggal 27 Juli 1976 telah menandatangani Memorandum Pengertian Bersama tentang Negara Nusantara.

Memorandum Pengertian Bersama tersebut intinya memuat kesepakatan antara kedua negara, yang mengandung ketentuan bahwa pihak Malaysia mengakui dan menyokong Regim Hukum Negara Nusantara dan sebagai imbalannya, pihak Indonesia mengakui hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia di laut territorial dan perairan nusantara Indonesia yang terletak di antara Malaysia Timur dan Malaysia Barat.

Disamping itu Memorandum Pengertian Bersama telah menetapkan pula agar Indonesia dan Malaysia mengadakan suatu Perjanjian yang memuat penjabaran lebih lanjut isi ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut dan hendaknya perjanjian termaksud sudah dapat selesai dan ditandatangani

sebelum Konvensi tentang Hukum Laut dihasilkan oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke III.

Ketentuan-ketentuan umum sebagaimana tercantum dalam Memorandum Pengertian Bersama tersebut pada hakekatnya adalah sesuai dengan perumusan pasal 47 ayat 7 Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan oleh Konperensi PBB tentang Hukum Laut ke III yang menentukan bahwa : "Apabila suatu bagian tertentu di perairan kepulauan suatu negara kepulauan terletak diantara dua bagian dari suatu negara tetangga dekat, maka hak-hak dan kepentingan-kepentingan sah yang dimiliki oleh negara tersebut belakangan dan yang telah dimilikinya secara tradisional dalam perairan demikian serta segala hak yang ditetapkan dalam suatu perjanjian antara negara-negara demikian harus tetap berlaku dan dihormati".

Sebagaimana dimaklumi, sebagian laut yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang sekarang termasuk kedaulatan teritorial Republik Indonesia berdasarkan Pengumuman Pemerintah mengenai wilayah Perairan Negara Republik Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957 yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Juanda dan yang selanjutnya telah dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, semula adalah laut bebas.

Yang dimaksudkan dengan hak-hak tradisional dan kepentingan-kepentingan yang sah Malaysia yang telah ada di wilayah laut tersebut

pada pokoknya meliputi hak akses dan komunikasi baik di laut maupun di udara bagi kapal-kapal dan pesawat Dengan adanya Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1982, Rejim Hukum Negara Nusantara telah mendapatkan pengakuan yang sah oleh Malaysia. Hal ini penting artinya di dalam situasi di mana Konvensi Hukum Laut yang baru belum ditandatangani dan mempunyai dampak baik di bidang politik maupun di bidang hukum internasional, terlebih lagi karena pengakuan secara hukum telah diberikan oleh suatu negara tetangga Indonesia dan yang letaknya terdekat di lingkungan ASEAN (Association of South East Asian Nations).

Sebagaimana diketahui dengan disahkan perjanjian ini dengan Undang-Undang, maka isi perjanjian tersebut menjadi bagian dari pada tata hukum/perundangundangan nasional dan untuk itu kiranya perlu diadakan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan dengan nasional Republik Indonesia sepanjang yang menyangkut pelaksanaan isi ketentuan perjanjian ini.

Dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat republik indonesia menetapkan Undang-undang no 1 tahun 1983,

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia tentang Rejim Hukum Negara Nusantara dan Hak-hak Malaysia di laut

Teritorial dan Perairan Nusantara serta Ruang Udara di atas Laut Teritorial, Perairan Nusantara dan Wilayah Republik Indonesia yang terletak diantara Malaysia Timur dan Malaysia Barat, yang salinan naskah aslinya dilampirkan pada Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³⁶

Normalisasi hubungan Indonesia-Malaysia

Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia setelah diumumkan Dwikora oleh Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964. Tindakan pemerintah Orde Lama ini jelas menyimpang dari pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif.

Normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia tersebut berhasil dicapai dengan ditandatangani Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966. Persetujuan normalisasi hubungan Indonesia–Malaysia merupakan hasil perundingan di Bangkok (29 Mei–1 Juni 1966). Perundingan dilakukan Wakil Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Malaysia, Tun Abdul Razak dan Menteri Utama/Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik.

³⁶ Dan Hak-Hak et al., 9 JU No 1 Th 1983 Ttg Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Malaysia Compiled by: 21 Yayasan Titian UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1983 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA TENTANG REJIM HUKUM NEGARA NUSANTARA P” (2001).

Perundingan telah menghasilkan persetujuan yang dikenal sebagai Persetujuan Bangkok.³⁷

Adapun persetujuan Bangkok mengandung tiga hal pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. Rakyat Sabah dan Serawak akan diberi kesempatan menegaskan lagi keputusan yang telah diambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.
- b. Kedua pemerintah menyetujui memulihkan hubungan diplomatik.
- c. Kedua pemerintah menghentikan segala bentuk permusuhan.

D. Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Negara Malaysia

Sebagai negara yang menggunakan sistem Monarki Konstitusional negara Malaysia memiliki keunikan tersendiri. Berikut adalah ciri-ciri dari sistem pemerintahan negara Malaysia. :

1. Kekuasaan Kepala negara terbatas. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan dalam urusan turut serta urusan pemerintahan.
2. Masa jabatan kepala negara seumur hidup, sehingga pergantian kepala negara dilakukan secara turun temurun. Hanya garis keturunan dari kerajaan yang dapat menjadi seorang kepala negara.
3. Masa jabatan kepala pemerintahan dalam jangka waktu tertentu (maksimal 2 periode). Kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

³⁷ S.Pd Okto Dellon Sunuraz Putra, "Orde Baru."

Seorang perdana menteri paling lama menjabat adalah dua periode berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

4. Perdana menteri memiliki hak prerogatif. Perdana menteri memiliki hak istimewa berdasarkan hukum yang berlaku.

5. Perdana menteri memiliki kekuasaan wilayah negara. Sebagai kepala pemerintahan perdana menteri memiliki kekuasaan atas wilayah negara.

6. Eksekutif bertanggung jawab terhadap legislatif. Artinya bahwa perdana menteri bersama kabinetnya bertanggung jawab kepada parlemen.

7. Keputusan kepala negara dapat diubah oleh legislatif. Artinya bahwa keputusan yang dibuat kepala negara bukan merupakan kekuasaan yang kuat karena hal tersebut masih dapat diubah oleh legislatif.

8. Pengusulan/pengubahan UUD/UU dilakukan oleh perdana menteri. Penyusunan perancangan undang-undang atau peraturan yang lainnya dilakukan oleh perdana menteri bukan kepala negara.

9. Pemilihan kepala negara diwariskan turun temurun menurut UU. Artinya bahwa tidak setiap orang dapat menjadi kepala negara, hanya yang memiliki keturunan kerajaan atau yang ditetapkan secara undang-undang yang dapat menjadi kepala negara.

10. Pemilihan kepala pemerintahan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Artinya bahwa pemilihan perdana menteri dapat dilakukan secara langsung dengan melibatkan masyarakat atau dapat pula dipilih secara tidak langsung.

Kelebihan Sistem Pemerintahan Malaysia

Setiap sistem pemerintahan tentu memiliki kelebihan. Kelebihan tersebut yang biasanya menjadi pertimbangan bagi suatu negara. Berikut adalah kelebihan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional

1. Raja memegang kekuasaan tertinggi
2. Pengambilan kebijakan tidak berbelit belit
3. Rakyat tunduk pada kata Raja
4. Raja berkuasa membentuk Aturan
5. Hubungan Luar Negeri ditentukan oleh Raja

Kekurangan Sistem Pemerintahan Malaysia

Selain kekurangan tentu setiap sistem pemerinthan akan memiliki kekurang yang perlu diperhatikan bagi negara yang menerapkannya. Bisa jadi kekurangan tersebut malah akan menimbulkan konflik yang besar. Berikut adalah kekurangan sistem pemerintahan Monarki Konstitusional.³⁸ :

1. Rakyat hanya memiliki kekuasaan yang sangat terbatas
2. Kebebasan rakyat dibatasi
3. Kemakmuran rakyat bergantung pada kebijakan Raja
4. Raja bisa saja bertindak sewenang-wenang
5. Hak asasi rakyat terbelenggu

³⁸ Abdul Rozak S.Pd, "Penjelasan Sistem Pemerintahan Malaysia, Ciri, Kelebihan, Dan Kekurangannya – DosenPPKN.Com," last modified 2022, accessed November 26, 2022, <https://dosenppkn.com/sistem-pemerintahan-malaysia/>.

BAB IV

BENTUK PEMERINTAHAN THAILAND

A. Sejarah Negara Thailand

Negara Thai yang disebut dengan *Thailand* dalam bahasa aslinya merupakan Mueang Thai yang artinya Negara Thai adalah suatu Negara di Asia Tenggara yang bertepatan batasnya dengan Negara Laos dan Negara Kamboja dibagian timur, Negara Malaysia dan Negara Teluk Siam dibagian selatan, serta Negara Myanmar dan Laut Andaman dibagian barat.

Asal mula Kerajaan Thai secara tradisional berhubungan dengan suatu kerajaan yang berusia pendek, Kerajaan Sukhothai dibangun pada tahun 1238. Kerajaan ini setelah itu diteruskan Kerajaan Ayutthaya dibangun pada menengah masa waktu seratus tahun ke- 14 serta berdimensi terus menjadi besar dibanding Sukhothai. Kebudayaan Kerajaan Thai dipengaruhi dengan kokoh oleh Cina serta India. Ikatan dengan sebagian negeri besar Eropa diawali pada masa waktu seratus tahun ke- 16 tetapi walaupun merasakan tekanan yang kokoh, Kerajaan Thai senantiasa bertahan selaku salah satunya negeri di Asia Tenggara yang tidak sempat dijajah oleh negeri Eropa, walaupun pengaruh Barat, tercantum ancaman kekerasan, menyebabkan bermacam pergantian pada masa waktu seratus tahun ke- 19 serta diberikannya banyak kelapangan buat pedagang- pedagang Britania³⁹.

³⁹ ahmad Rusdi, "Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand," last modified 2020, accessed December 2, 2022, <https://kemlu.go.id/download/L1B1Ymxc2hpbmdJbWFnZXMvTWVpJTlwMjAyMC9TVVJBVCUyMEVEQVJBtiUyMGRhbiUyMEtyaXRlcmlhJTlwUGVtYmFOYXNhbi9CdWt1JTlwU2VsYXlhbmclMjBQYW5kYW5nLnBkZg==>.

Pada 1238, orang Thailand menyatakan diri merdeka setelah menantang kekuasaan Khmer. Sri Indraditya (memerintah 1238-1270) mendirikan negara Thailand pertama, yang oleh orang Thailand disebut Sukhothai.

Rama Khamheng (1239-1298) adalah raja Thailand yang paling terkenal, pemerintahannya dianggap sebagai masa keemasan dalam sejarah Kerajaan. Pada pertengahan abad keempat belas, kekuatan politik Thailand bergeser dari Cekungan Chao Praya lebih jauh ke selatan ke Ayudhya dengan berdirinya kerajaan baru di Thailand tengah. Dalam kurun waktu 20 tahun, Kerajaan memperluas wilayahnya hingga mencakup seluruh Chao Praya, bagian dari negara Mon di barat, dan Semenanjung Malaya di selatan. Ibu kota Khmer, Angkor, direbut oleh raja Ayudhya Borommaracha II (1424-1418) pada tahun 1431, mengakibatkan masuknya birokrasi, pengrajin, dan Brahmana (kelas pendeta Hindu) Khmer ke Ayudhya. Paruh kedua abad keenam belas terkenal karena perang yang menghancurkan dengan Myanmar. Selama paruh kedua abad kedelapan belas, kemunduran Kerajaan disertai dengan penjarahan kota Ayudhya yang berusia 400 tahun yang indah. Kota itu tidak segera dibangun kembali setelah pengusiran orang Burma. Dalam beberapa dekade, ibukota Thailand didirikan di Bangkok. Periode baru dalam sejarah Thailand yang dikenal sebagai periode Bangkok dimulai dengan pembentukan dinasti baru pada tahun 1782, Chakri, yang memerintah hingga saat ini.

Selama abad kesembilan belas, Thailand tetap bebas dari dominasi kolonial karena kebijakan modernisasi, diplomasi cerdas para pemimpinnya, dan letak geografis negara. Raja Thailand seperti Rama V dan Chulalongkorn

memberikan konsesi teritorial kepada Inggris dan Prancis; namun, kekuatan kolonial hanya bekerja sama untuk menjaga Thailand sebagai zona penyangga. Thailand tetap sebagai negara merdeka, menjaga nilai-nilai agama dan budayanya tetap utuh.

Setelah Perang Dunia Pertama, ia bergabung dengan Liga Bangsa-Bangsa. Para penguasa mengikuti kebijakan luar negeri yang paling cocok untuk kemerdekaan negara itu. Tekanan politik internal, perubahan struktur kelas dan kesadaran politik, dan depresi di seluruh dunia menyebabkan revolusi tahun 1932, setelah monarki konstitusional didirikan. Perjuangan antara kekuatan demokrasi dan militer menjadi ciri umum politik Thailand setelah revolusi.⁴⁰

Empat Kerajaan Thailand

Thailand telah mengalami segudang perubahan dan terkena banyak pengaruh sepanjang sejarahnya. Keberadaan sejumlah kerajaan Thailand yang terpisah, berbeda, dan sering kali hidup berdampingan sebagian besar bertanggung jawab atas pembentukan multifaset Thailand yang kita kenal sekarang.

⁴⁰ P P Mishra, *The History of Thailand*, Greenwood histories of the modern nations (Greenwood, 2010),

1. Sukhothai



Sukhothai, Thailand

Kerajaan Sukhothai Thailand 1238-1448 dianggap sebagai Zaman Keemasan Thailand. Sebagai negara Thailand merdeka pertama, ikuti Menjelang kemunduran kerajaan Khmer pada awal abad ke-13, hal ini juga dipercaya sebagai awal dari sejarah Thailand modern.

Kerajaan Sukhothai adalah tempat yang makmur dan berlimpah bagi negara dan rakyatnya, di mana 'sungai penuh dengan ikan dan ladang beras. Itu juga merupakan waktu yang relatif damai, dengan hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga. Selama periode Sukhothai, diyakini bahwa raja akan menyimpan lonceng di luar istana mereka. Jika ada subjek yang memiliki keluhan, dia akan membunyikan neraka dan raja akan datang ke gerbang dan memberikan keadilan yang sesuai.

Gaya kepemimpinan ini kemudian dikenal sebagai ayah mengatur anak-anak dan masih relevan hingga saat ini, tidak hanya di istana tetapi juga di hierarki perusahaan dan organisasi Thailand.

Meskipun keasliannya dipertanyakan, abjad Thailand diciptakan oleh Raja Ramkhamhaeng selama periode ini, dibuktikan dengan ditemukannya prasasti bertulis Ramkhamhaeng Stele. Dalam naskahnya, raja berbicara tentang gaya kepemimpinannya yang baik hati. 'Kekuasaan paternal' Raja Ramkhamhaeng dan budaya serta tradisi Sukhothai kemudian menjadi semakin penting selama revolusi pro-demokrasi tahun 1932, ketika para sarjana berpendapat bahwa itu adalah "Zaman Keemasan Thailand" yang, pada kenyataannya, telah melahirkan apa yang kemudian menjadi gaya demokrasi Thailand yang khas.⁴¹

⁴¹ J Houton, : *Discovering the Land of Golden Buddhas, Pad Thai and Kickboxing* (Tuttle Publishing, 2016),

2. Ayutthaya



Kerajaan Ayutthaya, Thailand

Kerajaan Ayutthaya (1350-1767) mungkin merupakan kerajaan Thailand kuno yang paling terkenal karena ibukotanya masih megah dengan bangunan dan artefak bersejarah. Periode sejarah Thailand ini menyaksikan pertumbuhan ekonomi yang sangat besar serta terjalannya hubungan dengan pedagang asing, khususnya Portugis. Dengan kekuatan besar datanglah perubahan besar dan selama periode Ayutthaya masyarakat Thailand menjadi sangat hierarkis, dengan mayoritas besar orang Thailand bekerja sebagai budak atau budak untuk pemilik tanah, bangsawan dan pejabat. Berbeda dengan pemerintahan paternalistik pada periode Sukhothai, raja-raja Ayutthaya memiliki kekuasaan absolut dan dianggap sebagai titisan dewa.

Periode Ayutthaya merupakan bagian integral dalam mengembangkan seni Thailand di mana semua anggota masyarakat, dari pejabat istana hingga pengrajin dan cendekiawan Buddhis bergabung bersama untuk membuat dan menghiasi kuil dan istana di daerah tersebut.

Tetapi periode dalam sejarah Thailand ini juga penuh dengan perang dan pertempuran dengan Burma, yang menyebabkan penjarahan terakhir kota itu pada tahun 1767 dan selanjutnya penghancuran sejumlah besar catatan, istana, dan kuil. Meskipun demikian, untuk waktu yang lama selama masa pemerintahan Ayutthaya, kerajaan tersebut sebagian besar dianggap sebagai kekuatan terkuat didarat Asia Tenggara.

3. Lanna



Kerajaan Lanna, Thailand

Lanna Sama seperti kerajaan Sukhothai, kerajaan Lanna, yang memerintah dari abad ke-13 hingga ke-15 di Thailand utara, memiliki pengaruh dom yang luar biasa pada masyarakat dan budaya Thailand sekarang dan masih dianggap nostalgia. Kerajaan Lanna hidup berdampingan selama kerajaan Sukhothai dan Ayutthaya, dan pada puncaknya kekuatan dan pengaruhnya dikatakan telah menyaingi Ayutthaya yang berulang kali berperang dan berselisih dengannya. Selama periode inilah budaya dan tradisi Lanna dari apa yang secara luas

dianggap sebagai ibu kota budaya utama Thailand, Chiang Mai, dikembangkan dan tertanam kuat dalam budaya itu. Lanna arsitektur, wooderat dan batu yang dapat diidentifikasi dan dihormati hari ini Kerajaan akhirnya jatuh ke Barmer 1558 uk dicap sebagai negara bagian Aussal atau bagian terakhir dari abad ke- 18.

4. Thonburi Dan Rattanakosin



Thonburi & Rattanakosin, Thailand

Thonburi dan Rattanakosin King Taksin the Great of Thonburi berhasil menyatukan kembali negara itu pada tahun berikutnya, yang melahirkan kerajaan pemerintahan terpendek di Thailand, usia singkat kerajaan Thonburi (1768-82). Ibu kota Siam dipindahkan ke Thonburi dan terletak di seberang Sungai Chao Phraya tempat Bangkok sekarang berdiri. Akibat berbagai masalah politik internal, Raja Taksin dilaporkan menyerah pada tekanan dan kemudian ditahbiskan sebagai biksu, menghilang dari pandangan. Karena posisinya yang lebih menguntungkan, Bangkok

kemudian dipilih sebagai ibu kota baru, dan pada tahun 1782 Raja Buddha Yodfa Chulaloke (Rama I mengambil alih dan menjadi raja rumah penguasa troval Chakri pertama) di kerajaan Rattanakosin—dinasti yang saat ini meliputi Thailand⁴²

Kondisi geografis dan wilayah

Thailand terletak di jantung daratan Asia Tenggara, memanjang seperti belalai gajah ke selatan antara Laut Andaman dan Teluk Thailand. Di siniberbatasan dengan Malaysia, sedangkan di sebelah barat dan utara terletak Myanmar, atau Burma. Laos merupakan perbatasan utara dan timur Thailand, dan di tenggara adalah Kamboja. Dengan luas total 198.115 mil persegi (513.115 kilometer persegi), ini sedikit lebih kecil dari negara bagian Texas; dantentang ukuran yang sama seperti Perancis. Dari utara ke selatan, Thailand berukuran hampir 1.550 mil (2.500 kilometer), dan dari timur ke barat mencakup 775 mil (1.250 kilometer). Garis pantainya di Teluk membentang 1.140 mil (1.840 kilometer), sedangkan di Laut Andaman jaraknya hampir 540 mil (870 kilometer).

Ada empat wilayah alami utama di negara ini; Utara, Dataran Tengah atau cekungan Sungai Chao Phraya, Timur Laut atau Dataran Tinggi Korat, dan Selatan atau Semenanjung Thailand. Utara didominasi pegunungan, dan ditutupioleh hutan, pegunungan, dan lembah.

⁴² Mishra, *The History of Thailand*.

Dataran Tengah pada dasarnya membentuk satu lembah besar yang sangat subur, yang berfungsi sebagai wilayah pertanian utama negara itu. Timur Laut sebagian besar merupakan daerah berbukit dengan iklim panas dan kering yang rentan terhadap kekeringan, secara siklis bercampur dengan hujan deras dan banjir. Selatan juga memiliki perbukitan dan pegunungan, di tengah hutan hujan dan garis pantai yang panjang⁴³.

⁴³ A Kislenko, *Culture and Customs of Thailand*, Culture and customs of Asia (Greenwood Press, 2004), <https://books.google.co.id/books?id=VW904h09qE8C>.

B. Bentuk Pemerintahan Negara Thailand Poitik Negara Thailand

⁷ Thailand juga menggunakan politik multipartai. Pada pemilu tahun 2005, Partai Thai Rak Thai nyatanya memperoleh 377 kursi dari kuota 500 kursi yang diperebutkan di Majelis Rendah. Keadaan inilah yang setelah itu memecahkan rekor selaku pemerintahan satu partai untuk yang awal kalinya dalam sejarah Raja Thailand. Walaupun demikian, Thailand adalah salah satu negara yang menganut trias politik dimana ada pembagian wewenang yang sangat jelas antara lembaga eksekutif, yudikatif serta legislatif.

Ada pula penerapan fungsi eksekutifnya lewat sistem kabinet, fungsi legislatif lewat sistem parlemen, sebaliknya fungsi yudikatifnya lewat peradilan. Wujud pemerintahan negeri Thailand yang berbentuk monarki konstitusional ini mempunyai majelis hukum independen yang berasal dari eksekutif serta legislatif.⁴⁴

Eksekutif

Raja merangkap selaku kepala angkatan bersenjata dan penegak agama. Contoh kekuasaan eksekutif Raja yaitu dengan melaksanakan kekuasaan lewat sistem kabinet dan berhak untuk menduduki serta memperingatkan

⁷
⁴⁴ Aulia, "Bentuk Pemerintahan Parlemen Dan Politik Di Negara Thailand - GuruPPKN.Com," last modified 2019, accessed December 2, 2022, <https://gurupkn.com/bentuk-pemerintahan-negara-thailand>.

pemerintah, bila terjadi suatu penyimpangan. Lembaga eksekutif dipandu langsung oleh perdana Menteri dengan sokongan dari 35 anggotanya. Sebaliknya kabinet mempunyai tanggung jawab atas administrasi dari 14 Departemen berarti. Di sisi lain, kantor dari perdana Menteri memiliki tugas buat melakukan roda pemerintahan yang mengatasnamakan Raja. Perihal inilah yang setelah itu jadi alibi kenapa Perdana Menteri ditunjuk serta dinaikan langsung oleh Raja.⁴⁵

Legislatif

Lembaga legislatif di Thailan sering disebut dengan Majelis Nasional. Anggota dari Majelis Nasional terdiri atas Senat serta House of Representatives. Pimpinan dari House of Representatives yaitu pimpinan dari Majelis Nasional serta wakilnya ialah pimpinan dari Senat. Keduanya berkolaborasi dalam melaksanakan pemerintahan negara.

Yudikatif

Anggota dari lembaga yudikatif terdiri dari majelis hukum banding, Mahkamah Agung, majelis hukum hakim, majelis hukum first instance serta majelis hukum buruh serta anak. Tugas lembaga yudikatif di Thailand sama semacam di negara lain ialah selaku majelis hukum negara dalam menuntaskan bermacam tindak masalah pidana⁴⁶

⁴⁵ Manjakan, "Sistem Pemerintahan Thailand : Beserta Struktur, Tugas Dan Fungsinya," last modified 2022, accessed December 2, 2022, <https://manjakan.com/sistem-pemerintahan-thailand/#!>

⁴⁶ Aulia, "Bentuk Pemerintahan Parlemen Dan Politik Di Negara Thailand - GuruPPKN.Com."

C. Bukti Pelaksanaan

1. Pergantian Wujud Pemerintahan⁷

Dahulunya Thailand menganut sistem monarki mutlak, tetapi konstitusi tersebut sudah dihapuskan semenjak 10 Desember 1932 serta disebut dengan hari revolusi konstitusi Thailand. Ada pula wujud pemerintahan negara Thailand yang saat ini berbentuk monarki konstitusional. Semasa pemerintahan tahun 1932- 2006, Thailand paling tidak mempunyai kurang lebih 16 berbagai konstitusi serta sempat hadapi 20 kali kudeta militer. Tetapi, pada monarki Thailand tidak mengintervensi terhadap keputusan yang dicoba oleh pemerintah tiap harinya. Ada pula identitas negara monarki serta republik yang dianut oleh Thailand merupakan Raja yang berperan selaku kepala negara serta diturunkan ke pilihannya sebaliknya Perdana Menteri ialah kepala pemerintahan⁴⁷.

2. Kekuasaan Raja dan Perdana Menteri

Uraian mengenai sistem pemerintahan Thailand berikutnya ialah mengenai kekuasaan Raja serta Perdana Menteri. Secara universal, Raja hanya mempunyai sedikit kekuasaan langsung yang terletak dibawah batas dari tujuan konstitusi. Namun, juga mempunyai kekuasaan selaku pelindung Buddhisme Kerajaan Thai dan selaku lambang jati diri juga persatuan bangsa. Raja di Thailand sangat dihormati oleh segala golongan warga.

⁴⁷ a fauzi, "[Rangkuman] Materi Lengkap: Bentuk Pemerintahan Thailand!," last modified 2020, accessed December 2, 2022, <https://cerdika.com/bentuk-pemerintahan-thailand/>.

Mereka menyangka raja selaku seseorang pemimpin dari segi moral serta yang lain. Keadaan ini kerap dimanfaatkan untuk bermacam peluang ketika menuntaskan permasalahan soal ⁷ krisis politik.

Di lain sisi, perdana Menteri yang bertugas selaku kepala pemerintahan hendak dilantik oleh seseorang raja. Umumnya seseorang perdana Menteri akan diseleksi ⁷ dari anggota parlemen yang telah terdapat. Sebaliknya buat bentuk- bentuk negeri dengan istilah gajah putih ini awal mulanya merupakan kesatuan. Kesatuan negara Thailand dibagi menjadi 77 provinsi, dimana dari tiap-tiap provinsi nantinya hendak dipandu oleh seseorang gubernur. Para Gubernur ini nantinya akan dinaikan oleh Mendagri, kecuali Gubernur yang menduduki ibukota akan hadapi pemilihan langsung yang dilalukan oleh rakyat⁴⁸

3. Sistem Parlemen

Perihal yang diresmikan pada Parlemen Thailand merupakan bikameral seperti mayoritas negeri yang menganut wujud pemerintahan yang lain. Di Thailand Sendiri Bikameral dapat dikatakan dengan sebutan ⁷ Sapha Phuthaen Ratsadon ataupun dalam bahasa Inggris yaitu House of Representatives. Dimana ialah bagian dari pemerinatahn Thailand yang biasa disebut Rathasapha.

⁴⁸ Manjakan, ³ "Sistem Pemerintahan Thailand : Beserta Struktur, Tugas Dan Fungsinya."

Di Thailand sendiri merupakan salah satu negara yang memakai sistem 2 kamar. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Majelis Nasional yang mempunyai anggota dewan sebanyak 500 orang serta Senat dengan jumlah yang menggapai 200 anggota. Anggota dewan yang mempunyai 500 anggota ini berprofesi sepanjang 4 tahun.

Ratsadon memilah 100 orang yang mempunyai sistem sepadan serta bermacam- macam bagi mereka. Sebaliknya 400 yang lain diseleksi bersumber pada kebanyakan yang pula berasal dari partai politik. Wujud pemerintahannya sendiri mempunyai guna parlemen yang mengutamakan **7** bidang persetujuan RUU. Pemilihan perdana Menteri di Thailand berasal dari anggota parlemen, serta pemberhentian menteri⁴⁹.

D. Kekurangan dan Kelebihan Pemerintahan Negara Thailand .

Kekurangan Sistem Pemerintahan Thailand

Dibalik kesuksesan dalam melaksanakan sistem pemerintahannya, nyatanya sistem pemerintahan Thailand pula mempunyai kekurangan yang bisa jadi dapat lebih dicermati lagi. Kekurangan tersebut adalah Peran dari tubuh eksekutif ataupun kabinet sepenuhnya sangat tergantung pada kebanyakan sokongan parlemen.

⁴⁹ fauzi, “[Rangkuman] Materi Lengkap: Bentuk Pemerintahan Thailand!”

Sehingga perihal ini dapat menimbulkan kabinet dapat dijatuhkan oleh parlementer sewaktu- waktu Kelangsungan serta peran dari tubuh eksekutif ataupun kabinet tidak dapat didetetapkan. Perihal ini sebab sewaktu-waktu pula peran tersebut pula dapat dijatuhkan oleh parlementer. Cabinet dapat sewaktu-waktu mengandalkan parlemen. Perihal ini dapat terjalin kala para anggota parlemen berasal dari partai kebanyakan.

Akibat dari pengaruh mereka yang besar di parlemen serta partai, hingga anggota kabinet juga secara tidak langsung dapat memahami parlemen. Parlemen dijadikan selaku tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka di bidang anggota parlemen hendak dimanfaatkan serta jadi bekal yang lumayan berarti biar jadi Menteri ataupun berprofesi di bidang eksekutif yang lain⁵⁰.

⁵⁰ Manjakan, "Sistem Pemerintahan Thailand : Beserta Struktur, Tugas Dan Fungsinya."

Kelebihan Sistem Pemerintahan Thailand

Kekurangan serta kelebihan hendak senantiasa berjalan beriringan. Bila ulasan lebih dahulu menimpa kekurangan sistem tersebut, kali ini sebagian kelebihan yang dipunyai sistem ini antara lain:

- a. Pembuatan suatu kebijakan hendak ditangani secara lebih kilat dari pada yang lain. Perihal ini didukung dengan betapa mudahnya penyesuaian yang didapat antara kekuasaan eksekutif serta pula kekuasaan legislatif.
- b. Dengan menganut sistem pemerintahan semacam yang saat ini ini, garis tanggung jawab dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan public hendak nampak lebih jelas.
- c. Terdapatnya pengawasan yang kokoh dari suatu parlemen terhadap kabinet, sehingga cabinet wajib jadi sangat hati- hati ketika.

BAB V

BENTUK PEMERINTAHAN BRUNEI DARUSSALAM

A. Sejarah Negara

Negara yang memiliki wilayah kecil bukan berarti negara yang tidak berpengaruh. Banyak negara di dunia yang memiliki wilayah kecil namun pengaruhnya besar. Salah satu yang menjadikannya besar adalah karena keadaannya yang makmur dan juga sejahtera. Kekayaan dan keamanan dalam mengatur rakyat menjadi poin penting bagi suatu negara kaitannya kedudukan dengan negara lain. Salah satu negara kecil yang makmur dan berpengaruh di wilayah Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki wilayah kecil, namun memiliki kemakmuran yang sangat terkenal. Rakyat Brunei bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunei sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik. Yang terkenal dari sistem pemerintahan Brunei adalah dipimpin oleh seorang Sultan yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, di Brunei ini sangat dikenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Brunei darussalam, merupakan salah satu negara kecil berdaulat yang terletak di utara Pulau Kalimantan dan memiliki luas wilayah sekitar 5.765 km².

Berbatasan dan dipisahkan oleh Malaysia, wilayah Brunei terbagi atas dua bagian dengan 97% penduduknya berada di wilayah bagian Barat yang lebih besar. Sejarah kesultanan Brunei berusia 600 tahun dan saat ini menjadi dinasti Muslim tertua di wilayah tersebut.

Brunei Darussalam berhasil memperoleh kemerdekaan dari pihak Britania Raya secara resmi pada tanggal 1 Januari 1984. Proses panjang yang telah dilalui oleh kesultanan Brunei Darussalam dalam memperoleh kemerdekaan atau lepas dari kekuasaan Britania Raya salah satunya yaitu melalui penandatanganan perjanjian kerjasama dan persahabatan, tepatnya dilakukan pada tanggal 4 Januari 1979.⁵¹

Sejarah Brunei Awal Sebelum Islam

Keberadaan Brunei sudah ada sejak abad ke-6 dan menjadi kerajaan tertua di antara kerajaan-kerajaan tanah Melayu. Pada masa itu daerah Brunei menjadi salah satu pelabuhan persinggahan dan pusat perdagangan dari Cina, Arab dan India. Dalam beberapa catatan sejarah, Cina menyebutkan daerah Brunei dengan beberapa istilah yaitu Po-li, Po-lo, Poni atau Puni dan Bunlai. Sementara dalam catatan Arab, Brunei lebih dikenal dengan Dzabaj atau Randj. Penyebutan nama-nama tersebut dapat dikatakan sebagai masa Kerajaan Brunei Tua.

Selama masa pemerintahan Dinasti Liang (502-566 Masehi) disebutkan suatu daerah bernama Po-li yang berada di sebelah tenggara Canton (Hongkong saat ini), berjarak sekitar 60 hari pelayaran dan membawahi 136 wilayah. Dalam buku Chiu Tang Su juga disebutkan bahwa pada tahun 630 M, Po-li telah mengirim

⁵¹ https://roboguru.ruangguru.com/forum/negara-yang-memiliki-presiden-sulta_FRM-C5Y57FZB

utusan ke Cina. Nama Po-li diganti dengan Po-lo selama pemerintahan Dinasti Tang (618-906 M). Pada masa itu sekitar tahun 669 M, raja Po-lo bersama Huan-wang (Siam) telah mengirimkan utusan ke Cina pada tahun 642, 669, dan 711 M.

Memasuki abad-10 pada masa Dinasti Sung (960-1279 M), tercatat nama baru untuk wilayah Brunei dengan sebutan Pu-ni. Menurut Charington, Po-ni atau Pu-ni adalah nama yang sama untuk menyebut Po-lo, seperti yang ter kutip dalam buku Hsin Tang Shu, "... setelah lenyapnya keberadaan Po-lo, nama Pu-ni disebut pertama kali dalam catatan sejarah Tiongkok Sung Shih."

Orang Pu-ni melakukan perdagangan dengan menukarkan tikar, emas, tembikar, porselen, barang perak, kain sutra, kain kasa dan kiap. Dan barang-barang yang diperoleh dari Cina berupa kapur barus, tanduk rusa, timah, gelang dari gading gajah, kulit kura-kura, sarang burung, wangi-wangian, kayu cendana dan rempah-rempah. Tercatat juga saat Brunei masih menjadi wilayah kekuasaan Majapahit, Raja Brunei memberikan kapur barus dan air pinang muda setiap tahun sebagai upeti.

Saat Dinasti Sung digantikan oleh Dinasti Ming yang berkuasa pada tahun 1368-1643 M, nama Pu-ni digantikan dengan Brunei. Penyebutan tersebut diperkirakan karena pengaruh perpindahan Kerajaan Brunei Tua ke Kota Batu yang terjadi sebelum tahun 1397 M.

Selain tercatat dalam sejarah Cina, nama Brunei juga tercantum dalam Kitab Negarakertagama karya Mpu Prapanca pada tahun 1365 M, dimana Brunei

pernah menjadi menjadi salah satu wilayah taklukan Majapahit bersama dengan Sedu (Serawak), Saludung (Manila), Solot (Sulu), Trangganu, Johor, Tumasik (Singapura), dan lain-lain. Pada tahun 1362 M, Awang Alak Betatar naik takhta dan saat Patih Gajah Mada mangkat pada tahun 1364 M, Kerajaan Brunei Tua memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari Majapahit, dan memproklamkan diri sebagai kerajaan merdeka pada tahun 1365 M.

Terdapat juga catatan lisan tradisi yang diperoleh dari Syair Awang Semaun yang menyebutkan Brunei berasal dari kata *baru nah*. Sebutan itu muncul setelah sekelompok klan / suku Sakai yang dipimpin Pateh Berbai pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negara baru. Setelah mendapatkan wilayah yang strategis diapit oleh bukit, air, serta jalur transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan, mereka mengucapkan *baru nah* yang berarti tempat itu sangat baik dan sesuai dengan keinginan mereka.⁵²

Brunei Baru dan Perkembangan Islam

Seperti sejarah kerajaan tua lainnya, budaya Brunei dimulai dari agama Hindu-Buddha dengan ditemukannya replika stupa saat pertama kali kerajaan itu didirikan. Perkembangan Islam sendiri tidak lepas dari pengaruh para musafir dan pedagang Arab sejak tahun 977 M.

Pemerintahan Islam pertama di Brunei dimulai saat dipimpin oleh Raja Puni Mahamosha (Muhammad Shah) pada tahun 1363 M. Ketika kerajaan Brunei Tua merdeka, Raja Awang Alak Betatar menjalin kerja sama dengan seorang putri

⁵² <https://www.gurusiana.id/read/widiantari/article/brunei-darussalam-510636>

Kesultanan Johor. Melalui perkawinan tersebut Raja Awang Alak Betatar akhirnya memeluk Islam dan mendapatkan gelar dari Sultan Johor, yaitu Sultan Muhammad Shah. Saat itulah pertama kalinya Islam diterapkan sebagai agama negara.

Sultan Muhammad Shah memerintah Brunei sampai tahun 1402 M. Dalam catatan sejarah disebutkan Sultan Muhammad Shah hanya memiliki satu orang putri bernama Putri Ratna Dewi. Tetapi dalam catatan sejarah Cina, Muhammad Shah memiliki satu orang putra bernama Sultan Abdul Majid Hasan yang ditulis Ma-na-je-ka-na. Sayangnya Sultan Abdul Majid Hasan tidak termasuk dalam silsilah Raja-Raja Brunei karena beliau mangkat pada tahun 1408 M saat perjalanan kunjungan ke Nanking, dan dimakamkan di Cina dengan tulisan pada makamnya berbunyi “Makam Raja Pu-ni”.

Penyebaran Islam dimulai pada abad ke-13 dan mengalami perkembangan pesat saat Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ke-3 tahun 1425. Dengan silsilah kerajaan tercatat pada Batu Tarsilah yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja pertama yang memeluk Islam tahun 1368 sampai Sultan Muhammad Tajudin 1795-1804 dan 1804-1807.

Berrikut merupakan list nama raja raja yang telah memerintah di Brunei Darussalam⁵³

⁵³ https://p2k.utn.ac.id/en6/1-3069-2966/Brunei-Darussalam_12455_p2k-utn.html

Raja-raja Brunei Darusalam yang memerintah sejak didirikannya kerajaan pada tahun 1363 M yakni:

1. ³ Sultan Muhammad Shah (1383 – 1402)
2. Sultan Ahmad (1408 – 1425)
3. Sultan Syarif Ali (1425 – 1432)
4. Sultan Sulaiman (1432 – 1485)
5. Sultan Bolkiah (1485 – 1524)
6. Sultan Abdul Kahar (1524 – 1530)
7. Sultan Saiful Rizal (1533 – 1581)
8. Sultan Shah Brunei (1581 – 1582)
9. Sultan Muhammad Hasan (1582 – 1598)
10. Sultan Abdul Jalilul Akbar (1598 – 1659)
11. Sultan Abdul Jalilul Jabbar (1659 – 1660)
12. Sultan Haji Muhammad Ali (1660 – 1661)
13. Sultan Abdul Hakkul Mubin (1661 – 1673)
14. Sultan Muhyidin (1673 – 1690)
15. Sultan Nasrudin (1690 – 1710)
16. Sultan Husin Kamaluddin (1710 – 1730) (1737 – 1740)
17. Sultan Muhammad Allauludin (1730 – 1737)
18. Sultan Omar Ali Saifuddin I (1740-1795)
19. Sultan Muhammad Tajuddin (1795-1804) (1804-1807)

20. Sultan Muhammad Jamalul Alam I (1804)
21. Sultan Muhammad Kanzul Alam (1807-1826)
22. Sultan Muhammad Alam (1826-1828)
23. Sultan Omar Ali Saifuddin II (1828-1852)
24. Sultan Abdul Momin (1852-1885)
25. Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin (1885-1906)
26. Sultan Muhammad Jamalul Alam II (1906-1924)
27. Sultan Ahmad Tajuddin (1924-1950)
28. Sultan Omar 'Ali Saifuddien III (1950-1967)
29. Sultan Haji Hassanah Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah (1967-kini)

Melalui silsilah Sultan Brunei ke-3 juga dapat dirunut bahawa Sultan Sharif Ali merupakan keturunan Sayidina Hasan, cucu Rasulullah SAW. Masa pemerintahan Sultan Sharif Ali dikenal juga sebagai masa penguatan fondasi Islam di Kesultanan Brunei sejak masa pemerintahan Sultan Muhammad Shah. Sultan Sharif Ali menyusun pemerintahan berdasarkan agama Islam, mendirikan masjid, meluruskan arah kiblat, dan membuat aturan yang melarang rakyat Brunei untuk tidak mengkonsumsi daging babi. Jika dilanggar akan dikenakan hukuman mati. Karena itulah Islam mengalami perkembangan pesat dan saat itu Brunei juga dapat disebut sebagai pusat perkembangan Islam di wilayah Laut Cina Selatan.

Sejarah Pemerintahan

Kerajaan Brunei Kuno bertempat di Muara Sungai Brunei, meliputi wilayah yang cukup luas Sabah, Brunei dan Sarawak. Setelah melepaskan diri dari pengaruh Majapahit, Brunei menjadi negara merdeka dan pusat perdagangan di wilayah Laut Cina Selatan dengan menjalin hubungan perdagangan dengan Cina. Kata 'Darussalam' dalam bahasa Arab yang berarti 'tempat yang damai' ditambahkan sebagai nama negara oleh Syarif Ali untuk menegaskan Islam sebagai agama negara serta membantu penyebaran Islam ke seluruh wilayah.

Awal abad 15, Kerajaan Malaka dibawah pemerintahan Pameswara menyebarkan pengaruhnya dan mengambil alih perdagangan Brunei, yang menyebabkan berkembangnya penyebaran agama Islam. Masa kegemilangan Brunei dimulai saat kejatuhan Malaka dari Portugis tahun 1511 dengan pengambil alihan kekuasaan oleh Sultan. Selama masa pemerintahan Sultan Bolkiah tahun 1473-1521, Brunei memperluas pengaruhnya sampai ke Utara hingga Luzon dan Sulu, ke Selatan dan Barat Kalimantan.

Antonio Pigafetta menjadi orang Eropa pertama yang mengunjungi Brunei. Pigafetta menggambarkan Brunei sebagai kota yang sangat menakjubkan dimana setiap tamu yang bertemu Sultan akan diantar menggunakan Gajah dengan tempat duduk berlapis sutra. Negara kecil ini termasuk negara kaya dengan setiap penduduk menggunakan pakaian yang terbuat dari kain sutra bersulam emas, dihiasi mutiara dan memakai cincin dari batu mulia. Ekspedisi dan penggambaran Pigafetta tersebut menjadi titik tolak hubungan Brunei dengan

Eropa terutama dari Portugis dan Spanyol.

Kolonialisme Kerajaan Brunei dimulai tahun 1578 pada masa pemerintahan Sultan Abdul Kahar. Masa itu terjadi perselisihan dan perebutan kekuasaan antara Sultan Saiful Rizal dengan dua pangeran Brunei yang dikenal dengan 'Perang Kastila'. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh Spanyol untuk merebut dan menguasai Brunei dengan mengirimkan surat kepada Sultan agar memberi keleluasaan dan perlindungan bagi para misionaris Spanyol yang menyebarkan agama Kristiani.⁵⁴

Selain meminta jaminan keselamatan bagi misionaris mereka, pihak Spanyol juga menuliskan penghinaan terhadap Islam yang membuat Sultan marah, sehingga terjadi pertempuran antara Brunei dan Spanyol pada bulan April 1578. Dengan semangat juang dan nasionalisme yang tinggi, rakyat dan pemerintah Brunei berhasil memukul musuhnya pada tahun 1578 M. Sebagai pelampiasan kekalahan perang, pasukan Spanyol dibawah kepemimpinan Dr. Fransisco de Sande memerintahkan untuk membakar Masjid Jami' Brunei.

Rincian sejarah pembentukan negara Brunei:

- Tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan Timur Laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan dalam penyelesaian perang saudara Sultan Abdul Mubin dengan Sultan Mohyidin. Kejatuhan kerajaan Brunei selanjutnya disebabkan adanya pergolakan antara ahli waris kerajaan dalam perebutan kekuasaan dan munculnya pengaruh Eropa yang merubah tatanan pemerintahan kerajaan-kerajaan di wilayah Asia Tenggara.

⁵⁴ <https://sejarahlengkap.com/dunia/negara/sejarah-brunei-darussalam>

- Tahun 1839, James Brooke dari Inggris datang ke Sarawak dan menyerang Brunei sehingga Brunei kehilangan kekuasaannya atas Serawak. James Brook dilantik menjadi 'Raja Serawak' di Barat Laut Borneo sebelum meluaskan wilayah kekuasaannya. Tanggal 19 Desember 1846, James Brook menguasai pulau Labuan dan wilayah sekitarnya. Brunei kehilangan wilayah kekuasaannya sedikit demi sedikit melalui perusahaan perdagangan dan pemerintahannya sampai Brunei berada di bawah protektorat Inggris.
- Tahun 1888, Brunei menjadi salah satu negara kedaulatan Inggris dengan kesepakatan urusan dalam negeri tetap menjadi kekuasaan Brunei dan urusan luar negeri tetap berada di bawah pengawasan Britania. Tahun 1906, Brunei menerima perluasan kekuasaan Britania saat kekuasaan eksekutif pemerintahan dialihkan kepada perwakilan pemerintah Inggris yang menjadi penasihat Sultan dalam semua urusan pemerintahan kecuali hal-hal yang bersangkutan dengan adat istiadat dan masalah agama.
- Tahun 1959, Brunei mendeklarasikan kerajaan baru yang berkuasa dalam urusan pemerintahan dalam negeri, sementara isu hubungan luar negeri tetap berada dalam pengawasan Britania. Tahun 1962, pembentukan badan perundangan dibatalkan karena timbulnya pemberontakan oleh partai oposisi (Partai Rakyat Brunei) yang ingin membentuk negara kesatuan Borneo Utara. Pemberontakan tersebut dapat diberantas dengan bantuan pemerintahan Inggris.
- Pada akhir 1950 dan awal 1960, Brunei menolak rencana pembentukan dan penyatuan Malaysia bersama dengan Singapura, Sabah, Serawak dan Tanah

Melayu, dan menginginkan pembentukan Brunei sebagai salah satu negara merdeka yang berdiri sendiri.

- Tahun 1967, Omar Ali Saifuddin III telah turun takhta dan melantik putra sulungnya Hassanal Bolkian menjadi Sultan Brunei ke-29. Sri Sultan menjadi Menteri Pertahanan setelah Brunei mencapai kemerdekaan penuh dan diberi gelar Paduka Seri Begawan Sultan. Pada tahun 1970, pusat pemerintahan negeri Brunei Town dirubah namanya menjadi Bandar Sri Begawan untuk mengenang jasa baginda. Beliau mangkat pada tahun 1986.
- Pada 4 Januari 1970, Brunei dan Inggris Raya menandatangani Perjanjian Kerjasama dan Persahabatan. Pada 1 Januari 1984, Brunei Darussalam berhasil mencapai kemerdekaan sepenuhnya. Saat ini Brunei memiliki wilayah yang lebih kecil daripada masa lalu, dengan berbatasan dengan Serawak dari sebelah barat sampai timur wilayah itu, serta sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

Perkembangan Wilayah

Wilayah Brunei dibagi atas 4 distrik:

- Belait
- Brunei dan Muara
- Temburong
- Tutong

Distrik-distrik tersebut dibagi lagi menjadi 33 mukim, yaitu:

1. Sengkurong
2. Gadong A dan Gadong B
3. Berakas A
4. Kuala Belait
5. Seria
6. Kilanas
7. Sungai Liang
8. Pengkalan Batu
9. Kota Batu
10. Pekan Tutong
11. Berakas B
12. Mentiri
13. Serasa
14. Kianggeh
15. Burong Pinggai Ayer
16. Keriam
17. Lumapas
18. Kiudang
19. Saba
20. Sungai Kedayan

21. Sungai Kebun
22. Bangar
23. Bokok
24. Telisai
25. Labi
26. Labu
27. Kuala Balai
28. Tanjong Maya
29. Batu Apoi
30. Labi
31. Rambai
32. Amo
33. Melilas

Penduduknya sebagian besar tinggal di bagian Barat dengan jumlah sekitar 10.000 orang tinggal di daerah Temburong. Dengan kurang lebih jumlah penduduk total 470.000 orang, lebih kurang 80.000 orang tinggal di ibukota Bandar Sri Begawan.⁵⁵

Sosial Budaya

Komposisi masyarakat Brunei Darussalam yaitu Melayu 65.7%, Tionghoa 10.3%, lain-lain 24% (2016), dengan agama yang dianut yaitu Muslim sebagai

⁵⁵ http://p2k.unkris.ac.id/id3/1-3065-2962/Mukim-Di-Brunei_142824_p2k-unkris.html

agama resmi 78.8%, Kristen 8.7%, Budha 7.8%, dan 4.7% lain-lain (termasuk kepercayaan lama). Oleh sebab itu, sistem kebudayaan di Negara Brunei berkiblat pada Islam dengan pengaruh dari budaya Melayu.⁵⁶

Budaya Pernikahan kebanyakan diatur oleh orang tua mempelai wanita dengan memiliki calon menantu dengan sesama penganut agama. Namun, perkawinan antaretnis tidak jarang terjadi. Urusan rumah tangga dapat dicampuri oleh kedua orang tua.

Aturan etiket bersifat universal seperti memberikan sesuatu dengan tangan kanan, menolak makanan dengan menyentuh wadah dengan tangan kanan, menggunakan jempol untuk menunjuk, lepaskan sepatu setiap kali memasuki rumah atau bangunan umum, berjabat tangan dengan lembut, tidak pernah memanggil seseorang dengan nama saja, tidak pernah mengkonsumsi barang sampai secara khusus diminta untuk melakukannya, dan hindari kontak fisik interseksual publik

Pada masa pra-islam, penduduk Brunei menganut agama Hindu-Buddha. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Brunei menjadi pelopor dan penggerak perkembangan Islam bagi wilayah sekitarnya termasuk sebelah timur kepulauan Melayu hingga Pulau Luzon, Cebu, Otan, dan sebagainya.

Di masa lalu, penduduk Brunei memiliki adat istiadat kesopanan yang tinggi. Dalam catatan *First Voyage Around the World* karya Pigafetta yang dirujuk oleh

⁵⁶ <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>

Al-Sufri (1997), orang Brunei memiliki kebudayaan dan peradaban yang luhur. Selain itu orang Brunei juga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi yang mereka sebut 'semangat kebrueian'. Nasionalisme yang kental inilah yang membuat tentara Spanyol dipaksa mundur saat ingin menguasai Brunei.

Saat ini Brunei menggunakan asas syariat Islam dalam hukum perundang-undangannya yang disebut hukum Syarak. Mencakup undang-undang jenayah Islam, muammalah, undang-undang keluarga, serta undang-undang keterangan acara. Pengaruh kuat dari Sultan Sharif Ali yang ingin menjadikan penduduk Brunei sebagai muslim sejati berimplikasi pada perilaku penduduknya yang senantiasa menjaga perilakunya sesuai dengan syariat Islam.

Cara pengamalan Islam di Brunei didasarkan pada mazhab Syafii dalam bidang fikih dan ahlusunnah waljamaah di bidang akidah. Semenjak tahun 1984 saat diproklamirkan sebagai negara merdeka, Brunei menerapkan 'Melayu Islam Beraja' yang menjadi pedoman hidup bermasyarakat.

Brunei Saat Ini

Brunei memiliki indeks pembangunan manusia kedua di Asia Tenggara setelah Singapura. Tumpuan ekonomi berupa minyak bumi dan gas yang menjadi sumber kekayaan negara dan membuat Brunei menjadi negara terkaya ke 5 dan sudah diklasifikasikan sebagai negara maju. Dua pertiga penduduk Brunei adalah Melayu, dengan agama resmi Islam. Brunei juga mengikuti hukum Islam Syariah. Penduduk Brunei memperoleh pendidikan gratis, perawatan kesehatan,

subsidi makanan dan perumahan. Dan mereka juga tidak membayar pajak penghasilan pribadi.⁵⁷

Budaya Brunei hampir sama dengan budaya Melayu dengan pengaruh kuat dari Islam, tetapi lebih konservatif karena menerapkan sistem Islam Syariat, tidak seperti Malaysia dan Indonesia. Penjualan dan konsumsi alkohol diharamkan, dengan orang luar atau Non-Muslim masih diijinkan membawa maksimal 12 botol bir saat mereka masuk ke Brunei. Parlemen Brunei juga mulai menerapkan fatwa haram untuk rokok pada tahun 2011 dengan tujuan mengurangi konsumsi rokok.

Dua pertiga penduduk Brunei adalah etnis Melayu. Sementara etnis minoritas yang paling penting dan menguasai ekonomi negara adalah Tionghoa (Han). Terdapat juga komunitas ekspatriat dengan sejumlah besar warga negara Inggris dan Australia. ²⁰ Bahasa yang digunakan secara resmi adalah Bahasa Melayu, dengan Bahasa Tionghoa dan Bahasa Inggris yang 95% dikuasai oleh setiap penduduknya.

Negara kecil yang kaya ini memiliki perekonomian campuran antara kewirausahaan dalam negeri dan asing, pengawasan kerajaan, serta tradisi budaya perdagangan lama. Pengeluaran minyak mentah dan gas alam terdiri dari setengah PDB. Tingginya tingkat pendapatan membuat pengeluaran perkapita menjadi jauh lebih kecil, dan kerajaan membekali semua biaya pengobatan dan

⁵⁷ <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/indeks-pembangunan-manusia-negara-negara-di-asean-2015-1503285296>

memberikan subsidi pangan, perumahan dan pendidikan bagi setiap penduduk. Pemimpin Brunei merasa bimbang akan perkembangan ekonomi mereka dengan ekonomi dunia tidak seimbang dan akan mempengaruhi perkembangan sosial dalam negeri, sekalipun Brunei memainkan peranan penting dalam perekonomian dunia saat menjadi ketua APEC pada tahun 2000.

Rancangan masa depan Brunei dipusatkan untuk menghadapi persoalan ketrampilan buruh, pengurangan pengangguran, perkuatan sektor pariwisata dan perbankan, dan perluasan bidang ekonomi yang akan mempengaruhi semua faktor kehidupan masyarakat. Bahkan saat ini sistem penerbangan negara sedang mencoba menjadikan Brunei sebagai salah satu tujuan perjalanan internasional antara Eropa dan Australia / Selandia Baru. Selain itu Brunei juga menargetkan sebagai salah satu layanan penerbangan utama ke wilayah-wilayah Asia.

Sultan Haslanah Bolkiah, yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan memiliki koleksi 500 mobil mewah dan istana dengan lebih dari 1500 kamar dengan total aset lebih dari 25 miliar dollar. Sultan juga membangun sebuah mesjid termegah dan terbesar di Brunei yang disebut “Mesjid Jami’ Asr-Hassanil Bolkiah”. Dibangun tahun 1988, mesjid ini mampu menampung 3.000 umat Islam. Selain dilengkapi ruang perpustakaan, pertemuan dan lounge yang indah, arsitektur dan interior mesjid ini menjadi kebanggaan Brunei dan

kesultanan karena mampu menyaingi arsitektur dan interior Masjidil Haram di Makkah.⁵⁸

Negara yang memiliki wilayah kecil bukan berarti negara yang tidak berpengaruh. Banyak negara di dunia yang memiliki wilayah kecil namun pengaruhnya besar. Salah satu yang menjadikannya besar adalah karena keadaannya yang makmur dan juga sejahtera. Kekayaan dan kemampuan dalam mengatur rakyat menjadi poin penting bagi suatu negara kaitannya kedudukan dengan negara lain. Salah satu negara kecil yang makmur dan berpengaruh di wilayah Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam.

Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki wilayah kecil, namun memiliki kemakmuran yang sangat terkenal. Rakyat Brunei bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunei sendiri ditambah dengan ³ sistem pemerintahannya yang baik. Yang terkenal dari sistem pemerintahan Brunei adalah ³ dipimpin oleh seorang Sultan yang menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Selain itu, di Brunei ini sangat dikenal ³ memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan menengok lebih dalam mengenai sistem pemerintahan di Brunei Darussalam.

⁵⁸ <https://international.sindonews.com/read/794815/45/sosok-sultan-brunei-hassanal-bolkiah-miliki-7000-mobil-hingga-armada-jet-pribadi-1654895185>

B. Bentuk Pemerintahan Brunei Darussalam

Kepala ³ Pemerintahan Brunei Darussalam

Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit. Pemimpin yang seorang ³ sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan demikian maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri. Namun di Brunei Darussalam ini, meski sultan memiliki kekuasaan mutlak, nyatanya tetap berlaku sistem demokrasi dimana rakyat masih diakui pendapatnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ³ negara Brunei Darussalam tidak hanya bersifat monarki absolut namun juga demokrasi.

Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Di negara ini, rakyat juga dilibatkan dalam setiap keputusan negara. Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup. Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam adalah negara yang tidak memiliki dewan legislatif. Pada tanggal September tahun 2000, sultan Brunei mengadakan sidang untuk menentuka parlemen yang tidak pernah diadakan sejak tahun 1984. Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan, dengan demikian

Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua Asia.

Setiap negara pasti memiliki pemimpin. Hal ini karena syarat sebuah negara tidak hanya ada tempat dan rakyat saja, namun juga ada pemerintahan. Pemerintahan berarti ada yang memimpin dan ada yang dipimpin, dan juga ada peraturan yang berlaku. Seperti halnya Indonesia, yang dikepalai oleh seorang presiden, Brunei Darussalam juga memiliki pemimpin. Negara Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang sultan. Sultan di Brunei Darussalam menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan seperti perdana menteri. Di Brunei Darussalam, kekuasaan yang dimiliki oleh seorang sultan sangat besar. Namun meski demikian, pelaksanaan pemerintahan di Brunei Darussalam bersifat demokratis. Rakyat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.

Meskipun memiliki luas wilayah yang kecil, namun bukan berarti jika Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan yang buruk atau bahkan perekonomian yang lemah. Kenyataannya, Brunei Darussalam merupakan salah satu Negara kecil dengan perekonomian kuat dan sistem pemerintahan yang cukup bagus.

Kekayaan maupun kemampuan dalam mengatur masyarakatnya menjadi poin penting untuk sebuah Negara dalam memajukan negaranya. Seperti yang sudah dilakukan Brunei Darussalam.

Kemakmuran Brunei tergantung pada sumber daya minyak bumi, gas alam, dan kayu. Kekayaan negara membuat pemerintah mampu memberikan layanan kesehatan gratis dan pendidikan gratis hingga tingkat universitas. Orang Brunei tidak membayar pajak penghasilan.

Rendahnya harga minyak sejak 2013 menyebabkan defisit anggaran dan pertumbuhan ekonomi mulai melemah.

Politik Brunei Darussalam

Politik Brunei Darussalam berbentuk Kerajaan mutlak, dimana Sultan Brunei sebagai Kepala negara dan Kepala Pemerintahan (Perdana Menteri Brunei). Eksekutif menjalankan pemerintahan.

Brunei Dewan Perwakilan dengan 36 anggota, yang hanya bertugas sebagai konsultan. Berdasarkan konstitusi Brunei tahun 1959, Hassanal Bolkiah, adalah Kepala negara dengan otoritas eksekutif penuh, termasuk dalam keadaan genting sejak 1962. Peran sultan diabadikan dalam filsafat nasional yang dikenal sebagai "Melayu Islam Beraja" (MIB), atau Kerajaan Melayu Islam. Negara dibawah hipotesadarurat militer sejak terjadi pemberontakan pada awal 1960-an dan dijatuhkan oleh tentara *Inggris* dari Singapura.

C. Bukti pelaksanaan

Pemerintahan Brunei Darussalam adalah Monarki Absolut, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya ³ Brunei Darussalam dipimpin oleh seorang

sultan yang memiliki kekuasaan mutlak. Pemerintahan yang demikian ini disebut dengan Monarki Absolut. Secara teoritis, pemerintahan Monarki Absolut adalah bentuk pemerintaha dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya.

Sistem pemerintahan di Brunei Darussalam tergolong tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman, negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari. Brunei Darussalam adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan. Mengapa pulau tersebut dinamakan Borneo? Hal ini karena pada zaman dahulu orang-orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, karena merupakan bandar perdagangan terbesar. Hal ini membuktikan bahwa meskipun secara wilayah negara ini kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya adalah besar.

Brunei Darussalam memiliki sistem pemerintahan monarki absolut dengan kepala pemerintahan Sultan Hassanal Bolkiah yang menjabat sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, perdana menteri dan menteri pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Karena kekuasaan mutlak Sultan sebagai pemimpin negara, Brunei menjadi salah satu negara paling stabil dari segi politik di wilayah Asia.

Brunei Darussalam merupakan satu-satunya negara dengan rezime monarki di Asia Tenggara, selain itu Bunei Darussalam juga merupakan satu-satunya negara

yang tersisa dengan menggunakan tata cara monarki absolut di era modern seperti saat ini. Brunei Darussalam tetap bertahan dengan bentuk negaranya yang monarki absolut meskipun perkembangan bentuk negara republik cukup pesat dan dianut oleh mayoritas negara-negara di dunia pada masa sekarang ini. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki nasib yang hampir sama dengan negara-negara di Asia Tenggara lain dalam hal sejarah. Brunei Darussalam juga merupakan negara yang tak luput dari penjajahan bangsa Eropa. Dalam sejarah negara Brunei Darussalam, negara ini telah dijajah oleh Inggris selama 96 tahun. Brunei Darussalam menjadi negara protektorat Inggris sejak tahun 1888. Sejak saat itulah Brunei Darussalam berada dibawah kekuasaan Inggris. Inggris pertama kali masuk ke Brunei Darussalam melalui serawak yang pada saat itu telah dikuasai Inggris, Serawak itu sendiri sebelum dikuasai Inggris merupakan wilayah dari kesultanan Brunei Darussalam. Sedikit demi sedikit wilayah tertorial kesultanan Brunei Darussalam digerogeti oleh Inggris dibawah kepemimpinan James Brooke dalam misi invansi Inggris raya. Inggris pada saat itu telah berhasil menguasai perekonomian negara ini. Setelah sendi-sendi perekonomian Brunei Darussalam dikuasai oleh Inggris maka Brunei pun tak kuasa untuk mempertahankan kedaulatannya di tanahnya sendiri, hingga pada tahun 1888 Brunei Darussalam resmi menjadi negara protektorat dari kerajaan Inggris Raya. Barulah pada tahun 1984 Brunei Darussalam memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Awal kemerdekaan Brunei Darussalam atas Inggris tidak lepas dari amandemen perjanjian 1959 antara Brunei dengan Inggris. Dalam pembaharuan perjanjian tersebut, disebutkan bahwa adanya

penghapusan wewenang kerajaan Inggris atas urusan internal (dalam negeri) Brunei Darussalam.⁵⁹

D. Kelebihan dan Kekurangan

Kelebihan Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Monarki ternyata juga punya kelebihan sebagai sisi positifnya. Pertama, wilayah yang diatur lewat satu tangan akan lebih mudah diorganisir. Hal ini disebutkan lantaran jika perpolitikan dilakukan di suatu negara terjadi, maka sistem pun akan semakin rumit. Oleh karena itu, monarki hadir sebagai jawabannya, yakni satu pintu, satu pemimpin, dan satu keputusan. Kemudian, pemerintahan monarki dibantu oleh pemimpin yang hak serta kewenangannya tak bisa diganggu gugat. Dengan begitu, maka pengaturan sistem penduduk baik dari segi hukum atau apapun, akan lebih mudah diputuskan.

Layaknya pisau bermata dua, setiap sistem monarki punya kekurangan dan kelebihan yang saling mengiringi satu sama lain. Sisi tajam ini tergantung ingin dilihat dari sudut pandang yang mana, lebih melihat kekurangannya atau kelebihannya. Berikut ini kelebihan pemerintahan monarki: Kemudahan dalam pengaturan negara karena lewat satu pintu, raja Bisa meredam pergolakan politik Mudah mengatur masyarakat lantaran raja punya hak paten yang tak boleh diganggu

⁵⁹ http://www.setabasri.com/2012/05/bentuk-negara-dan-sistem-pemerintahan_11.html

³ Disini Sultan menjabat sebagai kepala Negara dan juga kepala pemerintahan. Selain itu, Brunei juga terkenal dengan keteguhannya memegang prinsip-prinsip keIslaman pada tata pelaksanaan pemerintahan maupun kehidupan sehari-hari.

Dalam pelaksanaannya, pemerintahan Brunei juga menerapkan sistem ³demokrasi. Dengan kata lain, rakyat dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan untuk negaranya. Dalam pemilihan anggota birokrat, Brunei cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup.

Kekurangan system pemerintahan Brunei Darussalam

Dalam pelaksanaan monarki, raja memang punya peran penting lantaran diklaim pengangkatannya terjadi akibat keputusan Tuhan. Hak dan kewenangannya sebagai pemimpin membawa pengaruh besar dalam kehidupan penduduk kerajaan. Kekurangan monarki terdiri dari beberapa macam, salah satunya rakyat tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya, seluruh masyarakat dibelenggu oleh pemimpinnya. Selain itu, rakyat juga tak bisa berpendapat lantaran tidak diizinkan ikut campur dalam pemerintahan. Lalu, kekurangan yang lain adalah tingkat kesejahteraan yang sangat bergantung kepada gelagat rajanya. Lantaran berkuasa, terkadang ada juga beberapa yang menyalahgunakan posisi tersebut. Imbasnya, ada beberapa rakyat yang ditelantarkan oleh pemimpinnya. Kendati seperti itu, kini monarki terbagi dalam beberapa jenis. Di atas merupakan kekurangan monarki absolut. Jika berbicara mengenai konstitusional, maka nasib rakyat dapat lebih berpotensi sejahtera. Hal ini disebabkan oleh

pemerintahan yang memberikan pembatas untuk raja dan mengenalkan HAM rakyat yang tak boleh diganggu gugat.⁶⁰

Berikut kekurangan pemerintahan monarki tersebut:

- Rakyat tak mampu berbuat apa-apa
- Rakyat dibelenggu oleh rajanya
- Pendapat rakyat tak didengarkan
- Sejahteranya rakyat tergantung watak rajanya

⁶⁰ <https://tirto.id/kekurangan-dan-kelebihan-bentuk-pemerintahan-monarki-apa-saja-gxWt>

BAB VI

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA VIETNAM

A. Sejarah Terbentuknya Negara

Dalam situs Alpha History, dijelaskan jika kolonisasi di Vietnam oleh Prancis terjadi pada 1880-an dan berlangsung selama enam dekade. Awalnya Prancis beralasan jika kolonisasi ini ditujukan untuk membangun negara yang terbelakang. Namun, pada kenyataannya kolonisasi ini didorong oleh kepentingan ekonomi. Saat itu, Prancis berniat untuk mengeksploitasi sumber daya untuk menghasilkan keuntungan. Para warga Vietnam dipaksa untuk bekerja di perkebunan padi dan karet, yang sebelumnya telah direbut oleh Prancis. Selain itu, Prancis juga melakukan monopoli dan penerapan pajak yang tinggi kepada penduduk lokal. Vietnam melakukan berbagai upaya untuk memerdekakan negaranya hingga akhirnya Vietnam merdeka dari Prancis pada 2 September 1945.⁶¹

Vietnam merupakan jajahan dari Prancis, namun pada tanggal 20 Juli 1954 melalui Perjanjian Jenewa tentang penghentian perang di Vietnam, Laos dan Kamboja telah ditandatangani. Untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa, Negara-negara besar harus mengakui semua hak fundamental bangsa Vietnam yang meliputi kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan dan keutuhan wilayah.

Keputusan Konferensi Jenewa di antaranya :

⁶¹ Vanya Karunia Mulia Putri, "Vietnam, Negara ASEAN Yang Pernah Terbagi Menjadi 2," *KOMPAS.Com*, last modified 2021, accessed November 27, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/05/153359169/vietnam-negara-asean-yang-pernah-terbagi-dua?page=all>.

- a. Mengakui kemerdekaan negara Kamboja, Laos, dan Vietnam,
- b. Menyetujui bahwa wilayah Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dan
- c. Vietnam Selatan, serta
- d. Akan segera diadakan pemilu pada bulan Juli 1956 untuk menyatukan
- e. Vietnam, di bawah pengawasan Komisi Pengawas Internasional.

Sejak tahun 1950 setelah Vietnam merdeka dari Prancis, Vietnam terbagi atas Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, ketika itu hubungan Vietnam dan AS di latarbelakangi oleh sejarah yang cukup kelam melalui perang yang terjadi sejak tahun 1957 hingga tahun 1975.⁶² Vietnam, negara yang pernah terbagi dua Dilansir dari situs Te Ara - The Encyclopaedia of New Zealand (Teara.govt.nz), pada tahun 1954 hingga 1975, Vietnam terbagi menjadi dua negara, yaitu Vietnam Utara (Republik Demokratik Vietnam) serta Vietnam Selatan (Republik Vietnam).

Terbaginya Vietnam menjadi dua negara diawali dengan adanya Perang Indochina yang mengakibatkan munculnya Perang Vietnam antara kelompok nasional, seperti Viet Minh di Ho Chi Minh dengan kelompok kolonial (Jepang dan Prancis). Selama 8 tahun sejak 1946, Perang Indochina Prancis terjadi. Perang ini diakhiri dengan kekalahan telak oleh Prancis dan kemenangan oleh Viet Minh pada Pertempuran Dien Bien Phu sekitar Mei 1954. Dikutip dari Encyclopaedia Britannica, pada Juli 1954, dibuatlah

⁶² Alan Setiawan., "Hubungan Bilateral Vietnam - Amerika Serikat Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi Periode 2001-2010" (2016): 1-32.

Kesepakatan Jenewa terakhir. Kesepakatan itu berisikan penetapan paralel ke-17 atau lintang 17 derajat LU sebagai garis pemisah antara pasukan militer Prancis dengan Viet Minh.⁶³

¹⁰ Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1954-1975, merupakan perang yang paling bersifat kontroversi, memecah belah, dan juga merupakan perang terlama yang pernah dialami 30 Amerika. Amerika dan negara Barat lainnya menyebut perang ini sebagai 'Perang Vietnam', karena terjadi di Vietnam dan melibatkan orang-orang Vietnam. Warga Vietnam, menyebut Kekalahan Amerika Sebagai Negara Super Power Pada Saat Perang Vietnam (1954-1975).¹⁰ Korban tewas yang sangat banyak dan menimbulkan kerugian material dan spiritual yang sangat besar khususnya bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat yang selama ini diketahui sebagai negara super power, negara adidaya yang mempunyai potensi di banyak bidang, seperti kekuatan militer dan politik.⁶⁴

Perang Vietnam adalah perang dahsyat yang terjadi sepanjang sejarah, karena timbulnya pertentangan antara dua ideologi yang sangat berpengaruh di dunia yaitu demokrasi liberal dengan komunis sehingga mengakibatkan pecahnya negara Vietnam menjadi dua bagian yaitu Vietnam Utara yang menganut paham komunisme dan Vietnam Selatan dengan paham demokrasi liberalnya. Tentunya perpecahan dua negara itu dibantu oleh negara-negara sekutu seperti Prancis, Amerika Serikat dan China sehingga semakin

⁶³ ¹⁰ Ri, "Vietnam, Negara ASEAN Yang Pernah Terbagi Menjadi 2."

⁶⁴ "American Soldiers' Lives : The Vietnam War," *Greenwood Press* (2007): 50.

¹⁰ menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan sehingga perang ini menyebar ke Laos dan Kamboja.

Selama masa peperangan, Amerika Serikat berusaha untuk membantu Vietnam Selatan dengan tujuan agar tidak semakin menyebarnya paham komunisme di negara bagian tersebut,. Hal tersebut karena dianggap sangat membahayakan bagi eksistensi Amerika Serikat sebagai penganut demokrasi liberal. ¹⁰ Perang Vietnam memperjuangkan kemerdekaan Vietnam, selain mengikutsertakan peran para komunis dalam menjunjung keyakinan politik dan memberikan dominasi penting dalam negara. Peran komunis di sini maksudnya adalah proses penyebaran paham komunis di negara kawasan Asia Tenggara yang membuat resah negara Barat Walaupun taktik yang digunakan oleh para komunis adalah taktik gerilya revolusioner yang sudah cukup familiar dan mudah ditebak, negara-negara Barat yang sudah jauh lebih berpengalaman tetap saja 'gagal' dalam menghadapi serangan Vietnam.⁶⁵

Kondisi Geografis

Ibu kota negara Vietnam adalah Hanoi. Bentuk negaranya adalah Republik Sosialis dengan kepala pemerintahannya seorang Perdana Menteri. Negara yang merdeka pada 2 September 1945 memiliki luas wilayah total 331.210 km² yang terdiri dari wilayah daratan 310,070 km² dan wilayah perairan 21,140 km². Dari luas tersebut terdapat jumlah penduduk mencapai 96,462,106 juta jiwa (survei 2019). Negara Vietnam merupakan negara

¹⁰
⁶⁵ *The Wars in Vietnam. 1975* (Hippocrene Books, Inc, n.d.), 9–10.

agraris di kawasan Asia Tenggara yang membentang membentuk huruf S di sepanjang Pantai Timur Jazirah Indocina.⁶⁶

Letaknya berbatasan dengan Tiongkok di Utara, Laos, dan Kampuchea di Barat, Teluk Tonkin di Selatan dan Barat. Posisi Vietnam yang berbatasan dengan Tiongkok, Laos, dan Kamboja sangat mempengaruhi politik luar negerinya, antara lain sikap yang ingin mendominasi tetangganya yang di Barat karena keamanan Vietnam selalu dikaitkan kepada ketiga negara tersebut.

⁶⁶ Fahri Zulfikar, "Negara Vietnam: Ibu Kota, Letak Geografis, Dan Kondisi Alamnya," *Detikedu*, last modified 2021, accessed November 27, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5665118/negara-vietnam-ibu-kota-letak-geografis-dan-kondisi-alamnya>.

B. Bentuk Pemerintahan Negara Vietnam

Vietnam sebagai salah satu komunis yang masih ada maka membuatnya dapat mengatur masyarakatnya menjadi satu perintah. Selain Vietnam, masih ada 1 negara lagi di kawasan Asia Tenggara yang menganut aliran komunisme yaitu Laos. Berikut beberapa perbedaan komunisme yang dianut oleh kedua negara tersebut, yaitu :⁶⁷

Tabel 6.1. Perbedaan Komunisme Vietnam dan Laos

	Laos	Vietnam
Posisi presiden	Kepala Negara	Kepala Pemerintahan dan
Partisipasi partai	Hanya Penguasa adal partai	Partai hanya boleh mengikuti pemilu apabila bekerjasama dan disetujui oleh <i>Vietnam Communist Party</i>
Pengambilan Keputusan	Ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politburo dan 49 anggota Komite	Ditentukan oleh Majelis Nasional Vietnam yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga eksekutif dan

⁶⁷ M Ridla Imamal-haq et al., "REPUBLIK DEMOKRATIS LAOS (Lao People ' s Democratic Republic)" (2015): 12.

Bentuk pemerintahan vietnam adalah ²¹ sistem republik komunis sehingga hanya ada satu partai di negara ini. Negara satu partai ini memiliki presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri yang menjadi pemimpin pemerintahan. Vietnam adalah organisasi eksekutif yang dimiliki oleh NA (National Assembly). Organisasi eksekutif ini terdiri dari perdana menteri, deputy PM, menteri-menteri, dan beberapa anggota lainnya. Khusus PM, harus bertanggung jawab kepada NA. Presiden di Vietnam merupakan kepala negara yang mewakili rakyat secara internal dan eksternal. Vietnam menggunakan kota Hanoi sebagai ibu kota. Perihal transaksi, Vietnam yang berbendera merah dengan bintang ditengahnya ini menggunakan mata uang resmi, Dong (VND).⁶⁸

Berikut struktur pemerintahan negara vietnam yang berbentuk republik, yaitu :⁶⁹

- a. Kepala negara: Presiden Nguyen Phu Trong, sejak 23 Oktober 2018 untuk periode 2016-2021
- b. Kepala pemerintahan: Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc, sejak 7 April 2016
- c. Kepala majelis nasional: Nguyen Thi Kim Ngan

⁶⁸ Serafica Gischa, "Bentuk-Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN," *KOMPAS.Com*, last modified 2022, accessed November 27, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/05/183000169/bentuk-bentuk-pemerintahan-negara-asean?page=all>.

⁶⁹ Novia Aisyah, "Profil Negara Berbentuk Republik Sosialis Di Asia Tenggara & Kepala Negaranya," last modified 2021, accessed November 27, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5727876/profil-negara-berbentuk-republik-sosialis-di-asia-tenggara--kepala-negaranya>.

C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Di Vietnam

Setelah perang Vietnam dengan Amerika Serikat, maka terbagilah menjadi 2 wilayah yaitu utara dan selatan. Lalu muncul lah salah satu pemimpin pertama di Vietnam yaitu Ngo Dinh Diem. Beliau adalah presiden pertama Vietnam Selatan dengan periode pemerintahan antara 1955-1963. Masa kepemimpinannya bertepatan dengan Perang Vietnam (1955-1975), yang melibatkan Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Dalam perang tersebut, Ngo Dinh Diem dan Vietnam Selatan mendapat dukungan dari beberapa negara, salah satunya Amerika Serikat.

Pada awal 1954, Kaisar Bao Dai menawarkan Ngo Dinh Diem untuk menjabat sebagai Perdana Menteri dalam pemerintahan baru di Vietnam setelah kekalahan Perancis dalam Perang Indochina I. Pada 16 Juni 1954, Diem bertemu dengan Bao Dai di Perancis dan setuju untuk mengisi posisi yang ditawarkan. Mereka segera mendirikan pemerintahan baru dengan kabinet yang beranggotakan 18 orang. Pada 21 Juli 1954, Perang Indochina I resmi berakhir dengan sebuah perjanjian damai, yang salah satu isinya menyatakan untuk membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan Ngo Dinh Diem sebagai perdana menteri, dengan ibu kota di Saigon.

Pada Desember 1954, ia mendirikan Bank Nasional Vietnam. Di saat yang sama, banyak yang berusaha menggoyang kedudukannya. Kendati demikian, Ngo Dinh Diem berhasil mengatasinya dan kiprah politiknya kian berkembang. Ia bahkan dicalonkan untuk menjadi Presiden Vietnam Selatan

melawan Bao Dai. Setelah pemilihan umum dilakukan, Ngo Dinh Diem mendapat suara terbanyak, yakni mencapai 98,2 persen. Pada 26 Oktober 1955, Ngo Dinh Diem mendeklarasikan berdirinya Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dengan dirinya sebagai presiden pertama.

Sedangkan Vietnam Utara didukung oleh negara-negara komunis, salah satunya Uni Soviet. Dalam masa pemerintahan Ngo Dinh Diem, Vietnam Selatan mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat. Alasan Amerika Serikat mendukung Vietnam Selatan adalah AS khawatir apabila Vietnam Utara menang, maka komunis akan menyebar ke negeri-negeri di Asia Tenggara. Selain menghadapi Perang Vietnam, pemerintahan Ngo Dinh Diem juga mendapatkan banyak masalah. Pasalnya, Ngo Dinh Diem dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan nepotistik. Salah satu kebijakannya bahkan memicu amarah dari umat Buddha Vietnam, yang menjadi mayoritas di negara ini.⁷⁰

Bersatunya Vietnam Utara dan Vietnam Selatan

Terdapat dua faktor pendorong yang menyebabkan bersatunya Vietnam Utara dan Selatan, yakni kekalahan AS dalam Perang Vietnam dan runtuhnya Vietnam Selatan. Pada awal peperangan, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kubunya kalah dalam hal persenjataan dari AS. Akan tetapi, berkat strateginya, Vietnam Utara berhasil memenangkan pertempuran yang berjalan hampir dua dekade dan mengusir AS dari Vietnam Selatan. Pada 30 April

⁷⁰ Verelladevanka Adryamarthanino, "Ngo Dinh Diem, Presiden Pertama Vietnam Selatan," accessed November 27, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/30/190000279/ngo-dinh-diem-presiden-pertama-vietnam-selatan?page=all>.

1975, pemerintah Vietnam Selatan runtuh dan digantikan oleh rezim yang didominasi oleh Komunis.

Pada 2 Juli 1976, Vietnam Utara dan Selatan resmi bersatu setelah para pemimpinnya melakukan konsolidasi pemerintahan. Melalui pemungutan suara secara tertutup di Majelis Besar, akhirnya ditetapkan pemimpin baru. Selain itu, kedua pihak telah menetapkan bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara yang mengadopsi milik Vietnam Utara. Vietnam dinyatakan sebagai negara sosialis yang wilayahnya membentang dari Cao Lang (bagian paling utara Vietnam Utara) hingga Cau Mau (semenanjung paling selatan di Vietnam Selatan).

Dengan bergabungnya Vietnam Utara dan Selatan, maka Konstitusi 1959 harus direvisi agar sejalan dengan ideologi yang dianut Kongres Nasional ke-4 Partai Komunis Vietnam pada 1976. Konstitusi yang baru harus menekankan pada kedaulatan rakyat, mengutamakan perlunya sebuah sistem politik yang baru, bentuk perekonomian baru, budaya baru, dan sosialisme yang baru.⁷¹

Dampak bersatunya

Vietnam Secara politik, akhir bersatunya Vietnam menjadi penanda kemenangan Blok Timur dari Blok Barat di Asia Tenggara selama Perang Dingin. Pada 18 Desember 1980, Majelis Nasional memberikan persetujuan

⁷¹ Widya Lestari Ningsih, "Bersatunya Vietnam Utara Dan Selatan," *KOMPAS.Com*, last modified 2021, accessed November 27, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/150000279/bersatunya-vietnam-utara-dan-selatan?page=all>.

secara bulat terhadap konstitusi baru Vietnam. Konstitusi Vietnam 1980 secara nyata telah dipengaruhi oleh Uni Soviet, karena kekuasaan dikonsentrasikan pada sebuah badan bentukan baru yang bernama Dewan Negara, yang mirip dengan the Presidium of the Supreme Soviet.

Hal itu menegaskan bahwa Partai Komunis Vietnam memihak kepada Uni Soviet daripada China. Setelah itu, Republik Sosialis Vietnam berusaha meluaskan pengaruhnya dan berusaha menyatukan kawasan Indochina dalam satu negara di bawah kekuasaannya. Istilah Indochina mencakup wilayah yang saat ini dikenal sebagai Vietnam, Laos, dan Kamboja. Vietnam pun menyerbu Kamboja pada 1979 dan berhasil mendirikan negara bonekanya, Republik Rakyat Kamboja.⁷²

¹⁷ Jabatan presiden ini diciptakan ketika Republik Sosialis Vietnam dibentuk pada 1976. Sejak saat itu Vietnam telah memiliki enam orang presiden (tidak termasuk Nguyen Huu Tho, yang hanya menjadi Penjabat Presiden). Sejak 4 Juli 1981, istilah jabatan ini diubah dari Presiden menjadi Ketua Dewan Negara, tetapi kemudian dikembalikan menjadi Presiden lagi sejak 22 September 1992. Berikut beberapa daftar pemimpin yang pernah memimpin di Republik Vietnam, yaitu :⁷³

⁷² Koesrianti, *Association of South East Asian Nation (ASEAN): Sejarah Konstitusi Dan Integrasi Kawasan*. (Surabaya: Airlangga University Press., 2014).

⁷³ "Daftar Presiden Vietnam," *Profilpelajar.Com*, last modified 2022, accessed November 27, 2022, https://profilpelajar.com/Daftar_Presiden_Vietnam.

Tabel 6.2. Daftar Pemimpin Vietnam

	Nama	Mulai Menjabat	Akhir jabatan	Partai
1	Ton Duc Cat	2 Juli 1976	¹⁷ 30 Maret 1980	Partai Komunis Vietnam
	Nguyen Huu Doggy (Pejabat Presiden)	30 Maret 1980	4 Juli 1981	Partai Komunis Vietnam
2	Truong Pussy	4 Juli 1981	18 Juni 1987	Partai Komunis Vietnam
3	Vo Chi Monkey	18 Juni 1987	22 September 1992	Partai Komunis Vietnam
4	Lê Đức Ant	23 September 1992	24 September 1997	Partai Komunis Vietnam
5	Tran Duc Spiderman	24 September 1997	27 Juni 2006	Partai Komunis Vietnam
6	Nguyen Superman	27 Juni 2006	25 Juli 2011	Partai Komunis Vietnam
7	Truong Batman	25 Juli 2011	2 April 2016	Partai Komunis Vietnam
8	Trần Đại Hul	2 April 2016	21 September 2018	Partai Komunis Vietnam
	Đặng Ngik Ngok (Pejabat Presiden)	21 September 2018	23 Oktober 2018	Partai Komunis Vietnam
9	Nguyễn Phú Thor	23 Oktober 2018	5 April 2021	Partai Komunis Vietnam
10	Nguyễn Butterfly	5 April 2021	Sekarang	Partai Komunis Vietnam

Satu dari negara Komunis tersisa Kehancuran sosialisme dimulai pada 1989, ketika dalam beberapa bulan satu persatu rezim komunis di Eropa Timur mengalami keruntuhan. Dimulai dengan Polandia, Bulgaria, Jerman Timur, Ceko, Slovakia, Rumania, dan pada 1991, Uni Soviet sebagai negara adi kuasa yang berhaluan komunis dan menjadi kiblat banyak negara berideologi komunis, menjadi perpecahan.

Selain Vietnam, negara-negara yang saat ini masih menganut komunisme di antaranya adalah China, Korea Utara, Laos, dan Kuba. Meski tergolong sebagai negara komunis, sekitar 85 persen penduduk Vietnam adalah

penganut Buddha. Konstitusi Vietnam Meski Konstitusi Vietnam yang kini berlaku sudah merupakan reformasi pasca keruntuhan komunisme di Eropa Timur, bahkan terakhir mengalami perubahan lagi pada 2001, tetapi corak sosialis-komunis tetap dipertahankan.

Jika dilihat, secara keseluruhan ketentuan-ketentuan konstitusional Vietnam mirip dengan Konstitusi Uni Soviet. Selain memuat ketentuan mengenai kebijakan perekonomian, Konstitusi Vietnam juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai kebijakan politik, kebudayaan, pendidikan, ilmu dan teknologi, pertahanan tanah air sosialis, hak dan kewajiban dasar warga negara, majelis nasional, dewan negara, dewan menteri (kabinet), dewan rakyat dan komite rakyat, peradilan dan komisi pengawas keuangan, bendera nasional, lambang negara, lagu nasional, ibukota negara, kekuatan berlakunya serta prosedur perubahan konstitusi.⁷⁴

Reformasi ekonomi Ideologi komunis serta ajaran Ho Chi Minh bertujuan menjadikan Vietnam sebagai negara sosialis yang kuat, rakyatnya makmur, masyarakatnya adil beradab serta demokratis. Akan tetapi, tekanan ekonomi pasar atau kapitalisme membuat Vietnam tidak memiliki pilihan kecuali dengan memberikan keleluasaan membuka ekonomi pasarnya terhadap sistem kapitalisme⁷⁵.

⁷⁴ Widya Lestari Ningsih, "Apakah Vietnam Masih Negara Komunis?," *KOMPAS.Com*, last modified 2021, accessed November 27, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/30/080000079/apakah-vietnam-masih-negara-komunis?page=all>.

⁷⁵ Siti Nazura

D. Kelebihan Dan Kelemahan Bentuk Pemerintahan di Kamboja

Pasca Vietnam unifikasi kedua wilayah Vietnam Selatan dan Utara. Dampak dari Peperangan panjang mereka yang telah mengorbankan banyak sumber-sumber kekayaan dan perekonomian Vietnam. Terpampang tugas berat Vietnam sebagai negara yang baru bersatu; membangun perekonomian yang saat itu mengalami Embargo dari Amerika Serikat. Vietnam sebagai negara sosialis berlandaskan Komunisme-Marxisme-Leninisme, mengalami perubahan dalam kebijakannya dalam meningkatkan kontrol terhadap usaha ekonomi dan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

Pengaruh dalam Politik, Pemerintahan dan Hukum

¹⁷ Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara partai tunggal. Sebuah konstitusi baru disahkan pada April 1992 menggantikan versi 1975. Konstitusi Vietnam berbentuk Republik Sosialis Vietnam adalah Negara dengan hukum sosialis dari rakyat dan untuk rakyat. Peran ¹⁷ partai Komunis disertakan kembali dalam semua organ-organ pemerintah, politik dan masyarakat. ¹⁷ Semua organ-organ pemerintah Vietnam secara besar dikontrol oleh Partai Komunis. Hanya organisasi politik yang bekerja sama atau didukung oleh Partai Komunis yang diperbolehkan ikut pemilihan umum. Meskipun negara tetap bertahan dengan paham sosialisme-komunisme, namun ¹⁷ makna ideologi tersebut telah berkurang secara besar sejak tahun 1990-an.

Vietnam yang berbentuk republik, maka kekuasaanya terbagi menjadi Lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif. Eksekutif terdiri dari kepala Negara yaitu Presiden bersama Wakil Presiden, yang dipilih oleh Dewan

Nasional (Legislatif) dari salah satu anggotanya untuk masa pemerintahan lima tahun. Presiden Vietnam adalah kepala negara dan secara nominal sebagai panglima tertinggi Vietnam, menduduki Dewan Nasional untuk Pertahanan dan Keamanan. Sedangkan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, mengepalai kabinet, menteri-menteri dan para perwiranya. Perdana menteri ini ditunjuk oleh presiden yang berasal dari anggota Dewan Nasional dan wakil ²⁰ perdana menteri ditunjuk oleh perdana menteri. Kabinet ¹⁸ ditunjuk oleh presiden berdasarkan proposal perdana menteri dan disetujui oleh Dewan Nasional.

Dalam konteks pemerintahan lokal, dalam unit administrasi di Vietnam dibagi menjadi Country yang berprovinsi-provinsi dibawah aturan langsung pusat. Provinsi itu sendiri dibagi ke distrik-distrik, kota, dan desa. Kota berada dibawah aturan pusat langsung yang mana dibagi menjadi urban distrik, rural distrik, desa dan unit-unit lain yang serupa.

Di Vietnam Partai dan Negara sangat terhubung dengan erat pada semua level administratif. Partai mengklaim kekuasaannya dilindungi oleh konstitusi, dan partai bertindak sebagai pelindung (vanguard) dari kelas pekerja Vietnam dan perwakilan loyal dari kepentingan kaum pekerja dan seluruh bangsa. Communist Party of Vietnam (Partai Komunis Vietnam/CPV) dalam ideologinya berkaitan erat dengan Pemikiran Marxisme-Lenimisme dan Ho Chi Minh. CPV melihat dirinya sebagai satu-satunya kekuatan yang berhak untuk menentukan nasib dari Vietnam.³⁷ Selain CPV partai lain hanya boleh mengikuti pemilihan namun harus atas persetujuan CPV, pada Pemilu tahun

2002 CPV memenangkan 90% Suara. Sedangkan Lembaga Yudikatif dipimpin oleh Supreme People's Court yang mana chief justicenya ¹⁷ dipilih oleh dewan nasional untuk masa tugas lima tahun.

Terkait hal tersebut untuk melanjutkan keberadaan dari sistem sosialis bergantung dengan tindakan Partai dan Pemerintah yang memperkenalkan sejumlah reformasi secara selektif disejumlah bidang termasuk sektor agrikultural dan perusahaan-perusahaan negara sejak awal 1980an. Hal ini dikulminasikan dengan Doi Moi Reform pada tahun 1963. Esensi dari kebijakan ini terepresentasi dalam pengenalan dari prinsip-prinsip pasar bersama dalam sektor pemerintahan.⁷⁶

Dalam menjalankan perpolitikanny, Vietnam sebagai negara sosialis dengan sistem satu partai, pemerintahan Vietnam dijalankan secara sentralistik dalam setiap pengambilan kebijakan. Negara Vietnam berlandaskan sistem demokratis-sentralisme yaitu dimana kehendak rakyat disalurkan dari bawah lalu disaring keatas dan dikembalikan lagi kebawah yang bersifat perintah atau komando. Vietnam yang menganut ideologi komunis dengan faham Marxisme-Leninisme serta ajaran-ajaran Ho Chi Minh. Faham inilah yang menjadi ilham dan menerangi pemikiran serta sikap berbangsa dan bernegara Vietnam dalam menjalankan pemerintahannya. Mereka juga menganggap bahwa masyarakat sosialis adalah masyarakat masa depan.

⁷⁶ Siti Nazura, "MAKALAH DAMPAK PENERAPAN IDEOLOGI KOMUNIS," 2016.

Namun di sisi lain dalam pemerintahan Vietnam, mereka lebih cenderung untuk tidak memberi ruang, untuk suara yang berbeda dengan garis partai misalnya pada tahun 2013 lalu sekitar 40 penulis blog dijatuhi hukuman penjara. Wartawan BBC untuk kawasan Asia Tenggara di Bangkok, Jonathan Head, melaporkan bahwa sekedar mempertanyakan keputusan yang diambil Partai Komunis bisa ditangkap. Meski dalam kondisi yang demikian, di Vietnam sendiri sebenarnya ada wacana Pembentukan Partai Sosialis Demokrat yang mana wacana ini menjadi perdebatan.⁷⁷ Oleh karena itu bermunculan pro-kontra terhadap penerapan sistem komunisme di Vietnam. Berikut beberapa dampak negatif dan positifnya, yaitu :⁷⁸

- a. Kelebihan : lebih solid, tidak ada yang mengganggu pemerintah, dapat mengatur rakyatnya dengan mudah, kecil kemungkinan munculnya konflik besar, dan lain sebagainya.
- b. Kekurangan : dianggap sebuah negara yang tertutup, kurangnya informasi yang ada di luar(internasional), ekonomi yang sulit untuk tumbuh, pemerintahan yang tidak dapat berkembang, sulitnya kebebasan berpendapat, dan lain sebagainya.

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Imamal-haq et al., "REPUBLIK DEMOKRATIS LAOS (Lao People ' s Democratic Republic)," 12.

BAB VII

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA KAMBOJA

A. Sejarah Terbentuknya Negara

Kamboja adalah ¹⁴ monarki konstitusional di Asia Tenggara, penerus **Kekaisaran Khmer**. Kamboja berbatasan dengan Thailand (di sebelah barat), Laos (di sebelah utara), Vietnam (di sebelah timur) dan Teluk Thailand (di sebelah selatan). Sungai Mekong dan danau Tonle Sap melintasi negara. Kamboja, juga dikenal sebagai Kamboja (Khmer), Kamboja (Prancis), Kamboja (Inggris), adalah sebuah negara yang terletak di bagian barat daya Semenanjung Indochina.⁷⁹

Pada masa pra-kolonial, Kamboja merupakan kerajaan yang luas membentang dari Laut Cina Selatan hingga perbatasan Burma, namun saat ini Kamboja hanyalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara, seluas sekitar 181.035 kilometer persegi 50 persen wilayahnya adalah gurun pasir yang masih belum terjamah, sehingga sangat berguna sebagai tempat persembunyian gerilya dari pendudukan musuh.

Perkembangan peradaban Kamboja terjadi ⁹ pada abad ke-1 Masehi. Pada abad ke-3, dan ke-5M, negara Funan dan Chenla bergabung membentuk wilayah Kamboja. Negara-negara ini memiliki hubungan dekat dengan Cina

⁷⁹ Fahri Zulfikar, "Negara Kamboja: Ibu Kota, Bentuk Pemerintahan, Dan Letak Geografisnya," *Detikedu*, last modified 2021, accessed November 26, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5664837/negara-kamboja-ibu-kota-bentuk-pemerintahan-dan-letak-geografisnya>.

dan India. Kekuatan kedua negara ini runtuh ketika Kerajaan Khmer diciptakan dan diperintah dari abad ke-8 hingga ke-13. Kekaisaran Khmer bertahan hingga abad ke-15. Ibukota Kerajaan Khmer terletak di Angkor, sebuah daerah yang dibangun pada masa kejayaan Khmer. Juga dibangun pada waktu itu, Angkor Wat menjadi simbol kekuatan Khmer.

Pada tahun 132, kerajaan Thailand menguasai Khmer. Dewan kerajaan Khmer memindahkan ibu kota dari Angkor ke Lovek, di mana kerajaan sangat diuntungkan karena Lovek adalah kota pelabuhan. Kemudian, orang Thailand dan Vietnam merebut pertahanan Khmer di Lovek, yang juga mengambil sebagian besar wilayah Khmer. Peristiwa ini terjadi pada tahun 159. Selama 3 abad berikutnya, raja-raja Thailand dan Vietnam memerintah Khmer secara bergantian.

Pada tahun 1863, Raja Norodom, yang ditunjuk oleh orang Thailand, mencari perlindungan di Prancis.⁸⁰ Pada tahun 1867, Raja Norodom menandatangani perjanjian dengan Prancis yang memberi Thailand kendali atas provinsi Battambang dan Siem Reap. Kedua wilayah tersebut kemudian diserahkan ke Kamboja pada tahun 1906 oleh Perjanjian Perbatasan Prancis-Thailand. Prancis menjadikan Kamboja sebagai protektorat antara tahun 1863 dan 1953 sebagai bagian dari koloni Indocina mereka.

⁸⁰ Angelina Septiani, "Nasionalisme Negara Kamboja," *Kompasiana.Com*, last modified 2021, accessed November 26, 2022, <https://www.kompasiana.com/angelinaseptiani0650/60cd9c0006310e7c59440672/nasionalisme-negara-kamboja>.

Kamboja Prancis adalah bagian dari koloni Kekaisaran Prancis protektorat di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 1863 ketika Raja Norodom dari Kamboja meminta Prancis untuk menjadikan Kamboja sebagai protektorat. Pada tahun 1867, Siam (Thailand) menyerahkan kedaulatan atas Kamboja dan Kamboja secara resmi diakui sebagai protektorat Prancis. Kamboja kemudian dimasukkan ke dalam Indochina Prancis pada tahun 1887 bersama dengan protektorat kolonial Prancis di Vietnam (Cochin China, Annam dan Tonkin).

Pada tahun 196, Kamboja diberikan otonomi oleh Uni Prancis, dan status protektoratnya dihapuskan pada tahun 199. Kamboja kemudian memperoleh kemerdekaan pada tahun 1953 di bawah Kesepakatan Jenewa setelah pendudukan Jepang pada tahun 190-an,⁸¹ Kamboja akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada bulan November. 9, 1953. Kamboja menjadi kerajaan konstitusional di bawah Raja Norodom Sihanouk.

Pada saat Perang Vietnam tahun 1960-an, Kerajaan Kamboja memilih untuk netral. Hal ini tidak dibiarkan oleh petinggi militer, yaitu Jendral Lon Nol dan Pangeran Sirik Matak yang merupakan aliansi pro-AS untuk menyingkirkan Norodom Sihanouk dari kekuasaannya. Dari Beijing, Norodom Sihanouk memutuskan untuk beraliansi dengan gerombolan Khmer Merah, yang bertujuan untuk menguasai kembali tahtanya yang direbut oleh Lon Nol. Hal inilah yang memicu perang saudara timbul di Kamboja.

⁸¹ Oleh M Budiana, "POLITIK DAN PEMERINTAHAN SERTA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KERAJAAN KAMBOJA" (2013): 366, <http://files/70/Budiana - 2013 - POLITIK DAN PEMERINTAHAN SERTA PELAKSANAAN PEMILIH.pdf>.

Khmer Merah akhirnya menguasai wilayah itu pada tahun 1975 dan mengubah kerajaan itu menjadi Republik Demokratik Kamboja di bawah Pol Pot. Mereka segera memindahkan penduduk kota ke pertanian kolektif di pedesaan. Pemerintah baru menginginkan produk pertanian yang sama seperti di abad 11. Mereka menolak pengobatan barat, itulah sebabnya orang Kamboja kelaparan dan tidak ada obat sama sekali di Kamboja.

Pada November 1978, RD Vietnam menginvasi Kamboja untuk mengakhiri genosida besar-besaran di Kamboja. Akhirnya, pada tahun 1989, perdamaian mulai menetap di Paris antara kedua pihak yang bertikai. PBB memerintahkan gencatan senjata antara Norodom Sihanouk dan Lon Nol. Saat ini, Kamboja mulai berkembang setelah perang, berkat bantuan banyak pihak asing, meskipun stabilitas negara itu kembali terguncang setelah kudeta yang gagal tahun 1997.

Keadaan Geografis di Kamboja

Kondisi geografis Kamboja Menurut Oktavina Yohana Pottu dan Chontina Siahaan dalam jurnal Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Kul Preah Vihear (2021), berikut letak geografis negara Kamboja:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Laos
- b. Sebelah timur dengan Vietnam
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Thailand
- d. Sebelah barat dengan Thailand.

Dilansir dari *Encyclopaedia Britannica*, kondisi geografis negara Kamboja didominasi oleh tanah dataran dan sungai besar. Kamboja berada di tengah

jalur perdagangan darat dan sungai yang menghubungkan Cina ke India serta Asia Tenggara.

Dikutip dari situs Country Reports, kondisi geografis Kamboja terdiri atas dataran datar, serta dataran rendah yang dialiri Danau Tonle Sap, Sungai Mekong, dan Sungai Bassac. Dataran rendah di Kamboja memiliki sejumlah ciri, yaitu: Sawah datar yang terlihat tak berujung Ladang yang dipenuhi alang-alang serta rerumputan tinggi Ladang tanaman yang ditumbuhi jagung, tembakau, wijen, serta tapioka.

Kawasan danau dan sungai di Kamboja didominasi hutan lebat. Namun sejak terjadi penebangan besar-besaran, baik legal maupun ilegal, area hutan mulai berkurang. Daerah pegunungan di Kamboja terletak di bagian barat daya, selatan, dan utara. Mayoritas pegunungan itu memiliki ketinggian kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Pada area tersebut, hutan lebat lebih banyak dijumpai ketimbang di dataran rendah. Misalnya hutan cemara berdaun lebar serta hutan bambu.⁸²

B. Bentuk Pemerintahan Negara Kamboja

¹⁴ Berdasarkan konstitusi 1993, Kamboja adalah negara kerajaan yang menganut sistem demokrasi liberal, pluralisme dan ekonomi pasar. Raja Kamboja menjabat Kepala Negara menjabat sebagai Kepala Negara, tetapi

⁸² Vanya Karunia Mulia Putri, "Kondisi Geografis Negara Kamboja," *KOMPAS.Com*, last modified 2022, accessed November 26, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/30/070000169/kondisi-geografis-negara-kamboja>.

¹⁴ tidak memerintah. Pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri dengan dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam Dewan Menteri (Council of Minister). Kepala Negara Norodom Sihamoni naik tahta pada tanggal 29 Oktober 2004. Sistem Monarki Konstitusional yang dianut oleh Negara Kamboja memberikan kekuasaan kepada raja sebagai penentu kebijakan Negara justru tidak memberikan peluang bagi perkembangan demokrasi, meskipun raja telah berusaha keras untuk tidak memasuki koridor politik namun jika menyangkut masyarakat banyak, ia tidak bias tinggal diam.

¹⁸ Sedangkan bentuk negara adalah Kesatuan. Kamboja terbagi atas 24 propinsi (disebut khett, yang masing-masing dipimpin oleh gubernur yang diangkat selaku kepala administrasinya dan 1 munisipal (disebut krong). Di bawah propinsi terdapat organ-organ komunitas lokal yang sejak tahun 2002 telah memilih dewan-dewan lokal untuk mengurus komunitas masing-masing. Hingga saat ini, Kamboja terus mengupayakan dekonsentrasi-dekonsentrasi wewenang. Propinsi-propinsi di Kamboja adalah: (1) Banteay Meanchey, (2) Battambang, (3) Kampong Cham, (4) Kampong Chhnang, (5) Kampong Speu, (6) Kampong Thom, (7) Kampot, (8) Kandal, (9) Kep, (10) Koh Kong, (11) Kratie, (12) Mondolkiri, (13) Oddar Meanchey, (14) Pailin, (15) Preah Vihear, (16) Prey Veng, (17) Pursat, (18) Ratanakiri, (19) Siem Reap, (20) Sihanoukville, (21) Stung Treng, (22) Svay Rieng, dan (23) Takeo serta 1 propinsi yaitu Phnom Penh.⁸³

⁸³ Budiana, "POLITIK DAN PEMERINTAHAN SERTA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KERAJAAN KAMBOJA."

18

Sistem pemerintahan adalah Parlementer. Administrasi negara dijalankan oleh Dewan Menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri (PM). Dewan Menteri dibentuk pasca pemilu yang diikuti para parpol. Para menteri (tergabung dalam Dewan menteri) tidak hanya bertanggung jawab pada PM melainkan juga National Assembly (NA). Bentuk parlemen adalah Bikameral (National Assembly + Senate). NA adalah organ utama legislatif. Anggota sekitar 123 orang yang dipilih secara luber. Kandidatnya berasal dari para parpol. Wewenangnya secara umum serupa dengan ideal peran badan legislatif secara teoretik. Senate anggotanya tidak boleh lebih dari

Berdasarkan ketentuan Undang Undang Dasar-nya, Kamboja adalah sebuah negara kerajaan monarki konstitusional dengan sistem trias politica. Posisi Raja di negara Kamboja adalah kepala negara seumur hidup, panglima tertinggi tentara negara, lambang kesatuan dan keabadian negara. Setelah raja wafat, Komisi Takhta Kerajaan 9 Orang yang terdiri dari perdana menteri, pemimpin kedua faksi Buddhis, ketua dan wakil ketua Senat dan Majelis Nasional akan memilih raja baru dari keturunan raja.⁸⁴

Bentuk pemerintahan negara Kamboja adalah kerajaan. Negara dipimpin oleh raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Kamboja memiliki lima pemerintahan lokal dengan ibu kota Phnom Penh. Kamboja pernah dijajah oleh Prancis, lalu merdeka pada 17 April 1953. Kamboja adalah negara yang sejak tahun 1970 dirundung malang, dan porak poranda karena kudeta. Pada tanggal 18 Maret 1970, sewaktu Pangeran

⁸⁴ Zulfikar, "Negara Kamboja: Ibu Kota, Bentuk Pemerintahan, Dan Letak Geografisnya."

Sihanouk pergi ke luar negeri, keponakannya Pangeran Sisowath Sirik Matak bersama Lon Nol melakukan kudeta. Semenjak itu kemelut semakin besar di negara Kamboja. Bahasa resmi penduduk Kamboja adalah bahasa Khmer.⁸⁵

⁸⁵ M. Budiana, "Politik Dan Pemerintahan Serta Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kerajaan Kamboja," *Jurnal Online Westphalia* 12, no. 2 (2013): 365–378.

C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Di Kamboja

Ditinjau dari sudut politik, negara yang mempunyai nama resmi Republik Kampuchea (Sathearanakrath Pracheachea Kampuchea) ini, merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang paling sering mengalami ketidakstabilan politik. Negara ini sejak dulu selalu mengalami konflik-konflik politik yang cukup serius sebagai akibat persaingan kekuasaan di kalangan elit politik yang ada.

Hampir setiap kali terjadi pertentangan, salah satu di antara mereka selalu meminta bantuan negara tetangganya yaitu Vietnam dan Muangthai guna membantu memenangkan pertentangan tersebut. Ketidakstabilan politik tersebut mencapai puncaknya ketika pada tahun 1970-an negara Kamboja di bawah pemerintahan PolPot yang dikenal sebagai rejim kaku, keras, brutal, dan banyak memusuhi rakyatnya sendiri.⁸⁶

Berikut ini beberapa bentuk pemerintahan dan proses pergantiannya sebelum pemerintahan Pol Pot di Kamboja tahun 1975-1979:

1. Kamboja di bawah Pemerintahan Sihanouk

Pangeran Norodom Sihanouk yang mempunyai nama lengkap Pangeran Samdech Preah Norodom Sihanouk lahir di Phnom Penh pada tanggal 31 Oktober 1922. Sihanouk memulai karir politiknya sejak usia 18 tahun, yaitu ketika ia diangkat menjadi raja oleh Perancis untuk menggantikan kakeknya yaitu raja Monivong yang meninggal. Pada awal masa

⁸⁶ Ibid.

pemerintahannya sistem politik di Kamboja masih didominasi oleh Perancis.

Hal ini disebabkan karena Kamboja masih berada di bawah kekuasaan Perancis. Sementara itu, sebagai penguasa Pangeran Sihanouk tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Perancis karena dengan jasa Perancislah Sihanouk dapat menjadi raja di Kamboja. Pada tahun 1940-an terjadi perubahan drastis dalam sistem kolonialisme Perancis di seluruh dunia. Perubahan drastis tersebut disebabkan karena kekalahan

Perancis dalam menghadapi serbuan Jerman. Kekalahan Perancis ini menyebabkan posisinya di negara-negara jajahan melemah. Sehubungan dengan melemahnya posisi Perancis di negara-negara jajahan termasuk juga di wilayah Asia, maka dengan mudah Jepang mengambil alih kekuasaan Perancis di wilayah Asia khususnya kawasan Indocina.

Dengan berkuasanya kembali Perancis di wilayah Kamboja, hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di antara kalangan elit politik yang ada, yaitu mengenai langkah yang harus dipilih Kamboja guna mencapai kemerdekaan dari Perancis.

2. Kamboja di bawah Pemerintahan Lon Nol

Jenderal Lon Nol lahir di propinsi Prey Veng Kamboja pada tanggal 13 November 1913. Sejak kecil Lon Nol tergolong anak yang cerdas. Berkat kecerdasan itulah Lon Nol sukses dalam bidang politik. Hal ini dapat dilihat pada masa kekuasaan kolonial Perancis, tepatnya pada tanggal 1945 ia diangkat menjadi gubernur di Propinsi Kratie.

Selanjutnya pada tahun 1952 Lon Nol ditunjuk menjadi pemimpin sebuah delegasi perundingan antara Kamboja dengan Muangthai guna membahas pengembalian wilayah Battambang. Selain sukses dalam bidang politik, Lon Nol juga sukses dalam bidang militer. Hal ini terbukti pada tahun 1961 Lon Nol menyanggah pangkat tiga bintang yang setara dengan jenderal dan selanjutnya ia oleh Sihanouk diangkat menjadi menteri pertahanan sekaligus merangkap sebagai panglima angkatan bersenjata (Editor, 23 Juli 1988: 10). Ketika pada tahun 1970 di Kamboja terjadi krisis akibat pembomaran yang dilakukan Amerika Serikat terhadap pangkalan Vietkong di daerah perbatasan Vietnam-Kamboja.

Lon Nol ditunjuk oleh Pangeran Sihanouk menjadi kepala pemerintahan sementara guna menggantikan dirinya yang sedang pergi ke Perancis dalam rangka kunjungan kenegaraan (Tempo, 20 Januari 1979: 10). Kepergian Pangeran Sihanouk ke Perancis dipandang sebagai waktu yang tepat oleh kelompok Lon Nol dan Sirik Matak untuk menggulingkan Sihanouk dari kursi pemerintahan di Kamboja.

3. Masa Pemerintahan Khmer Merah-Pol Pot

Pada tahun 1975 hingga 1979 merupakan masa-masa kelam bagi rakyat Kamboja ketika pemerintahan dikuasai Pol Pot dibawah rezim Khmer Merah. Khmer Merah menduduki tampuk kekuasaan setelah

berhasil menggulingkan Republik Khmer Lon Nol pada 17 April 1975. Jatuhnya rezim Lon Nol memberikan secercah harapan baru bagi penduduk Kamboja untuk mencapai kedamaian setelah terjebak dalam perang saudara sejak 1967. Namun kenyataannya, rezim Pol Pot dengan kebijakannya justru menambah panjang penderitaan rakyat.⁸⁷

Khmer Merah (Bahasa Perancis: Khmer Rouge) adalah cabang militer Partai Komunis Kampuchea (nama Kamboja kala itu). Pada tahun 1960an dan 1970-an, Khmer Merah melakukan perang gerilya melawan rezim Sihanouk dan Marsekal Lon Nol. Pada 17 April 1975, Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot berhasil menggulingkan kekuasaan dan menjadi pemimpin Kamboja. Hanya dalam beberapa hari saja, rezim baru ini telah menghukum mati sejumlah besar rakyat Kamboja yang tadinya bergabung dengan rezim Lon Nol.

Penduduk Phnom Phen dan juga penduduk di provinsi lain terpaksa keluar dari kota dan pindah ke daerah-daerah penampungan. Phnom Phen menjadi kota mati. Seluruh perekonomian di seluruh negeri berubah di bawah garis keras komunis, Uang hilang dari peredaran. Akibat dari semua itu adalah terjadinya kelaparan dan wabah penyakit di daerah tersebut.

Selama 44 bulan berikutnya, jutaan orang Kamboja menjadi korban teror dari Khmer Merah. Para pengungsi yang berhasil lari ke Thailand menceritakan kekejaman kelompok ini yang antara lain menghukum mati

⁸⁷ Diana Yulianty, "PEMERINTAHAN KHMER MERAH DI KAMBOJA DAN KEJATUHANNYA (1975—1979)" (2009): 89, <http://files/84/Yulianty - 2009 - PEMERINTAHAN KHMER MERAH DI KAMBOJA DAN KEJATUHANN.pdf>.

anak-anak⁹ hanya karena mereka tidak lahir dari keluarga petani. Selain itu orang-orang keturunan Vietnam dan Cina juga turut diteror dan dibunuh. Siapa saja yang disangka sebagai orang yang berpendidikan, atau menjadi anggota dari keluarga pedagang pasti dibunuh dengan cara dipukul sampai mati, bukan dengan ditembak dengan dalih untuk menghemat amunisi.

4. Killing Fields (Ladang Pembantaian)

Masa empat tahun Pol Pot dan Khmer Merahnya berkuasa di Kamboja, adalah masa yang membuat seluruh dunia geger. Khmer Merah berupaya mentransformasi Kamboja menjadi sebuah negara Maois dengan konsep agrarianisme. Rezim Khmer juga menyatakan, tahun kedatangan mereka sebagai "Tahun Nol" (Year Zero). Mata uang, dihapuskan. Pelayanan pos, dihentikan. Kamboja diputus hubungannya dengan luar negeri. Hukum Kamboja juga dihapuskan.

⁹ Rezim Khmer Merah dalam kurun waktu tersebut diperkirakan telah membantai sekitar dua juta orang Kamboja. Ada sekitar 343 "ladang pembantaian" yang tersebar di seluruh wilayah Kamboja. Choeung Ek adalah "ladang pembantaian" paling terkenal. Di sini, sebagian besar korban yang dieksekusi adalah para intelektual dari Phnom Penh, yang di antaranya adalah: mantan Menteri Informasi Hou Nim, profesor ilmu hukum Phorng Ton, serta sembilan warga Barat termasuk David Lioy Scott dari Australia.⁹ Sebelum dibunuh, sebagian besar mereka didokumentasikan dan diinterogasi di kamp penyiksaan Tuol Sleng.

Penjara S-21 atau Tuol Sleng adalah organ rezim Khmer Merah yang paling rahasia. Pada 1962, penjara S-21 merupakan sebuah gedung SMA bernama Ponhea Yat. Semasa pemerintahan Lon Nol, nama sekolah diubah menjadi *Tuol Svay Prey High School*.

Tuol Sleng yang berlokasi di sub distrik Tuol Svay Prey, sebelah selatan Phnom Penh, mencakupi wilayah seluas 600 x 400 meter. Setelah Phnom Penh jatuh ke tangan Khmer Merah, sekolah diubah menjadi kamp interogasi dan penyiksaan tahanan yang dituduh sebagai musuh politik. Di “ladang pembantaian” ini, para intelektual diinterogasi agar menyebutkan kerabat atau sejawat sesama intelektual. Satu orang harus menyebutkan 15 nama orang berpendidikan yang lain.

5. Pemilu 2012

Partai Rakyat Kamboja (Cambodian People's Party), kembali memenangi pemilu pada tahun 2012. (Tempo.com, 31 Januari 2012). Partai pendukung Perdana Menteri Hun Sen ini meraih 77,81 persen. Sedangkan satu-satunya partai pesaing, Partai Sam Rainsy (Sam Rainsy Party), meraih 21,93 persen.

Pemilu ini untuk mengisi 57 dari 61 kursi di Senat Kamboja. Sedangkan empat kursi lainnya akan diisi lewat penunjukan oleh parlemen, Majelis Nasional, dan oleh Raja King Norodom Sihamoni. Pada pemilu 2012 ini partai oposisi Sam Rainsy meraih peningkatan jumlah suara, sehingga mampu meraih 11 kursi di Senat. Pada pemilu enam tahun lalu

(2006), partai ini hanya meraih 2 kursi, Partai Rakyat Kamboja meraih 45 kursi, dan partai Funcinpec meraih 10 kursi.

Sam Rainsy, pendiri partai oposisi terbesar Kamboja, menyambut pencapaian sukses partainya. Menurut dia, pencapaian ini sangat berarti karena partainya bertarung sendirian melawan partai penguasa. Meskipun sistem pemilu dan pernyataan media sangat pro ke CPP (partai berkuasa), namun Sam Rainsy Party mampu meningkatkan perolehan kursi di parlemen dari 2 menjadi 11.

Kamboja, menerapkan sistem dua kamar untuk parlemennya, mengadakan pemilu setiap enam tahun sekali untuk memilih anggota senat. Namun senat tidak berkuasa untuk mengajukan veto atau bahkan mengamendemen legislasi dari Majelis Nasional.⁸⁸

⁸⁸ Budiana, "POLITIK DAN PEMERINTAHAN SERTA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DI KERAJAAN KAMBOJA."

D. Kelebihan Dan Kelemahan Bentuk Pemerintahan di Kamboja

Dengan berbagai fenomena yang ada di dalam tubuh pemerintahan yang ada di negara Kamboja tersebut membuat negara ini memiliki perjalanan sejarah yang cukup menarik untuk disimak. Namun juga dengan berbagai macam konflik yang ada, tentunya akan membawa dampak yang cukup signifikan bagi negara dan rakyatnya. Berikut beberapa dampak dari adanya konflik yang ada di dalam bentuk pemerintahan yang saat ini menganut monarki parlementer, yaitu :

1. Kelebihan

Kelebihan yang terjadi jika negara tersebut menganut sistem pemerintahan monarki parlementer yaitu:

- a. Kekuasaan pemimpin bersifat mutlak. Tidak terpengaruh oleh pihak manapun.
- b. Pemerintahan yang melibatkan satu pihak di dalam kepemimpinan mempersempit peluang terjadinya penyelewengan⁸⁹
- c. Rakyat akan mudah patuh kepada pemerintah

2. Kekurangan

Selain ada kelebihan tentunya juga ada kekurangan. Berikut kekurangan yang terjadi jika negara tersebut menganut sistem pemerintahan monarki parlementer yaitu:

⁸⁹ Admin, "Kelebihan Dan Kekurangan Monarki Parlementer," accessed November 26, 2022, <https://hasilcopa.com/kelebihan-dan-kekurangan-monarki-parlementer>.

- a. Pemerintahannya terpusat hanya pada satu pihak.
- b. Pemerintahan hanya boleh dipegang oleh keturunan.
- c. Adanya perbedaan kasta yang menyebabkan munculnya rasa ketidakadilan.⁹⁰
- d. Kurangnya kebebasan berpendapat
- e. Masih traumanya masyarakat terhadap kepercayaan kepada pemerintah
- f. Mudah terjadinya konflik internal pemerintahan

⁹⁰ Ibid.

BAB VIII

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA SINGAPURA

A. Sejarah Terbentuknya Negara

Nama Singapura berasal dari bahasa Melayu (Sansekerta 'Kota Singa'). Hari ini Singapura kadang-kadang disebut Kota Singa. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa singa mungkin tidak pernah ada di pulau itu. Makhluk yang dilihat oleh pendiri Singapura dan bernama San Nira Utama itu mungkin seekor harimau. Pada tanggal 28 Januari 1819, Thomas Stamford Raffles mendarat di pulau utama Singapura. Ia ditugaskan oleh *British East India Company* (EIC) untuk mencari lokasi strategis untuk pembangunan pelabuhan di muara Selat Malaka. Hegemoni Belanda kemudian digerogeti oleh serangkaian pergantian kekuasaan dan kebangkrutan. Pendudukan Perancis sampai dengan berdirinya VOC, Kerajaan Belanda di Hindia Belanda.

Raffles memutuskan bahwa seorang Inggris, dalam hal ini EIC, bersedia membantu Tenku Hussein naik takhta, menawarkan tunjangan tahunan dengan imbalan hak khusus untuk membangun pos perdagangan dan pelabuhan di Selatan. Bagian untuk memberikan Pulau Temasek di sisi timur Sungai Singapura hari ini.⁹¹

Singapura dikenal sebagai kota laut atau sea city. Catatan sejarah awal Singapura masih kabur, tetapi catatan Cina dari abad ke-3 M menyebut

⁹¹ Bambang Dharwiyanto Putro, "Cruel Temptation ': A Case Study of a Korean Drama and Its Reception in the Singaporean Community", no. 3 (2021): 29.

Singapura sebagai "Pura Chung" atau "pulau di ujung semenanjung". Ketika pemukiman pertama didirikan pada 1298-1299, kota ini dikenal sebagai Temasek ("Kota Danau").⁹² Pada abad ke-14, sebuah julukan baru diberikan kepada pulau kecil yang letaknya strategis ini. Legenda mengatakan bahwa Sang Nila Utama, seorang pangeran Palembang (ibukota Kerajaan Sriwijaya), pergi berburu ketika dia melihat seekor binatang yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mengambil ini sebagai pertanda baik, ia mendirikan kota di mana binatang itu ditemukan dan menamakannya Kota Singa atau Singapura setelah kata Sansekerta simha (singa) dan pura (kota).

Dalam puisi Jawa canggih *Negarakertagama* yang ditulis pada tahun 1365, Temasek disebutkan sebagai salah satu penaklukan Majapahit atas kerajaan Jawa. Sayangnya, Temasek mengalami kerusakan pada abad ke-14 dan digantikan oleh Malaka.⁹³

Sir Thomas Stamford Raffles dari British East India Company tiba di Singapura pada Januari 1819. Sekitar waktu itu, Raffles menemukan sebuah desa kecil di muara Sungai Singapura. Desa itu milik Kerajaan Johor yang dikuasai Belanda. Raffles membuat perjanjian dengan Johor dan kembali ke Bengkulu tidak lama kemudian. Singapura menjadi wilayah yang makmur di bawah pemerintahan kolonial Inggris. Padahal, mereka membangun pelabuhan yang sangat strategis.

⁹² Derek Heng and Syed Muhd Khairudin Aljunied, "Singapore in Global Histo" 14 (2014).

⁹³ Seruni Damayanti, "The Origin of Singapore(Asal Usul Negara Singapura)," *Majalahjustforkid.Com*,.

Kemerdekaan (sejak 1965)

Singapura secara resmi memperoleh kedaulatan pada 9 Agustus 1965. Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden, dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik Singapura.

Tahun 1990, Goh Chok Tong menggantikan Lee sebagai perdana menteri. Selama masa pemerintahannya, negara ini menghadapi Krisis Keuangan Asia 1997, wabah SARS, dan ancaman teroris oleh Jemaah Islamiyah. Tahun 2004, Lee Hsien Loong, putra sulung Lee Kuan Yew, menjadi perdana menteri Singapura. Di antara keputusannya yang terkenal adalah rencana membuka kasino untuk mendorong pariwisata

Pemerintahan

Singapura adalah sebuah republik parlementer dengan sistem pemerintahan *parlementer unikameral Westminster* yang mewakili berbagai konstituensi. Konstitusi Singapura menerapkan demokrasi perwakilan sebagai sistem politik negara ini. Partai Aksi Rakyat (PAP) mendominasi proses politik dan telah memenangkan kekuasaan atas Parlemen di setiap pemilihan sejak menjadi pemerintahan sendiri tahun 1959. Presiden Singapura, secara historis merupakan jabatan seremonial, diberikan hak veto tahun 1991 untuk beberapa keputusan kunci seperti pemakaian cadangan nasional dan penunjukan jabatan yudisial. Meski jabatan ini dipilih melalui pemilu rakyat, hanya pemilu 1993 yang pernah diselenggarakan sampai saat ini. Cabang legislatif pemerintah dipegang oleh parlemen. Pemilihan parlemen di Singapura memiliki dasar

pluralitas untuk konstituensi perwakilan kelompok sejak Undang-Undang Pemilihan Parlemen diubah tahun 1991.

Anggota parlemen (MP) terdiri dari anggota terpilih, non-konstituensi dan dicalonkan. Mayoritas MP terpilih melalui pemilihan umum dengan sistem pertama-melewati-pos dan mewakili Anggota Tunggal atau Konstituensi Perwakilan Kelompok (GRC). Singapura memiliki undang-undang dan hukuman termasuk hukuman badan hukum dalam bentuk cambuk untuk kejahatan seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan narkoba, vandalisme dan berbagai pelanggaran hukum imigrasi. Singapura juga membawa hukuman mati untuk pembunuhan tingkat pertama, penyelundupan narkoba dan kejahatan senjata api.

Amnesty International menyatakan bahwa "Banyak pasal dalam undang-undang penyalahgunaan zat dan senjata api mengandung praduga bersalah yang bertentangan dengan hak untuk dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah dan hak atas pengadilan yang adil. Singapura "mungkin memiliki tingkat eksekusi tertinggi di dunia untuk kejahatannya. populasi". Pemerintah menyatakan bahwa Singapura memiliki kedaulatan untuk mengarahkan sistem peradilan dan menjatuhkan hukuman yang dianggap pantas.

Hubungan luar negeri

Singapura memelihara hubungan diplomatik dengan 175 negara, beberapa di antaranya tidak memiliki komisi tinggi atau kedutaan. Singapura adalah

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Persemakmuran Bangsa-Bangsa, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok. Hubungan antara Malaysia dan Indonesia sangat penting karena alasan geografis yang jelas, tetapi politik dalam negeri ketiga negara sering mengancam hubungan antara kedua negara.

Singapura juga menjalin hubungan baik dengan beberapa negara Eropa, antara lain Perancis, Jerman dan Inggris, yang memiliki hubungan dengan Malaysia, Australia dan Selandia Baru melalui Five Power Defense Agreement (FPDA). Singapura juga memiliki hubungan baik dengan Amerika.

Militer

Meskipun ukurannya kecil, Singapura memiliki kekuatan militer paling maju di Asia Tenggara. Kementerian Pertahanan (MINDEF), sekarang dipimpin oleh Menteri Teo Chee Heng, mengawasi Angkatan Darat Singapura, Angkatan Laut Republik Singapura dan Angkatan Udara Singapura, secara kolektif disebut sebagai Angkatan Bersenjata Singapura, dengan perusahaan sukarelawan swasta sebagai badan-badan anak perusahaan. Panglima Angkatan Pertahanan Singapura adalah Letnan Jenderal Neo Kiang Hong.

Singapura memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan beberapa negara, terutama Perjanjian Pertahanan Lima Kekuatan. Kami memiliki jaringan pelatihan yang luas di Amerika Serikat, Australia, Republik Tiongkok (Taiwan), Selandia Baru, Prancis, Thailand, Brunei, India, dan Afrika Selatan. Sejak tahun 1980, konsep dan strategi 'Total Defense' telah diterapkan pada

semua aspek keamanan untuk memperkuat Singapura terhadap segala jenis ancaman.

Ekonomi

Ekonomi Singapura Peringkat 10 Negara Paling Terbuka, Kompetitif dan Inovatif di Dunia] ekspatriat yang bekerja untuk berbagai perusahaan multinasional di Singapura. Selain itu, ada ratusan ribu tenaga kerja asing. Pada tahun 2001, PDB negara itu turun menjadi 2,2% sebagai akibat dari resesi global dan penurunan di sektor teknologi. Economic Perusahaan terbatas Singapura adalah badan hukum yang terpisah dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas kewajiban perusahaan yang melebihi total modal saham yang diinvestasikan.⁹⁴

B. Bentuk Pemerintahan Negara Singapura

Bentuk pemerintahan Singapura adalah republik parlementer demokratik yang representatif. Kepala negara di Singapura adalah Presiden. Pemerintah dipimpin oleh Kabinet, yang dipimpin oleh Perdana Menteri, yang merupakan kepala pemerintahan. Singapura memiliki sistem multi-partai. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Kabinet. Kabinet memiliki kekuasaan untuk mengontrol pemerintah dan bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen. Seperti kebanyakan negara di dunia saat ini, ia memiliki tiga Politik di Singapura telah didominasi oleh *People's Action Party* (PAP) sejak

⁹⁴ Ignatius Hubert Tantra, "Singapore, A Growing Economic Titan from South East Asia," *Jurnal Sentris* 2, no. 2 (2020): 42–54.

pemilihan umum 1959 (ketika Singapura menjalankan otonominya di dalam Kerajaan Inggris) ketika Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Singapura. PAP telah memenangkan setiap pemilihan sejak mengambil alih pemerintahan. Singapura meninggalkan Persemakmuran Inggris pada tahun 1963 dan bergabung dengan Federasi Malaysia, tetapi dikeluarkan dari Federasi pada tahun 1965 ketika Lee Kuan Yew menentang pemerintah federal di Kuala Lumpur.

Analisis kebijakan luar negeri dan beberapa partai oposisi, termasuk Partai Pekerja Singapura dan Partai Demokrat Singapura (SDP), berpendapat bahwa Singapura secara de facto adalah negara satu partai. The Economist Intelligence Unit mengklasifikasikan Singapura sebagai negara "hibrida" dengan unsur otoritarianisme dan demokrasi. *Freedom House* tidak menganggap Singapura sebagai 'demokrasi selektif' dan mengklasifikasikannya sebagai 'tidak sepenuhnya bebas'. Indeks Kebebasan Pers 2005 dari *Reporters Without Borders* menempatkan Singapura pada peringkat 140 dari 167 negara.⁹⁵ Ini menuduh PAP menggunakan sensor, kolusi dan mengajukan tuntutan hukum pencemaran nama baik untuk pencemaran nama baik atau terhadap oposisi untuk menghambat keberhasilan oposisi. Beberapa mantan anggota parlemen oposisi, termasuk Francis Seow,

⁹⁵ Putro, "" Cruel Temtation ': A Case Study of a Korean Drama and Its Reception in the Singaporean Community "".

JB Jeyaretnam dan Chee Soon Juan, percaya pengadilan Singapura mendukung pemerintah dan PAP atas kurangnya pemisahan kekuasaan.

Namun, ada tiga kasus di mana pemimpin oposisi Chiam Si Tung menggugat menteri PAP karena pencemaran nama baik. Sistem administrasi Singapura mirip dengan Inggris. Presiden seperti Ratu Inggris dan hanya jabatan seremonial. Namun Presiden merasa terhormat menjadi pengambil keputusan utama di Singapura. Dalam sistem politik Singapura, mirip dengan sistem pemerintahan Inggris, Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Meski aktivitasnya dominan, pemerintahannya bersih dan bebas korupsi. Singapura secara konsisten menempati peringkat sebagai negara terbersih di Asia dan masuk dalam daftar 10 negara terbersih di dunia oleh Transparency International. Indeks Tata Kelola Bank Dunia juga menilai kinerja Singapura di bidang supremasi hukum, antikorupsi, dan efektivitas pemerintahan. Namun banyak yang menilai Singapura kurang baik dari segi proses politik.

Meskipun hukum Singapura diadaptasi dari hukum Inggris, PAP menyatakan bahwa tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua demokrasi, dan bahwa nilai-nilai demokrasi liberal yang identik dengan budaya Barat telah secara konsisten menolak. Undang-undang tersebut membatasi kebebasan berbicara dan bertujuan untuk melarang ucapan yang mungkin berbahaya atau menyebabkan ketidakharmonisan dalam masyarakat multi-agama dan multi-etnis Singapura. Misalnya, pada bulan September 2005, tiga

blogger dihukum karena membuat komentar yang menghasut pada artikel rasis yang ditujukan untuk minoritas.

Beberapa kejahatan membawa denda berat dan hukuman cambuk, dan Singapura memiliki undang-undang yang memberikan hukuman mati untuk pembunuhan tingkat pertama dan perdagangan narkoba. *Amnesty International* telah mengkritik Singapura karena memiliki tingkat eksekusi per kapita tertinggi di dunia. Pemerintah Singapura menanggapi dengan mengklaim bahwa itu adalah negara berdaulat yang menjatuhkan hukuman mati untuk kejahatan berat.

a. Kabinet Singapura

Kabinet menentukan cabang ¹⁶ eksekutif dan bertanggung jawab kepada Parlemen. Kabinet terdiri dari anggota Parlemen dan diketuai oleh Perdana Menteri. Perdana menteri adalah kepala pemerintahan. Perdana menteri dipilih oleh parlemen. Anggota kabinet, juga disebut menteri, diangkat oleh presiden atas saran perdana menteri. Kabinet Singapura bersama-sama menentukan kebijakan pemerintah, menyajikan rancangan dan mempengaruhi undang-undang. 4.444 menteri Singapura termasuk di antara politisi dengan bayaran tertinggi di dunia. Pada tahun 2007 saya menerima kenaikan gaji 60%. Gaji Perdana Menteri Lee Hsien Loong naik menjadi S\$3,1 juta, lima kali lipat gaji Presiden Barack Obama sebesar \$400.000. Terlepas dari kemarahan publik atas gaji yang tinggi dibandingkan dengan ukuran negara yang diperintahnya, pemerintah percaya bahwa kenaikan gaji ini diperlukan untuk memastikan efisiensi dan status bebas korupsi dari pemerintah "kelas dunia" Singapura. .

Pada tanggal 21 Mei 2011, setelah pemilihan umum 2011, perdana menteri mengumumkan bahwa komisi untuk meninjau gaji politisi telah dibentuk dan gaji yang direvisi akan berlaku mulai tanggal tersebut.

b. Parlemen Singapura

Parlemen Singapura adalah badan legislatif Singapura yang dipimpin oleh Presiden. Sebelum kemerdekaan pada tahun 1965, itu dikenal sebagai Majelis Legislatif. Saat ini, parlemen terdiri dari 87 anggota yang menjabat selama lima tahun. Pemilihan kemudian harus diadakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum pembubaran parlemen.

c. Proses Legislatif

Sebelum undang-undang disahkan, terlebih dahulu diajukan ke DPR sebagai rancangan. RUU biasanya disebut tagihan pemerintah yang diperkenalkan oleh menteri atas nama Kabinet. Namun, setiap anggota parlemen dapat mengajukan draf. Semua RUU harus melalui tiga pembacaan di Kongres sebelum disetujui oleh Presiden untuk menjadi undang-undang di Kongres. Setiap rancangan melewati beberapa tahapan sebelum menjadi undang-undang. Tahap pertama, suatu bentuk yang dikenal sebagai bacaan pertama, diperkenalkan tanpa diskusi. Ini akan diikuti oleh pembacaan kedua di mana anggota parlemen membahas prinsip-prinsip umum draft. Jika Kongres menentang rancangan itu, itu bisa ditolak. Jika rencana itu lolos dari pembacaan kedua, RUU itu akan ditinjau paragraf demi paragraf.

Anggota parlemen yang mendukung rancangan tersebut tetapi tidak setuju dengan ketentuan tertentu dapat mengusulkan perubahan ketentuan pada tahap

ini. Begitu laporan tersebut kembali ke Parlemen, rancangan tersebut melewati pembacaan ketiga dengan hanya sedikit perubahan sebelum diadopsi. Sebagian besar draf lolos Kongres dan diperiksa oleh Dewan Presiden tentang Hak-Hak Minoritas, yang melapor kepada Ketua Kongres apakah draf tersebut berisi ketentuan yang memengaruhi komunitas dari berbagai ras dan agama. Jika Dewan setuju, rancangan tersebut akan diserahkan kepada Presiden untuk disetujui. Pada tahap akhir, rancangan formal harus mendapat ¹⁶ persetujuan presiden sebelum menjadi undang-undang.

d. Konstitusi Singapura

Konstitusi Singapura adalah hukum tertinggi Singapura. Konstitusi tidak dapat diubah tanpa dukungan dari lebih dari 2/3 dari anggota parlemen pada pembacaan kedua dan ketiga. Presiden dapat meminta pendapat tentang isu-isu konstitusional dari pengadilan yang terdiri tidak kurang dari tiga hakim Pengadilan Agung. Bagian IV konstitusi menjamin:

- i. Kebebasan seseorang (terbatas)
- ii. Pelarangan perbudakan dan kerja paksa
- iii. Perlindungan yang sama
- iv. Larangan pembuangan dan kebebasan bergerak
- v. Kebebasan berbicara, berkumpul, dan berserikat (terbatas)
- vi. Kebebasan beragama (terbatas)
- vii. Hak atas pendidikan

Bagian XII konstitusi memungkinkan Parlemen Singapura untuk memberlakukan undang-undang yang dirancang untuk menghentikan atau

mencegah subversi. Undang-undang tersebut berlaku bahkan jika itu tidak sesuai dengan bagian IV konstitusi. Internal Security Act (ISA) adalah undang-undang di bawah ketentuan tersebut. Pada tahun 1966, Chia Thye Poh ditahan di bawah ISA dan dipenjarakan selama 23 tahun tanpa pengadilan. Setelah itu, ia ditempatkan dalam kondisi tahanan rumah selama sembilan tahun.

e. Presiden Singapura

16

Sebelum tahun 1991, presiden adalah kepala negara yang ditunjuk oleh parlemen. Sebagai hasil dari perubahan konstitusi pada tahun 1991, presiden sekarang dipilih langsung oleh suara rakyat dengan masa jabatan 6 tahun.

Syarat-syarat untuk menjadi calon Presiden Singapura adalah:

- i. Merupakan warga negara Singapura
- ii. Berusia 45 tahun ke atas pada hari nominasi
- iii. Terdaftar sebagai pemilih terdaftar saat pemilihan
- iv. Merupakan penduduk Singapura pada hari nominasi dan telah menjadi penduduk Singapura selama tidak kurang dari 10 tahun
- v. Tidak memenuhi salah satu diskualifikasi dalam pasal 45 Undang-Undang Dasar Republik Singapura
- vi. Bukan anggota salah satu partai politik pada tanggal pencalonannya untuk pemilihan
- vii. Telah menjabat untuk jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun di posisi senioritas dan tanggung jawab di sektor publik atau swasta seperti: Hakim Agung, Pembicara, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pelayanan Publik, Auditor

Umum, Akuntan Jenderal, atau Sekretaris Tetap. sebagai ketua atau kepala eksekutif dari dewan resmi negara seperti yang tercantum pada pasal 22A Konstitusi Republik Singapura, sebagai ketua dewan direksi atau CEO sebuah perusahaan yang didirikan atau didaftarkan berdasarkan Companies Act (Pasal 50) dengan modal disetor minimal \$100 juta atau setara dengan uang asing, atau dalam posisi senioritas lainnya yang sama atau sebanding. Hal tersebut dianggap telah memberi pengalaman dan kemampuan dalam mengatur dan mengelola urusan keuangan untuk memungkinkan dia untuk melaksanakan secara efektif fungsi dan tugas dari Presiden.

f. Yudikatif

Yurisdiksi di Singapura dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan di bawah Konstitusi Singapura. Mahkamah Agung terdiri dari Pengadilan Banding dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi menangani banding pidana dan perdata, dan Pengadilan Tinggi menangani yurisdiksi pidana dan perdata. Ketua Mahkamah Agung, Hakim Banding, Jaksa Agung, dan Hakim Agung diangkat oleh Presiden dari antara calon yang diusulkan oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri harus berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung sebelum merekomendasikan hakim.

g. Pemilihan dan Partai Politik di Singapura

Pemilihan umum diwajibkan di Singapura sejak 1959. Usia pemilih yang sah adalah 21 tahun. Departemen Pemilihan Singapura bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan pemilihan baik pemilihan

presiden, parlemen, dan setiap referendum nasional di Singapura. Departemen ini berada di bawah Perdana Menteri.

C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan Di Singapura

Singapura merupakan salah satu negara berbentuk republik parlementer di Asia Tenggara. Singapura dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan seorang Presiden sebagai kepala negara, dan sistem politik Singapura meniru sistem Westminster. Secara umum, model pemerintahan Singapura dibagi menjadi tiga departemen independen: Parlemen bertanggung jawab atas legislatif (terdiri dari Presiden dan Parlemen), eksekutif (terdiri dari menteri dan birokrat yang dipimpin oleh Perdana Menteri), yudikatif, atau merancang undang-undang negara bagian. Eksekutif bertugas menegakkan hukum dan yudikatif bertugas menafsirkan hukum melalui pengadilan. Kepala pemerintahan di Singapura adalah Perdana Menteri. Lee Hsien Loong saat ini adalah Perdana Menteri Singapura. Di Singapura, kepala negara adalah presiden.

Ketika Singapura menjadi negara berdaulat yang merdeka pada tahun 1965, Singapura mewarisi sistem hukum berdasarkan hukum Inggris, menurut situs web Kantor Perdana Menteri Singapura.⁹⁶ Sistem hukum telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan bangsa Singapura dan untuk mencerminkan sistem politik di mana ia berfungsi. Pada November 1993, Undang-Undang Penegakan Inggris mulai berlaku.

⁹⁶ Dianti Ayunisa Rahmasari, "GAYA KEPEMIMPINAN HALIM1AH YACOB SEBAGAI PRESIDEN SINGAPURA" (2022): 0–13.

Undang-undang ini menjelaskan penerapan hukum dan peraturan Inggris di Singapura. Badan-badan pemerintah diatur oleh hukum tertinggi Singapura, Konstitusi Tertulis. Konstitusi menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka dasar untuk tiga organ negara: eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kepala negara Singapura adalah presiden, dipilih langsung oleh rakyat setelah reformasi konstitusi radikal pada tahun 1991. Presiden memiliki hak veto tertentu atas pemerintah, dan Presiden memiliki wewenang untuk melaksanakan dalam keadaan tertentu. Kecuali di bidang- bidang di mana Konstitusi memberikan keleluasaan kepada

Presiden, Presiden harus bertindak atas rekomendasi Kabinet. Sementara itu, Perdana Menteri Singapura diangkat oleh Presiden Singapura sesuai dengan Pasal 25 Konstitusi. Presiden juga mengangkat menteri lain dari antara anggota Parlemen atas saran Perdana Menteri. Perdana menteri adalah kepala cabang eksekutif pemerintah yang berlaku. Perdana Menteri mengepalai Kabinet, yang diatur berdasarkan Pasal 24 Konstitusi. Kabinet adalah badan pembuat keputusan pusat dari cabang eksekutif. Ini adalah lembaga nasional dan pusat sistem pemerintahan Singapura, dalam praktiknya semua keputusan atau tindakan penting dari Cabang Eksekutif pertama-tama dibahas dan disahkan bersama oleh Kabinet.

Halimah Yacob terpilih tanpa lawan karena ia adalah satu-satunya calon presiden yang memenuhi persyaratan pada saat itu. Meskipun Halimah Yacoub adalah seorang wanita, Halimah Yacoub memiliki gaya kepemimpinan yang dapat membawa Singapura ke level yang lebih tinggi.

Kepemimpinan dianggap sangat penting karena keberhasilan suatu bangsa diukur dari kinerja kepala negara. Kepemimpinan adalah kekuatan atau kualitas yang dimiliki seorang individu sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin pada dasarnya adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok lain dengan alasan apapun. Sebuah organisasi atau negara dapat berhasil mencapai tujuannya dengan melihat seseorang memimpin organisasi atau negara tersebut. Kedudukan laki-laki dan perempuan masih menjadi persoalan, bahwa wanita belum dianggap pantas.

Memilih orang dengan keturunan melayu untuk menjadi orang penting di Singapura merupakan salah satu aturan pemilihan presiden yang baru.⁹⁷ Dalam sejarah kepemimpinan Singapura, telah 7 kali pergantian presiden, dimana 7 kali, pergantian Singapura selalu dipimpin oleh laki-laki. Sejak awal kemerdekaan Singapura, presiden dan para menteri-mentri selalu dipimpin oleh laki-laki sedangkan perempuan menjadi salah satu anggota pemerintahan. Namun, pertama kalinya, Singapura dipimpin oleh seorang presiden perempuan.

⁹⁷ Rizky Dwijayanti, "Kontestasi Triple Minority Pada Diri Halimah Yacob Pada Pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 Ditinjau Dari Prespektif Politik Identitas," *Jurnal Unair* (2018): 14, https://repository.unair.ac.id/79892/3/JURNAL_TP.34_18_Dwi_k.pdf.

13 Penetapan syarat dengan modal tersebut agar memperoleh calon-calon yang bersungguh bisa memimpin dan mengelola negara. Dilansir dari situs Kantor Perdana Menteri Singapura, ketika menjadi negara yang merdeka dan berdaulat pada tahun 1965, Singapura mewarisi sistem hukum yang didasarkan pada hukum Inggris. Sistem hukum telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan negara Singapura dan untuk mencerminkan sistem politik di mana ia beroperasi.⁹⁸ Pada bulan November 1993, Penerapan Undang-Undang Hukum Inggris mulai berlaku. Undang-undang ini menjelaskan tentang penerapan hukum dan undang-undang Inggris di Singapura.

Dalam wawancara dengan media Singapura *Channel News Asia*, Halimah mengaku tidak berpikir untuk terjun ke dunia politik pada awalnya. Halimah juga tidak menyangka akan mencalonkan diri sebagai presiden. Halimah memasuki dunia politik atas prakarsa Perdana Menteri Singapura saat itu, Goh Chok Tong. Dia adalah kandidat dalam pemilihan parlemen dan telah memenangkan empat pemilihan parlemen sejak 2001. Halimah mewakili daerah pemilihan Jurong dan Marsiling-Yew Tee.⁹⁹

⁹⁸ Annisa Fitriani, "Gaya Kepemimpinan Perempuan," *Jurnal TAPIS* 11, no. 2 (2015): 24.

⁹⁹ Novi Christiastuti, "Fakta-Fakta Halimah Yacob, Muslimah Yang Jadi Presiden Singapura," *Detiknews*, last modified 2017, accessed November 26, 2022, <https://news.detik.com/internasional/d-3641453/fakta-fakta-halimah-yacob-muslimah-yang-jadi-presiden-singapura>

D. Kelebihan Dan Kelemahan Kepemimpinan Halimah Yacob

Halimah yacob dikenal sebagai sosok pemimpin yang muslimah yang taat, menggunakan hijab untuk sehari-hari. Beliau merupakan sosok perempuan yang mempunyai gelar ibu dan memiliki pengalam kerja yang banyak. Pengalaman kerja halimah yang banyak dan yang akhirnya menjadi seorang Presiden. Halimah juga memperjuangkan hak perempuan dan hak kerja. Hak perempuan dan hak pekerja yang ada di Singapura perlu adanya perjuangan. Halimah memperjuangkan hak-hak perempuan dengan cara memperjuangkan hak perempuan dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).¹⁵ Halimah dikenal selalu memperjuangkan hak perempuan, pentingnya pelatihan bagi orang kurang pengalaman dalam pekerjaan. Seorang lansia yang perlu latihan untuk mendapatkan haknya dalam bekerja dan cara orang merawat lansia dan orang yang sakit jiwa.

Kelebihan dan kelemahan Halimah Yacob menjadi pemimpin Negara, sebagai berikut:

a. Kelebihan

Kelebihan Halimah selama memimpin Negara Singapura menjanjikan bahwa tidak ada ketimpangan pelayanan dari etnis yang berlatang belakang suku yang berbeda. Pada masa kepemimpinan sebelum Halimah terjadi pelayanan yang tidak rata. Halimah berjanji kejadian tersebut tidak akan terulang lagi selama masa jabatannya.

Semua akan disamaratakan sama seperti halnya hak-hak perempuan dan hak pekerjaan. Halimah juga mampu untuk selalu meningkatkan ekonomi Negara Singapura.

b. Kekurangan

Walaupun pernah ada pandangan yang kurang enak tentang terpilihnya Halimah Yacob sebagai presiden. Terlepas dari fakta Halimah sebagai mantan pemersatu yang sering tampil pada media, namun tetap lebih memilih menolak memberikan kita hak untuk memberikan suara atas terpilihnya Halimah.

Dalam konteks ini, menarik untuk dicatat program penghematan dari program penghematan di Prancis. Presiden Prancis Francois Hollande berhasil menggugah simpati publik dengan menurunkan tingkat kemewahan yang ditetapkan mantan Presiden Nicolas Sarkozy.¹⁰⁰

Kegagalan kepemimpinan berasal dari keyakinan bahwa metode yang terbukti membosankan adalah jalan yang harus ditempuh. Betapa malangnya menyandera kemalasan. Betapa banyak energi yang seharusnya berguna dalam mengurus orang-orang yang memberi amanah itu terbuang percuma untuk memuaskan keinginan segelintir orang.¹⁰¹

¹⁰⁰ Adriana Rodina Fallo, "KUALITAS PEMIMPIN DALAM ORGANISASI SERTA IMPLEMENTASINYA SECARA EMPIRIS DI INDONESIA," *JAP Undana* 17, no. 1 (2021): 14, <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKewjRml-Tr8v7AhXT6XMBHTaxDjsQFnoECA4QAQ&url=http%3A%2F%2Fpublikasi.undana.ac.id%2Findex.php%2Fjap%2Farticle%2Fview%2Fa883&usg=AOvVaw11xBcOHLRAzWxjF-9CcF1i>.

¹⁰¹ A Majid, "Belajar Dari Kegagalan Pemimpin," *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 12, no. 1 (2014): 6.

BAB IX

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA LAOS

A. Sejarah Negara

Sejarah Laos pada awal mulanya didominasi oleh Kerajaan Nanzhao, yang diteruskan pada ratus tahun ke-14 oleh kerajaan lokal Lan Xang yang berlanjut sampai ratus tahun ke-18, setelah Thailand menguasai kerajaan tersebut. Kemudian Perancis menguasai wilayah ini pada ratus tahun ke-19 dan menggabungkannya ke dalam Indochina Perancis pada 1893. Setelah penjajahan Jepang selama Perang Alam II, negara ini melepaskan diri pada 1949 dengan nama Kerajaan Laos di bawah pemerintahan Raja Sisavang Vong.

Keguncangan politik di negara tetangganya Vietnam membuat Laos menghadapi Perang Indochina Kedua yang semakin mulia (disebut juga Perang Rahasia) yang diproduksi menjadi faktor ketidakstabilan yang memicu lahirnya perang saudara dan beberapa kali kudeta. Pada 1975 kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam menendang pemerintahan Raja Savang Vatthana dukungan Amerika Serikat dan Perancis. Setelah mengambil alih negara ini, mereka mengganti namanya diproduksi menjadi Republik Demokratik Rakyat Laos yang masih berdiri sampai kala ini.¹⁰²

Penghuni asli Laos adalah orang-orang Austroasiatik, yang hidup dari berburu dan meramu sebelum datangnya masa pertanian. Para pedagang Laos,

¹⁰² "SEJARAH LAOS," <https://p2k.unkris.ac.id/>, last modified 2021, accessed November 26, 2022, http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Laos_42999_p2k-unkris.html.

yang cekatan dalam mengarungi sungai menggunakan kano, menggunakan jalur yang menembus pegunungan terutama sungai-sungai. Rute sungai yang paling penting adalah Mekong karena banyak anak sungainya memungkinkan para pedagang menembus jauh ke pedalaman, tempat mereka membeli hasil bumi seperti kapulaga, kapur barus, *sticklac* dan banyak makanan lainnya. (berarti: sejuta gajah) berdiri pada tahun 1353.

Laos merupakan negara yang dikelilingi oleh daratan dan sama sekali tidak memiliki akses dengan laut, kasus negara seperti ini biasanya disebut sebagai negara landlocked. Kebanyakan dari negara-negara penyandang negara landlocked merupakan negara yang berkembang dan mengalami perekonomian yang cukup sulit. Hal ini pula yang terjadi pada Laos sebagai negara berkembang dimana negara ini menjadi satu-satunya negara yang dikelilingi oleh daratan di Asia Tenggara. Dalam hal perekonomian, Laos juga dianggap sebagai negara yang perekonomiannya kurang baik dimana pendapatan nasional brutonya sebesar 1.130 dollar Amerika per kapita dan memiliki tingkat kemiskinan mencapai sebesar 26%.¹⁰³

Peran pemerintahan negara Laos dalam meningkatkan perekonomian adalah hal yang paling terpenting, dimana pemerintahan harus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat menolong perkembangan perekonomian Laos. Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Laos akan sangat berdampak besar

¹⁰³ C. D. Dayley, R., & Neher, *Southeast Asia in The New International Era*. United States (United States: Westview Press, 2013).

terhadap pemasukan negara Laos itu sendiri dan juga sebagai pengganti peran laut yang tidak dapat dijangkau.

Dilihat dari potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Laos terutama peninggalan-peninggalan sejarah serta fauna dan flora yang langka di Laos dapat membantu perkembangan sektor pariwisata di Laos. Jumlah hutan Laos sebagai negara landlocked juga merupakan sebuah ladang penghasilan yang luar biasa jika benar-benar dimanfaatkan secara bijak dan juga dikelola secara baik, maka Laos bisa mendapatkan peningkatan dalam pemasukan perekonomian. Sejak tahun 1993 telah adanya rencana pengembangan sektor pariwisata yang dimulai oleh kepemimpinan Nouthak Phoumsavanh. Nouthak sebagai Presiden kala itu telah merencanakan suatu kebijakan dimana Laos akan menjadikan 21% daratan Laos sebagai konservasi keanekaragaman hayati yang kemungkinan akan menjadi taman nasional yang paling terbesar di Asia Tenggara.¹⁰⁴

Dengan adanya potensi-potensi alam yang dipandang baik maka potensi itu pula harus dikelola secara perlahan tetapi juga pasti oleh pemerintah negara Laos serta pengelolaan yang terus-menerus akan memberikan dampak positif bagi pendapatan negara Laos. Kebijakan di sektor pariwisata terus berlanjut pada era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone. Pada era Khamtai sampai dengan Choummaly baru dikembangkan sektor pariwisata secara nyata dengan mengembangkan tempat-tempat wisata yang akan menjadi objek nasional Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata serta adanya peran

¹⁰⁴ M Stuart-Fox, *A History of Laos* (Australia: Cambridge University Press, 1997).

sektor pariwisata yang memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Laos melalui kebijakan berupa plan dan strategi-strategi lainnya.¹⁰⁵

Perkembangan ini berbeda jauh dengan kebijakan yang dikeluarkan sebelum era Khamtai yang hanya melakukan pengontrolan terhadap perusahaan wisata serta rencana pengembangan alam yang bertujuan untuk mendorong sektor pariwisata untuk berkembang.

Dengan adanya pula promosi tentang ecotourism yang dilakukan oleh pemerintahan Laos membuat adanya peningkatan tourist dari tahun 1995 yang hanya sebanyak 346.460 ribu orang menjadi 1 juta orang pada tahun 2005, bukan hanya peningkatan tourist tetapi sektor ini juga menyumbangkan lapangan pekerjaan untuk 18.000 masyarakat Laos.¹⁰⁶

Perkembangan pada sektor pariwisata yang semakin pesat dapat dilihat sampai kepemimpinan baru Laos sekarang ini. Dengan adanya kebijakan kebijakan yang berbeda dari kepemimpinan Khamtai Siphandon sampai pada era kepemimpinan Choummaly Sayasone telah menolong perekonomian Laos yang selama ini bisa dikatakan kurang baik. Sektor pariwisata juga berkontribusi dalam menyumbang pendapatan nasional sebanyak 7 sampai 9 persen pada tahun 2003.¹⁰⁷

Sebagai organisasi kawasan yang menaungi Laos dan ke-9 negara anggota lainnya, ASEAN tentu memiliki visi, prinsip dan tujuan yang selalu

¹⁰⁵ S Harrison, D., & Schipani, "Lao Tourism and Poverty Alleviation: Community-Based Tourism and the Private Sector," *Current Issues in Tourism* (2007): 194–230.

¹⁰⁶ T Butler, R., & Hinch, *Tourism and Indigenous Peoples: Issues and Implications* (United Kingdom(UK): Elsevier Ltd, 2007).

¹⁰⁷ Harrison, D., & Schipani, "Lao Tourism and Poverty Alleviation: Community-Based Tourism and the Private Sector."

mengedepankan kesetaraan dan persatuan negara-negara kawasan. Beberapa prinsip yang dimiliki ASEAN yakni menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN, saling berkomitmen dan bertanggung jawab dalam meningkatkan perdamaian, keamanan serta kemakmuran kawasan, dan berusaha menyelesaikan konflik maupun permasalahan melalui jalur damai dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota ASEAN. Kesamaan visi, tujuan dan prinsip tersebut kemudian mendorong lahirnya komunitas ASEAN atau yang lebih dikenal dengan nama Masyarakat ASEAN. menciptakan kawasan yang memiliki daya tahan ekonomi yang kuat. Terlepas dari krisis ekonomi sebagai faktor utama pembentukan masyarakat ASEAN, terdapat faktor lain seperti isu terorisme, kejahatan lintas batas, perdagangan narkoba, serta isu terkait kelestarian lingkungan hidup menjadi faktor penguat dibentuknya masyarakat ASEAN.

B. Bentuk Pemerintahan Negara Laos

Ibu Kota negara Laos adalah Vientiane. Bentuk pemerintahan negara Laos adalah Republik Komunis yang menganut sistem partai tunggal yaitu Partai Revolusioner Rakyat Laos (PRRL). Negara dengan ibu kota Vientiane didirikan pada tanggal 2 Desember 1975 dengan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan di Laos.

Sistem pemerintahan Laos adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai ¹¹ Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh National Assembly (NA) untuk masa bakti 5 tahun. Sementara Perdana Menteri dan anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA yang merupakan Majelis tipe Unikameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Pemilihan umum tanggal 20 Maret 2016 telah memilih 149 anggota NA periode 2016 - 2020.

Pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Y.M. Bounnhang VORACHITH sebagai Presiden/Kepala Negara dan Y.M. Thongloun SISOULITH sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan yang disahkan pada sidang ke-8 National Assembly dan telah mulai melaksanakan tugasnya pada Januari 2016.

Republik Demokratik Rakyat Laos berdiri pada 2 Desember 1975. Laos merupakan negara yang menganut sistem partai tunggal, yakni Partai Revolusioner Rakyat Laos/ The Lao People's Revolutionary Party (LPRR) dengan ideologi komunis dan mempunyai organisasi sayap yang bertugas mengatur kebijakan serta mengendalikan berbagai aspek kehidupan di negara ini. Seperti yang dilansir dari laman Kemlu, sistem pemerintahan Laos adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh National Assembly (NA) dengan masa bakti 5 tahun. Sementara itu, Perdana Menteri dan anggota kabinet ditunjuk secara langsung oleh Presiden atas persetujuan NA, yakni majelis bertipe

Unikameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Kini, pemerintahan negara Laos dipimpin oleh Thongloun Sisoulith sebagai Presiden/ Kepala Negara dan Phankham Viphavanh sebagai Perdana Menteri/ Kepala Pemerintahan yang telah mulai melaksanakan tugas sejak tahun 2021 sampai sekarang.

Dilihat dari potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh Laos terutama peninggalan-peninggalan sejarah serta fauna dan flora yang langka di Laos dapat membantu perkembangan sektor pariwisata di Laos. Jumlah hutan Laos sebagai negara landlocked juga merupakan sebuah ladang penghasilan yang luar biasa jika benar-benar dimanfaatkan secara bijak dan juga dikelola secara baik, maka Laos bisa mendapatkan peningkatan dalam pemasukan perekonomian. Sejak tahun 1993 telah adanya rencana pengembangan sektor pariwisata yang dimulai oleh kepemimpinan

Nouhak Phoumsavanh. Nouhak sebagai Presiden kala itu telah merencanakan suatu kebijakan dimana Laos akan menjadikan 21% daratan Laos sebagai konservasi keanekaragaman hayati yang kemungkinan akan menjadi taman nasional yang paling terbesar di Asia Tenggara (Stuart-Fox, 1997). Dengan adanya potensi-potensi alam yang dipandang baik maka potensi itu pula harus dikelola secara perlahan tetapi juga pasti oleh pemerintah negara Laos serta pengelolaan yang terus-menerus akan memberikan dampak positif bagi pendapatan negara Laos.

Kebijakan di sektor pariwisata terus berlanjut pada era Khamtai Siphandon sampai Choummaly Sayasone. Pada era Khamtai sampai dengan Choummaly baru dikembangkan sektor pariwisata secara nyata dengan mengembangkan tempat-tempat wisata yang akan menjadi objek nasional Laos dalam mengembangkan sektor pariwisata serta adanya peran sektor pariwisata yang memiliki potensi untuk mengurangi kemiskinan di Laos melalui kebijakan berupa

Dalam plan dan strategi yang dikembangkan pihak pemerintah juga melakukan kerjasama. Laos melakukan beberapa kerjasama dengan negara-negara di kawasan ASEAN seperti Thailand, Kamboja dan Myanmar dalam meningkatkan kapasitas dari sungai Mekong sebagai tempat wisata yang dapat mendatangkan *tourist*.¹⁰⁸ sehingga sungai Mekong bukan hanya sarana yang digunakan untuk melakukan perdagangan dengan negara negara tetangganya tetapi juga efektif sebagai tempat pariwisata yang bernilai tinggi. Dengan adanya pula promosi tentang ecotourism yang dilakukan oleh pemerintahan Laos membuat adanya peningkatan *tourist* dari tahun 1995 yang hanya sebanyak 346.460 ribu orang menjadi 1 juta orang pada tahun 2005, bukan hanya peningkatan *tourist* tetapi sektor ini juga menyumbangkan lapangan pekerjaan untuk 18.000 masyarakat Laos (Butler & Hinch, 2007)

¹⁰⁸ RIFLAN RIFALDI RIDWAN, "ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH LAOS PADA SEKTOR PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ERA KHAMTAI SIPHANDON-CHOUMMALY SAYASONE," <https://dspace.uui.ac.id> 63, no. 2 (2018): 1–3, http://forschungsunion.de/pdf/industrie_4_0_umsetzungsempfehlungen.pdf%0Ahttps://www.dfki.de/fileadmin/user_upload/import/9744_171012-KI-Gipfpapier-online.pdf%0Ahttps://www.bitkom.org/sites/default/files/pdf/Presse/Anhaenge-an-Pls/2018/180607-Bitkom.

Perkembangan pada sektor pariwisata yang semakin pesat dapat dilihat sampai kepemimpinan baru Laos sekarang ini. Dengan adanya kebijakan kebijakan yang berbeda dari kepemimpinan Khamtai Siphandon sampai pada era kepemimpinan Choummaly Sayasone telah menolong perekonomian Laos yang selama ini bisa dikatakan kurang baik. Sektor pariwisata merupakan penyumbang investasi luar negeri ketiga di Laos sebesar 8.76% setelah Electric Power sebesar.

65,13% dan Transport sebesar 9,22% pada tahun 1998 tepat setelah 10 tahun dibukanya kebijakan pariwisata di Laos (Sayo Yamauchi, 1999). Sektor pariwisata juga berkontribusi dalam menyumbang pendapatan nasional sebanyak 7 sampai 9 persen pada tahun 2003.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Harrison, D., & Schipani, "Lao Tourism and Poverty Alleviation: Community-Based Tourism and the Private Sector."

C. Bukti Pelaksanaan Pemerintahan di Negara Laos

Sistem pemerintahan Laos adalah Kabinet Parlementer dengan Perdana Menteri sebagai ¹¹ Kepala Pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh National Assembly (NA) untuk masa bakti 5 tahun. Sementara Perdana Menteri dan anggota Kabinet ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan NA yang merupakan Majelis tipe Unikameral yang anggotanya dipilih oleh rakyat Laos. Pemilihan umum tanggal 20 Maret 2016 telah memilih 149 anggota NA periode 2016 - 2020.

Pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Y.M. Bounnhang VORACHITH sebagai Presiden/Kepala Negara dan Y.M. Thongloun SISOULITH sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan yang disahkan pada sidang ke-8 *National Assembly* dan telah mulai melaksanakan tugasnya pada Januari 2016. Pemerintahan sekarang ini dipimpin oleh Y.M. Bounnhang VORACHITH sebagai Presiden/Kepala Negara dan Y.M. Thongloun SISOULITH sebagai Perdana Menteri/Kepala Pemerintahan yang disahkan pada sidang ke-8 *National Assembly* dan telah mulai melaksanakan tugasnya pada Januari 2016. Bersama dengan Republic Rakyat Cina (RRC), Vietnam, Kuba, dan Korea Utara adalah lima negara komunis yang masih bertahan di dunia.

Laos mulai menerapkan komunisme di tahun 1975 usai revolusi yang didukung Vietnam dan Uni Soviet. Kemiskinan yang tinggi membuat negara ini mendorong liberalisasi ekonomi dengan mengizinkan hak

kepemilikan pribadi di sejumlah sektor pada 1986. Hingga kini, sekitar 77% populasi Laos masih hidup di bawah garis kemiskinan.¹¹⁰

Pemerintah Laos juga telah mengeluarkan kebijakan untuk menambah dana promosi sekitar 30 Juta USD guna mendukung dana operasional UKM. Dengan suntikan dana dan pemberian kredit berbunga rendah tersebut, diharapkan UKM dapat mengembangkan bisnisnya dan berkompetisi dengan UKM dari negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, Pemerintah Laos telah mendirikan Pusat-Pusat Pelayanan UKM yang berfungsi untuk memberikan konsultasi dan pelatihan bagi pemilik usaha, serta mengidentifikasi peraturan yang diperlukan perbaikan dan untuk menemukan solusi. Laos memprioritaskan produk-produk tertentu seperti *furniture* dan kerajinan tangan sebagai primadona ekspor Laos namun *design* dan keahlian pengrajin Laos masih belum banyak berkembang dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Di Laos bahan baku kayu masih mudah untuk didapatkan namun pengrajin Laos masih belum optimal dalam menciptakan karya-karya bernilai tinggi.

¹¹⁰ Fahri Zulfikar, "Negara Laos: Ibu Kota, Sistem Pemerintahan, Dan Kondisi Geografisnya," *Detikedu*, last modified 2021, accessed November 26, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5664839/negara-laos-ibu-kota-sistem-pemerintahan-dan-kondisi-geografisnya>.

D. Kelebihan dan Kekurangan Bentuk Pemerintahan di Laos

Komunisme adalah sebuah teori atau sistem sosial berdasarkan persamaan yang sama antara kepemilikan masyarakat dan negara, dengan semua kegiatan ekonomi dan sosial dikendalikan oleh negara yang didominasi oleh partai politik tunggal. Sudah terjadi stigma di masyarakat bahwa komunis itu buruk, bahkan dalam bidang akademik kita diajarkan tentang buruknya sistem ini. Walaupun saat ini masih banyak negara yang menerapkan sistem komunisme seperti : Laos, Vietnam, Korea utara, Kuba dan China. Akan tetapi di masing-masing negara tersebut telah dimodifikasi dalam sosial-politik mereka. Apakah komunisme selalu otoriter? Apakah hanya ide praktis? Akan ada saatnya dimana komunisme ini akan berjaya seperti kapitalisme dan dapat membangun suatu negara. ¹¹¹ Untuk itu, ideologi ini menawarkan beberapa kelebihan diantaranya:

1. Semua Orang Sama

Dalam rezim komunis, pemerintah memandang semua orang diperlakukan sama tanpa memandang pendidikan, stabilitas keuangan, dan sebagainya. Batas ekonomi tidak memisahkan atau mengelompokkan orang, hanya saja situasi yang akan mengontrol bagaimana pembagian pekerjaan yang akan menghilangkan kejahatan dan kekerasan.

¹¹¹ M Ridla Imamal-haq et al., "REPUBLIK DEMOKRATIS LAOS (Lao People ' s Democratic Republic)" (2015).

2. Setiap Orang Berhak Mendapat Pekerjaan

Semua orang berhak mendapatkan pekerjaan apapun. Hal ini dikarenakan pemerintah memiliki semua alat-alat produksi. Pemerintah dapat menyediakan pekerjaan untuk setidaknya mayoritas rakyatnya. Setiap orang di negara komunis diberikan kesempatan kerja yang cukup bagi mereka untuk hidup dan bertahan hidup. Setiap warga negara, bagaimanapun, harus mendapatkan apa yang sudah menjadi bagiannya dalam perekonomian yaitu untuk menerima gaji dan insentif.

3. Sistem Ekonomi Internal Stabil

Pemerintah memegang kendali dalam menjaga stabilitas perekonomian. Setiap warga negara bekerja sesuai dengan bidangnya dan setiap pekerjaan itu berguna dan saling ada keterikatan satu sama lain. Hal ini akan menciptakan insentif untuk berpartisipasi dan membantu dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa apapun pekerjaannya itu sangat dibutuhkan oleh negara khususnya masyarakat. Dokter dan petani sama-sama penting untuk membangun perekonomian negara.

4. Pembentukan Komunitas yang Solid

Dengan adanya pembagian kelompok ini menimbulkan semangat kebersamaan dalam komunitarian tersebut. Dalam komunisme, ada hukum-hukum tertentu, aturan dan tujuan dalam mengalokasikan sumber daya dan tanggung jawab. Jika warga negara mematuhi undang-undang tersebut, ini mengarah ke semangat harmonisasi dengan satu tujuan bersama. Ini akibatnya membangun komunitas sosial yang lebih kuat, dan ekonomi yang

lebih kuat.

5. Tidak Ada Kompetisi

Dalam masyarakat komunis, semua orang dianggap sama dalam menerima haknya dari negara. Ini berarti bahwa setiap orang dapat bekerja keras sama dan harmonis tanpa menginjak-injak kepentingan masing-masing. Semua pekerjaan, tanggung jawab, dan semua manfaat menuai dibagi secara merata di antara masyarakat. Jika orang tidak memiliki rasa iri, cemburu atau ambisi yang melawan tujuan negara, maka pembangunan ekonomi yang harmonis dapat dipertahankan.

6. Efisiensi Distribusi Sumber Daya

Dalam masyarakat komunis, rasa kerjasama memungkinkan untuk sistem komunis yang sehat. Ini berarti bahwa masyarakat komunis sangat efisien dalam distribusi sumber daya bahkan di daerah lokal. Hal ini sangat penting terutama pada saat dibutuhkan dan dalam situasi darurat.¹¹²

1. Kebutuhan konsumen tidak dipertimbangkan.
2. Produktivitas dan efisiensi yang sulit dicapai tanpa keuntungan motif para pekerja.
3. Sulit untuk mencapai keseimbangan internal antara penawaran dan permintaan tanpa mekanisme harga.¹¹³

Para penentang komunisme selalu menggambarkan komunisme sebagai proses berbagi hal-hal yang sama. Mereka menyatakan bahwa komunis ingin menyita segala sesuatu dan untuk membagi semuanya, untuk membagi negeri itu, untuk membagi sarana produksi lainnya, dan untuk berbagi keluar juga semua permasalahan konsumsi. Ini akan menciptakan sejumlah kepemilikan dengan modal kecil.

¹¹³ "Disadvantages of Communism," *Boundless Business*.

BAB X

BENTUK PEMERINTAHAN NEGARA MYANMAR

A. Sejarah Terbentuknya Negara

1. Gambaran Umum

Republik Persatuan Myanmar (dikenal sebagai Birma dan disebut "Burma" oleh negara-negara Barat) adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Perubahan nama dari Burma menjadi Myanmar dilakukan oleh pemerintahan junta militer secara resmi pada tanggal 18 Juni 1989. Junta militer mengubah nama Burma menjadi Myanmar supaya etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara tersebut. Sebutan Burma tetap digunakan oleh beberapa negara, seperti Britania Raya dan Kanada.

Negara ini diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta pada tahun 1988. Myanmar adalah negara berkembang yang memiliki populasi lebih dari 50 juta jiwa. Sebelumnya Ibu kota Myanmar terletak di Yangon lalu dipindahkan oleh pemerintahan junta militer ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005.

Pada tahun 1988, terjadi gelombang demonstrasi besar yang menentang pemerintahan junta militer. Gelombang demonstrasi ini akhirnya berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. 3000 orang lebih terbunuh. Pada pemilu di tahun 1990 partai pro-demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi

82 persen suara tetapi hasil pemilu ini tidak diakui rezim militer yang berkuasa.

Myanmar diperkirakan memiliki jumlah penduduk sebanyak 54,7 juta. Penduduknya berasal dari berbagai suku bangsa, seperti Bamar, Shan, Karen, Kachin, Chinese, India, dan lain sebagainya. Mayoritas penduduk negara ini berasal dari suku Bamar. Dilansir dari jurnal Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi (2007) karya Awani Irewati, penduduk suku Bamar dalam kehidupan sehari-harinya menggunakan bahasa Burmese. Sedangkan untuk bahasa nasionalnya, menggunakan bahasa Myanmar. Selain bahasa ini, penduduk Myanmar juga ada yang menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, serta India. Sebagian besar penduduk Myanmar beragama Buddha Threvada.

Agama ini kebanyakan dianut oleh kelompok suku Bamar, Rakhine, Shan, Mon, serta Chinese. Selain Buddha Threvada, penduduk negara ini juga ada yang menganut agama Kristen, misalnya suku Chin dan Karen, serta Islam yang dianut oleh kelompok Rohingya. Mengutip situs *Encyclopaedia Britannica*, Myanmar merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Selain pertanian, warga negaranya juga bergerak di bidang industri (khususnya pertambangan), sektor perbankan, asuransi, perdagangan, dan lain sebagainya.

Beberapa hasil pertanian dan industri tersebut ada yang dikonsumsi penduduk Myanmar sendiri, tetapi ada pula yang diekspor. Contoh komoditas ekspor Myanmar ialah padi, kayu, kapas, karet, dan lainnya. Sedangkan komoditas impornya adalah mesin, alat transportasi besi, baja, pupuk, farmasi, serta lainnya.¹¹⁴

2. Letak Geografis

Secara geografis, Myanmar terletak di Teluk Benggala. Secara astronomis, negara ini terletak pada 10 LU--26 LU dan 94 BT--101 BT dengan luas 676,575 km

Batas-batas wilayah Myanmar yaitu sebelah utara berbatasan dengan Cina, sebelah timur berbatasan dengan Thailand dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah barat berbatasan dengan Bangladesh.



Gambar .Peta Negara Myanmar

¹¹⁴ Vaanya Karunia dan Serafica Gischa, "Sistem Pemerintahan Dan Penduduk Di Myanmar," *KOMPAS.Com*, last modified 2021, accessed October 25, 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/130642769/sistem-pemerintahan-dan-penduduk-di-myanmar>.

a. Bentang Alam

Wilayah Myanmar terbentang dari utara ke selatan. Wilayah negara ini terbagi menjadi empat wilayah, yaitu pegunungan utara, pegunungan barat, wilayah dataran rendah, dan plato. Wilayah utara relatif sempit, lalu makin meluas di bagian tengah, dan menyempit lagi di bagian selatan. Wilayah Myanmar sebagian besar berupa gunung dan rangkaian pegunungan raksasa yang tidak dapat dilalui. Rangkaian pegunungan tersebut berbentuk tapal kuda dan terbentang di sepanjang sisi bagian barat, utara, dan timur.

Pegunungan tertinggi ada di bagian barat dengan puncaknya yang bernama Hkokado Razi. Hkokado Razi merupakan puncak gunung tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan ketinggian mencapai 5.881 m. Di sela-sela pegunungan terdapat dataran rendah yang dialiri oleh Sungai Chindwin dan Sungai Irawadi. Lereng-lereng pegunungan nya juga ditumbuhi hutan yang cukup lebat.

b. Sejarah Singkat

Negara Burma atau Myanmar baru didiami pendatang dari Cina dan Tibet menjelang abad ke-8, pada awalnya dikuasai raja-raja kecil, kemudian dipersatukan oleh Raja Anarutha Agung pada abad ke-11. Sesudah ditaklukkan oleh Kubilai Khan (abad ke-13), negara ini kembali terpecah-pecah sampai dipersatukan lagi di bawah Raja Tabinshweti (abad ke-16).

Pada awal abad 18, Negara Myanmar menjadi bagian dari wilayah jajahan Inggris (*Indian Empire*) dan Inggris berhasil membuat negeri ini menjadi sebuah koloni, tetapi pada tahun 1937 Burma diberi pemerintahan sendiri di bawah gubernur Inggris dan akhirnya menjadi negara demokrasi parlementer di bawah Perdana Menteri U Nu (1948 -- 1962). U Nu dilengserkan oleh Brigjen Ne Win, yang kemudian memegang jabatan presiden dan sejak 1972 juga menjabat ketua Partai Program Sosialis Burma. Pada akhirnya Myanmar merdeka di tahun 1948 dan mengalami instabilitas politik karena perpecahan dalam partai yang berkuasa (AFPL).¹¹⁵

¹¹⁵ "Sejarah Singkat Myanmar Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed October 18, 2022, <https://www.kompasiana.com/yuniaindahl/60d15ff6bb4486391b679b44/sejarah-singkat-myanmar>.

B. Bentuk Pemerintahan Negara Myanmar

Dikutip dari jurnal Analisis Yuridis tentang Sistem Pemerintahan Presidensial ¹² Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (2021) karya M. Alfin Ardian dan Ridham Priskap, Myanmar menganut sistem pemerintahan presidensial. Artinya presiden memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Dalam menjalankan pemerintahan dan urusan negaranya, presiden di Myanmar dibantu oleh dua orang wakil presiden. Namun, sekitar tahun 2016, presiden membentuk jabatan baru yang setara dengan Perdana Menteri, yakni Kanselir Negara (*State Counsellor*).¹¹⁶

Myanmar merupakan negara bekas jajahan Inggris dan pada awal kemerdekaannya pada tahun 1948 bernama Burma. Myanmar sempat menjalankan sistem pemerintahan yang demokrasi pada saat dibawah pemerintahan sipil U Nu, dimana Myanmar pada saat itu juga menjalankan sistem parlementer.¹¹⁷ Dalam menjalankan roda pemerintahan, Myanmar beberapa kali melakukan berbagai perubahan bentuk pemerintahan. Mulai dari bentuk demokrasi hingga jantai militer. Kekuatan militer di negara tersebut sangatlah kuat, tak hanya dalam bentuk mengorganisir namun juga dalam bentuk membuat kebijakan dan mengatur pemerintahannya. Mereka tak segan-segan untuk mengatur rakyatnya yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan jantai militer.

¹¹⁶ Gischa, "Sistem Pemerintahan Dan Penduduk Di Myanmar."

¹¹⁷ Jurnal Transnasional, "Reformasi Politik Dan Ekonomi Di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)" 6, no. 1 (2014): 1181–1193.

Aung san suu kyi merupakan salah satu pemimpin demokrasi yang bertahan cukup lama. Walaupun posisinya saat ini dikudeta oleh junta militer Myanmar. Dia berhasil mematahkan dominasi pengaruh militer disaat diselenggarakannya pemilu secara bebas. Dan partai yang ia pimpin berhasil memenangkan pemilihan umum tersebut. Hingga pada tahun 2017, peraih nobel perdamaian tersebut terlibat kasus pembiaran kekerasan etnis minoritas rohingya di Myanmar. Karena kasus tersebut, reputasi beliau kian menurun. Hingga pada tahun 2021, junta militer mengambil momen tersebut untuk melakukan kudeta pemerintahan yang sah. Dan Aung san suu kyi pun di tangkap dan dipenjara oleh pihak militer.¹¹⁸

Myanmar sempat menerapkan sistem pemerintahan demokrasi sejak kemerdekaan di tahun 1948. Diawali dengan Jepang berhasil mendapatkan dua wilayah di Myanmar. Jepang melakukan pelatihan militer kepada masyarakat pada masa kependudukannya yang mana Jepang diterima oleh pejabat dan masyarakat Myanmar. Masyarakat tidak menyalahkan pengalaman yang mereka dapatkan dari pelatihan militer yang mereka dapatkan dari Jepang untuk perkembangan militer di Myanmar.¹¹⁹

Perdana menteri U Nu memegang pemerintahan Myanmar cukup lama, sejak Myanmar merdeka tahun 1948 sampai 1962. Pada tahun 1958 kelompok militer

¹¹⁸ Widya Lestari Ningsih, Verelladevanka Adryamarthanino, "Aung San Suu Kyi, Sosok Kontroversial Yang Terancam 150 Tahun Penjara," *KOMPAS.Com*, last modified 2022, accessed October 25, 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/04/090000779/aung-san-suu-kyi-sosok-kontroversial-yang-terancam-150-tahun-penjara?page=all>.

¹¹⁹ Dorothy Guyot, "The Burma Independence Army: A Political Movement in Military Garb Dalam Verinder Grover Ed," in *Politic and Government of Asian Countries, Series 10 : Myanmar* (New Delhi: Deep and deep publications Pvt.Ltd, 2000), 169.

yang dipimpin Jendral Ne Win melakukan kudeta kepada pemerintahan U Nu, kudeta yang dilakukan oleh Jendral Ne Win bukan tanpa alasan krisis politik yang terus meningkat selama pemerintahan U Nu yang mana akibat dari perpecahan dalam partai *Anti-Facist People's Freedom League* (AFPL). Jendral Ne Win mengadakan pemilu di Myanmar pada tahun 1960, yang dimana tujuan diadakannya pemilu tersebut untuk menegakkan demokrasi dan mengembalikan pemerintah ke pihak sipil.

Awal mula pengaruh militer menguasai pemerintahan yaitu dimulai pada tahun 1962. Pemerintahan U Nu di turunkan secara paksa oleh Jenderal Ne Win pada tanggal 2 Maret 1962.¹²⁰ Sejak kudeta yang dilakukan junta militer dibawah kepemimpinan Jendral Ne Win, Myanmar menjalankan pemerintahan militer yang didukung oleh Dewan Revolusi.

Tujuan dari pemerintahan militer yaitu:¹²¹

- Reformasi ekonomi
- Membatasi pengaruh luar negeri dari berbagai aspek kehidupan di Myanmar dari segi ekonomi, politik dan sosial.
- Merubah nilai dan perilaku masyarakat, sehingga membuat pemerintahan yang baru bisa menciptakan revolusi.
- Menyatukan rakyat Myanmar yang memiliki banyak etnis menjadi bangsa yang satu.

¹²⁰ Alfian, *Militer Dan Politik : Pengalaman Beberapa Negara* (Jakarta: LIPI, 1970).

¹²¹ Edward Feit, *The Armed Bureaucrats* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1973).

Dalam menjalankan tujuannya, pemerintah junta militer gagal dalam menjalankan pemerintahan yang seperti mereka inginkan, pemerintah junta militer juga gagal membuat kebijakan yang memberikan dampak baik bagi masyarakat. Terbuktinya dengan produksi padi yang semakin menurun hanya sebanyak 5,3% pada tahun 1965- 1966 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemberontakan dari kelompok etnis masih terjadi. Selain itu juga, jumlah kejahatan dan kriminalitas di Myanmar yang semakin meningkat dari sebelumnya. Sehingga berita atau isu yang menyebutkan bahwa stigma kegagalan pemerintahan sipil yang pernah digaungkan oleh pihak junta militer pun mulai berkurang sedikit-demi sedikit. Masyarakat Myanmar pun mulai mengukuhkan pemerintahan junta militer, bahkan mulai bermunculan masyarakat yang berani menyuarakan keadaan mereka akibat kepemimpinan militer di pemerintahannya.

Junta militer semakin *offensive* dalam membuat kebijakan. Hampir semua aspek baik industri, hiburan, bisnis pun seakan semua dinasionalisasikan oleh mereka. Bahkan kegiatan debat publik ditiadakan, perpustakaan di negara tersebut juga ditutup. Sebuah fenomena yang seakan menutup kebebasan masyarakat Myanmar. Semua aspek yang ada di kontrol dan diawasi oleh junta militer.¹²² *State Development and Peace Council* (SDPC) yang dibentuk tahun 1997 menunjukkan peran militer didalam politik di Myanmar, SDPC sebelumnya bernama *State Law and Order Restoration Council* (SLORC). Awal mula didirikannya SLORC adalah untuk memperbaiki kondisi politik di Myanmar.

¹²² Mutiara Ita Dewi, *Pengalaman Militer Burma : Ebuah Analisis Historis-Politis*, n.d.

Namun keadaan tersebut seperti menunjukkan tidak adanya peluang untuk negara tersebut mengarah menjadi negara yang demokratis. Juntai militer hanya masih menyibukkan dengan mengaadili dan menutup bahkan membungkam orang-orang maupun kelompok yang berani menentang bahkan menyuarakan sikap otoriter yang dimiliki oleh junta militer.¹²³

¹²³ Samuel P Huntington,

C. Bukti Pelaksanaan

Seperti yang kita tau, bahwasannya dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan yang ada di Myanmar yaitu ada dua, yang pertama dalam bentuk demokrasi dan yang kedua militer. Kedua pengaruh tersebut sangat berpengaruh dalam menciptakan dinamika yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintahan dalam menjalankan mengatur dan membuat kebijakan. Jika kita menengok setahun yang lalu, presiden terpilih Aung san suu kyi ditangkap dan diasingkan oleh pihak militer. Pengkudetaan yang dilakukan oleh pihak junta militer di negara tersebut, seakan mengingatkan kita akan hubungan antara dua pihak yaitu sipil dan militer.

Menurut Huntington hubungan antara sipil dan militer dapat dikategorikan dalam 5 pola:¹²⁴

- a. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang besar, profesionalisme militer yang rendah. Hal ini sering dijumpai dalam negara primitif, seperti Jerman saat perang dunia I maupun AS saat perang dunia II
- b. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer rendah. Hal ini sering dijumpai dalam negara totaliter, misalnya Jerman di perang dunia II.
- c. Ideologi anti militer, kekuatan militer rendah, profesionalisme militer yang besar. Hal ini dapat dilihat contoh kasus AS di awal kemunculan profesionalisme militer pasca perang sipil sampai PD II.

¹²⁴ Samuel P Huntington, *The Soldier and State* (Cambridge: Harverd University Press, 1957).

- d. Ideologi pro militer, kekuatan militer besar, profesionalisme militer yang tinggi. Contoh : Prussia dan Jerman dalam epos Bismarckian-Molkean (1860-1890).
- e. Ideologi anti militer, kekuatan militer yang rendah, profesionalisme militer yang tinggi. Contoh : Inggris abad ke-20.

Dalam penjelasan yang dikatakan oleh beliau, hubungan antara sipil dan militer saling keterkaitan satu sama lain. Dari kategori 1 hingga 5, yang sangat pas menggambarkan keadaan di negara Myanmar yaitu yang pertama. Karena apa? Karena kita juga mengetahui perkembangan saat ini, pengaruh kekuatan militer saat ini di negara tersebut masih sangat kuat. Namun jika kita melihat kedalam perspektif kinerja para anggota militer di sana masih sangat minim. Karena mereka masih mudah untuk terhasut kedalam dunia politik. Sedangkan kita sama-sama mengetahui jika tugas militer di sebuah negara yaitu menjaga pertahanan dan keamanan suatu wilayah.

Dilihat dari perspektif yang lain, Myanmar bisa dikatakan sebagai negara yang menganut pretorianisme jika dilihat dari hubungan antara sipil dan militer. Pretorianisme menurut Amos Perlmutter dibagi menjadi beberapa tipe yaitu historis dan modern.¹²⁵ Pretorianisme modern dibagi menjadi tiga yakni :

- a. Pretorianisme otokrasi bentuk kekuasaan militer yang sederhana dimana pemerintah hanya dikuasai oleh satu orang.

¹²⁵ Amos Perlmutter, *Militer Dan Politik* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985).

- b. Pretorianisme oligarki dimana pemerintah dikuasai oleh kelompok elit.
- c. Pretorianisme otoriter ditandai dengan adanya pemerintahan sipil dan militer.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa pretorianisme yang terjadi di Myanmar yaitu termasuk kedalam pretorianisme oligarki. Dikarenakan sampai detik ini pemerintahan dikuasai oleh para elit militer, walaupun masih terdapat masyarakat sipil di dalam parlemen. Oleh karena itu, hanya ada satu partai saat ini yang ada di Myanmar yaitu partai yang dipimpin oleh elit militer.

Pemerintahan sipil tidak bisa berkuat di Myanmar, dilihat dari pemerintahan sebelumnya yakni perdana menteri U Nu yang dikudeta oleh Jendral Ne Win. Jadi, hubungan antara sipil dan militer selau dimenangkan oleh pihak militer. Jadi sejak dahulu, pengaruh masyarakat sipil di negara itu tidak dapat melakukan apa-apa. Karena jantai militer di negara tersebut menguasai di semua sektor yang ada di pemerintahan. Tak hanya masyarakat sipil yang turun, bahkan seperti tokoh agama yang ada disana juga menyuarakan kebebasan dalam berpendapat. Seperti para biksu yang turun ke jalan dalam parade demo yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam menentang keberadaan jantai militer di Myanmar.

Keadaan seperti ini cukup menarik, karena hanya ada di negara tersebut masyarakat sipil tidak dapat melakukan apa-apa. Masyarakat hanya bisa diam dan menerima keadaan yang dilakukan oleh junta militer. Pada tahun 2021, banyak negara yang mengecam dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh jantai militer.

Dan banyak negara yang melakukan sanksi ekonomi kepada negara Myanmar. Sehingga keadaan tersebut juga menyebabkan kesulitan ekonomi dan banyaknya pengangguran di negara itu.

Menjadi masyarakat Myanmar cukuplah sulit, tidak hanya sulit dalam perekonomian namun juga sulit dalam melakukan ekspresi dalam menyuarakan kebebasan berpendapat yang menjadi hak seluruh manusia. Pemerintahan junta militer, tak segan-segan untuk menangkap bahkan memenjarakan para aktivis yang melakukan kampanye penolakan junta militer disana pun ditangkap. Tak hanya dengan menangkap, mereka juga melakukan berbagai tindakan kekerasan untuk membuat para demonstran tersebut tidak melakukan demonstrasi. PBB selaku induk persatuan bangsa-bangsa pun tidak dapat banyak melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik disana.

⁵ Dalam masa pemerintahan militer menerapkan ideologi dengan istilah “*Burmese Way to Socialism*” sebagai dasar bagi sistem politik dan ekonomi. Myanmar pada masa itu cenderung menutup diri dari dunia internasional, seperti membatasi visa pendatang, mengusir akademis asing dan berbagai yayasan internasional. ⁵ Sedangkan mengenai solusi alternatif yang dikeluarkan PBB terhadap Myanmar dapat dibidang melibatkan masyarakat internasional karena kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar telah menyita internasional. Beberapa negara seperti USA, Australia, Selandia Baru, Kanada dan beberapa negara di Uni Eropa mengancam keras kekerasan terhadap aksi unjuk rasa

damai massa pro demokrasi dan anti kudeta di Myanmar. Solusi pertama yang ditawarkan PBB mengajak tatmadaw untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil, namun rekonsiliasi harus memerlukan dorongan melalui negosiasi antara pihak militer dan sipil. Solusi kedua membentuk pemerintahan sementara dengan pemimpin dari pihak netral bukan dari militer maupun sipil.¹²⁶

⁵ Dewan Keamanan PBB secara khusus mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak serta menyerukan pembebasan segera orang yang ditahan. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati kebebasan fundamental, HAM, dan menegakkan supremasi hukum. Selain itu, dewan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pembatasan tenaga medis, anggota serikat pekerja, pekerja media, jurnalis, dan masyarakat sipil.

Pernyataan ini merupakan versi revisi dari pernyataan pertama karena China dan Rusia yang memegang hak veto, merasa “kudeta militer” belum bisa digunakan untuk saat ini. ⁵ Amerika Serikat juga ikut mengancam akan bertindak untuk merespons kudeta militer di Myanmar. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengancam segala upaya untuk menghalangi transisi demokrasi Myanmar atau mengubah hasil pemilu dan akan mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggung jawab jika langkah ini tidak dihentikan dan mendesak militer

¹²⁶ Padlika Garmabar and Universitas Singaperbangsa Karawang, “RESPON DUNIA TERHADAP KUDETA MILITER MYANMAR” 3, no. November 2020 (2021): 179–188.

5 mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum serta membebaskan mereka yang ditahan.

5 Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkata, “Dalam demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel. Selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah terus bekerja untuk menetapkan pemilihan umum, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati. Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma di saat-saat sulit ini. Kami akan bekerja sama dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma.”

Demokrasi harus dilakukan sesuai dengan cita-cita dan prinsip yang berkeadilan. Karena nyawa demokrasi berada di tangan rakyat. Oleh karena itu demokrasi harus bisa di laksanakan dengan sebenar-benarnya sehingga tidak saling merugikan satu pihak dengan pihak yang lain.

D. Kekurangan dan Kelebihan dari Bentuk Pemerintahan

Mungkin jika kita sama-sama perhatikan, dalam pelaksanaan bentuk pemerintahan saat ini bagaimana pihak militer yang mengambil ahli pemerintahan yang sah merupakan sebuah bentuk pencemaran asas-asas demokrasi yang diganggu di Myanmar. Karena dari adanya keadaan tersebut menyebabkan banyak perubahan yang signifikan terjadi di negara tersebut. Tidak hanya dari sisi ekonomi dan sosial namun juga dalam sisi psikis dan emosional masyarakatnya dalam melakukan aktifitas yang diawasi dan di perhatikan oleh pihak militer.

Berikut beberapa kelebihan dari bentuk pemerintahan militer yang dilaksanakan di negara tersebut, seperti :

1. Banyak yang menurut dan melaksanakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
2. Tidak adanya pembangkangan maupun kritik pedas yang diberikan kepada pemerintah
3. Pemerintah dapat membuat kebijakan dengan semaunya sendiri tanpa memikirkan apa dampak yang akan terjadi di masyarakat
4. Pemerintah dapat mengontrol apa saja yang ada di dalam negaranya tersebut baik dari segi ekonomi, sosial, hiburan, bisnis dan lain sebagainya
5. Tidak adanya demonstrasi yang mengakibatkan mengganggu stabilitas negara

6. Dan lain sebagainya.

Tak hanya kelebihan saja, namun ada juga dampak kekurangannya dari diterapkannya bentuk pemerintahan militer tersebut, yaitu :

1. Kurangnya kebebasan berpendapat
2. Cara kekerasan menjadi tindakan yang banyak dilakukan
3. Perekonomian yang tidak dapat tumbuh
4. Inflasi semakin tinggi di negara
5. Kurangnya informasi diluar sana sehingga menjadi masyarakat yang pasif
6. Kelaparan dan pengangguran tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu bukti lemahnya perekonomian,
7. Dan lain sebagainya

BAB XI

BENTUK PEMERINTAHAN FILIPINA

A. Sejarah Negara Filipina

Filipina, secara resmi dikenal sebagai Republik Filipina (Filipino: Republika ng Pilipinas) adalah sebuah nusantara dan negara kesatuan dengan sistem presidensial dengan bentuk republic secara konstitusional di Asia Tenggara, bersama di utara Indonesia dan Timur Laut Sabah. Filipina adalah negara kepulauan di cekungan Pasifik barat, negara ini terdiri dari 7.641 pulau. Selama ribuan tahun, penduduk pulau Filipina yang bekerja keras ini telah mengembangkan sistem pertanian padi yang canggih yang menyediakan makanan pokok bagi orang-orang¹²⁷.

Filipina adalah negara paling maju di benua itu setelah Perang Dunia II pada tahun Asia, tetapi sejak itu¹⁴ tertinggal di belakang negara-negara lain karena pertumbuhan ekonomi yang cepat, kelemahan, penyitaan aset oleh pemerintah, korupsi yang meluas, dan pengaruh neo-kolonial. Meskipun demikian, Filipina mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat, sebagian besar disebabkan oleh pengiriman uang dari pekerja asing Filipina dan sektor teknologi informasi yang berkembang pesat. Filipina sering dianggap sebagai satu-satunya negara¹⁴ di Asia di mana pengaruh budaya barat sangat kuat. Yang besar Tesis Permasalahan tersebut antara lain

¹²⁷ m soham, "(1) Sejarah Dan Perkembangan Filipina | Manap Soham - Academia.Edu."

¹⁴ gerakan separatis Bangsamoro pada tahun di selatan Filipina, khususnya di wilayah Mindanao, Pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (Tentara Rakyat Baru) komuniskomunis Di daerah pedesaan, kebijakan pemerintah seringkali tidak konsisten, tingkat kejahatan meningkat penggundulan hutan dan pencemaran laut meningkat. Filipina juga mengalami masalah kelebihan penduduk di daerah perkotaan karena kurangnya pekerjaan di daerah pedesaan dan tingkat kelahiran yang tinggi¹²⁸.

Sejarah Filipina

Warisan tertulis Filipina berasal dari abad ke-8 dan didasarkan pada penemuan pelat ²⁰ tembaga di dekat Manila. Dari tulisan di piring diketahui bahwa Filipina berada di bawah pengaruh Sriwijaya. Namun, hanya ada sedikit bukti tertulis yang bahkan sejarawan Filipina masih percaya bahwa ²⁰ sejarah Filipina dimulai pada era kolonial. Sebelum kedatangan Spanyol pada abad ke-16, ada kerajaan animisme kecil di Filipina dengan sedikit pengaruh India pada budaya India dan kerajaan ²⁰ Islam di bagian selatan dari nusantara¹²⁹

Kerajaan-kerajaan Muslim ini sangat dipengaruhi oleh Kerajaan Malaka. ²⁰ Selama 265 tahun, Filipina adalah koloni Kerajaan Spanyol (1565 - 1821), dan selama 77 tahun berikutnya diakui sebagai provinsi Spanyol (1821-1898). Negara ini mendapatkan namanya Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Philip II. Setelah Perang Spanyol-Amerika tahun

¹²⁸ "SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILIPINA DARI ERA KOLONIAL HINGGA SEKARANG."

¹²⁹ "BAB I PENDAHULUAN."

di 1898²⁰ Filipina diperintah oleh Amerika Serikat. Ini telah menjadi Persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak 1935. Waktu Persemakmuran telah dipersingkat Perang Dunia Kedua ketika Filipina²⁰ berada di bawah pendudukan Jepang Aktif¹³⁰.

4 Juli 1946 Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya (defacto). Masa pendudukan²⁰ asing ini sangat mempengaruhi budaya dan masyarakat Filipina. Negara ini terkenal dengan Gereja Katolik Roma dan merupakan salah satu dari hanya dua negara mayoritas Katolik di Asia kecuali Timor Leste dikatakan telah dimulai dengan kedatangan manusia pertama melintasi jembatan darat setidaknya 30.000 tahun yang lalu. Kedatangan orang barat pertama yang tercatat adalah kedatangan Ferdinand Magellan di pulau Homonhon, di tenggara dari Samar pada 16 Maret 1521. Sebelum Magellan tiba, ada suku Negrito yang menjelajahi Kepulauan Filipina namun kemudian digantikan oleh manusia span> Austronesia. Kelompok-kelompok ini dapat dibagi menjadi suku pemburu-pengumpul, masyarakat ksatria, plutokrasi kecil dan kerajaan maritim yang kemudian menjadi kerajaan, konfederasi dan Kesultanan.

Negara-negara pra-kolonial ini Kerajaan Butuan, Cebu, Tondo, Maysapan, Maynila, Konfederasi Madyaas, Negeri Mai dan Kesultanan Sulu dan Maguindanao.

¹³⁰ A. Kardiyat Wiharyanto, "Pembentukan Negara-Negara Nasional Di Asia Tenggara," *Historia Vitae* 22 (2008).

Negara-negara kecil ini berkembang setidaknya dari hingga abad ke-10. Meskipun kerajaan-kerajaan ini mencapai tatanan politik dan sosial yang kompleks dan berdagang dengan wilayah Tiongkok saat ini. , India , Jepang,Thailand, Vietnam dan Indonesia sama-sama gagal menyatukan kepulauan yang kini menjadi Filipina pada abad ke-20. Penjajahan dan pemukiman Spanyol Spanyol dimulai dengan kedatangan Ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565, yang mendirikan pemukiman San Miguel di pulau Cebu dan banyak lagi pemukiman di utara yang memanjang ke teluk Manila di pulau Luzon pada tahun 1571. Di Manila mereka mendirikan kota baru dan dengan itu dimulai periode Kolonial Kekaisaran Spanyol , yang berlangsung lebih dari tiga abad. Pemerintah Spanyol tidak berhasil mencapai penyatuan politik seluruh nusantara, yang sebelumnya terdiri dari beberapa kerajaan dan komune independen. Penyatuan Filipina baru berhasil pada abad ke-20¹³¹

Spanyol memperkenalkan mesin cetak versi Eropa barat dan kalender Gregorian sertacacar , penyakit kelamin , kusta, perang senjata api. Hindia Timur Spanyol diperintah dan dikelola sebagai bagian dari Pemuda Spanyol Baru Meksiko dari tahun 1565 hingga 1821 dan dikelola langsung olehMadrid dari tahun 1821 hingga akhir Perang Spanyol-Amerika 1898, kecuali untuk periode singkat Pendudukan Inggris di Filipina (1762-1764).

¹³¹ Ernest S. Griffith, "The Splendid Adventure. By the Rt. Honorable W. M. Hughes. (London: Ernest Benn, Limited. 1929. Pp. Xviii, 456.)," *American Political Science Review* 24, no. 1 (February 1930): 195–197.

Pedagang Cina, Inggris, Portugis, Belanda, Jepang, dan pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan memaksakan monopoli Spanyol. Misionaris Spanyol berusaha untuk mengkristenkan penduduk dan umumnya berhasil di dataran rendah utara dan tengah. Mereka mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit, terutama di Manila dan pemukiman Spanyol yang dibentengi

Revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896 dan mencapai puncaknya dua tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan berdirinya Republik Pertama Filipina. Namun Perjanjian Paris mengalihkan kendali Filipina ke Amerika Serikat pada akhir Spanyol-Perang Amerika. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina, yang menyatakan perang terhadap Amerika Serikat pada 2 Juni 1899. Perang Filipina-Amerika yang terjadi pada tahun memakan banyak korban. Presiden Filipina Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan akhir resmi dari Konflik Filipina tahun 1902¹³².

Para pemimpin Filipina secara umum menerima bahwa AS telah menang, tetapi permusuhan terus berlanjut dan baru mulai mereda pada tahun 1913. Pemerintahan kolonial AS dimulai pada tahun 1905 dengan otonomi lokal yang sangat terbatas.

¹³² George McTurnan Kahin, "Nationalism and Revolution in Indonesia / George McTurnan Kahin | OPAC Perpustakaan Nasional RI."

Otonomi sebagian (status Persemakmuran) diberikan pada tahun 1935 dan kemerdekaan penuh dari AS direncanakan pada tahun 1946. Persiapan untuk negara berdaulat penuh terganggu selama pendudukan oleh Kekaisaran Jepang Perang Dunia II.

Dengan ekonomi yang menjanjikan pada 1950-an dan 1960-an, Filipina mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan gerakan warga melawan kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos pada akhir 1960-an dan awal 1970-an yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972. Karena hubungan dekat antara AS, terlepas dari pemerintahannya, Marcos dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas. Tapi Revolusi Kekuatan Rakyat tahun 1986 menggulingkan Marcos dan mengembalikan demokrasi ke negara itu. Periode berikutnya ditandai dengan ketidakstabilan politik dan gangguan terhadap produktivitas ekonomi. Pada tahun 2019, diadakan referendum untuk menetapkan Daerah Otonom Bangsamoro. Bangsamoro Organic Law kemudian ditetapkan sebagai standar.

Sejarah Politik Filipina

Filipina telah dijajah oleh tiga negara sejak abad ke-16, yaitu Spanyol, Amerika Serikat dan Jepang. Spanyol adalah negara terjajah terlama dari tahun 1565 sampai 1898, setelah itu Amerika Serikat datang dan menjajah selama 48 tahun, kemudian Jepang menjajah selama 3,5 tahun bersamaan dengan Perang Dunia II. Ketiga negara ini memiliki pengaruh besar di Filipina, salah satunya adalah pengaruh dalam politik.

Sejarah Dan Perkembangan Filipina Dari Masa Kolonial Sampai Sekarang Filipina Di Era Kolonialisme

a) Era kolonialisme Spanyol

Alasan kedatangan orang Spanyol di Filipina bukan murni komersial. Awalnya orang Spanyol melihat Filipina sebagai batu loncatan untuk mengekstrak kekayaan dari Hindia Timur (Kepulauan Rempah/Maluku),

tetapi setelah Portugis dan Belanda mengesampingkan kemungkinan ini, orang Spanyol terus hadir di Filipina. Kedatangan pertama Spanyol di Filipina dipimpin oleh seorang navigator dan penjelajah berkebangsaan Portugis, yaitu Ferdinand Magellan yang membawa kapal Spanyol pertama ke Filipina ketika Ia mendarat di Cebu pada Maret 1521. Tidak lama kemudian, Ferdinand mendadak mati di pulau Mactan. Kemudian Raja Philip II (asal-usul nama Filipina) mengirim kembali tiga kapal ekspedisi lebih lanjut yang berakhir dengan bencana, Ia mengirim Miguel López de Legazpi yang mendirikan pemukiman Spanyol permanen pertama di Cebu pada 1565¹³³. Kota Spanyol di Manila adalah didirikan pada 1571 dan pada akhir abad ke-16 sebagian besar wilayah pesisir dan dataran rendah dari Luzon ke Mindanao utara berada di bawah kendali Spanyol.

¹³³ A. Kardiyat Wiharyanto, "Lokasi: Sejarah Asia Tenggara, Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN."¹⁴

Para biarawan berbaris dengan tentara dan segera menyelesaikan konversi nominal ke Katolik Roma dari semua orang lokal di bawah pemerintahan Spanyol. Tetapi Muslim Mindanao dan Sulu, yang oleh Spanyol disebut Moor, tidak pernah sepenuhnya ditaklukkan oleh Spanyol. Aturan Spanyol diberlakukan disebagian besar wilayah selama 100 tahun pertama dengan jenis pajak pertanian yang diperkenalkan dari Amerika yang dikenal sebagai *encomienda*. Namun, perlakuan kasar terhadap pembayar pajak lokal dan pengabaian instruksi agama oleh *encomenderos* (pengumpul upeti), serta seringnya pemotongan pendapatan (korupsi) dari *encomenderos*, membuat Spanyol meninggalkan sistem tersebut pada akhir abad ke-17. Gubernur jenderal, yang diangkat sendiri oleh raja Spanyol pada tahun , mulai menunjuk seorang gubernur sipil untuk wilayah lokal di Filipina dan pasukannya sendiri untuk memerintah secara langsung 1. Pemerintah pusat di Manila tetap dipertahankan

Peran pertengahan abad ke-19 dan peran gubernur jenderal begitu kuat sehingga sering disamakan dengan raja (*independen*). Dia mendominasi *Audiencia*, atau Mahkamah Agung, kemudian menjabat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Filipina dan menikmati hak istimewa untuk terlibat langsung dalam setiap perdagangan di wilayah Filipina untuk kepentingan pribadi Gubernur Jenderal.

b) Masa Kolonialisme Amerika Serikat

Pada bulan Agustus 1896, para biarawan Spanyol menemukan bukti konspirasi Katipunan, dan para pemimpin mereka dipaksa untuk bertindak sebelum waktunya. Kerusuhan pecah di beberapa provinsi di sekitar

Manila. Setelah berbulan-bulan pertempuran, balas dendam Spanyol memaksa pasukan revolusioner mundur ke perbukitan. Gencatan senjata dengan Spanyol berakhir pada Desember 1897. Emilio Aguinaldo, walikota dan komandan pasukan¹³⁴.

Para pemberontak membayar dalam jumlah besar dan diizinkan untuk melakukan perjalanan ke Hong Kong dengan para pemimpin lain, dan Spanyol juga menjanjikan reformasi dalam pemerintahan lokal Spanyol. Namun reformasi berjalan lambat, kelompok-kelompok kecil pemberontak curiga terhadap janji Spanyol untuk mengangkat senjata lagi, dan bentrokan meningkat di beberapa bagian Filipina. Sementara itu, hampir bersamaan, terjadi perang antara Spanyol dan Amerika Serikat (AS).

Setelah kemenangan Angkatan Laut AS di Pertempuran Teluk Manila pada Mei 1898, Aguinaldo dan rombongannya kembali ke Filipina dengan bantuan Laksamana George Dewey. Mempercayai dukungan Amerika Serikat, Aguinaldo mengatur ulang pasukannya dan segera membebaskan beberapa kota di selatan Manila. Sementara itu, pasukan AS mendarat di kota Manila dengan bantuan vital dari pasukan kemerdekaan Filipina.

Upaya untuk mendamaikan demokrasi yang diperkenalkan di AS dan kemudian di pemerintah daerah Filipina, yang telah terbiasa dengan sistem nyata bagi penduduknya, cukup meresahkan bagi sebagian besar orang Amerika sendiri.

¹³⁴ Bernadette Aderi Puspaningrum, "Sejarah Berdirinya Amerika Serikat Hingga Pembentukan Konstitusinya Halaman All - Kompas.Com."

Sejak awal, memberdayakan orang Filipina untuk menjalankan pemerintahan mereka sendiri dan akhirnya memperoleh kemerdekaan adalah rasionalisasi penting dari hegemoni AS di Filipina.

Perbedaan politik antara dua partai politik besar di AS berpusat pada bagaimana pemerintahan mandiri lokal di Filipina harus dilakukan dan pada tanggal berapa kemerdekaan harus diberikan kepada Filipina. Ini paling signifikan sebagai tonggak dalam perkembangan Otonomi Filipina.

Di bawah ketentuan Jones Act, Komisi dihapuskan dan digantikan oleh Senat 24 anggota, hampir seluruhnya dipilih. Pemilih diperluas menjadiorang yang semuanya berpendidikan. Namun, beberapa batasan signifikan dari otonomi Filipina tetap ada. Pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap menjadi hak prerogatif eksklusif Amerika Serikat. Arahan Amerika atas urusan dalam negeri Filipina dilaksanakan terutama melalui Gubernur Jenderal. Namun, sedikit lebih dari satu dekade pemerintahan AS yang hati-hati di Filipina terlalu singkat untuk membangun pola yang bertahan lama. Sementara AS menyediakan 51% dari layanan sipil pada tahun 1903, hanya 29% pada tahun 1913 dan 6% pada tahun 1923¹³⁵.

Pada tahun 1916, dominasi legislatif dan yudikatif pemerintah Filipina juga membatasi peran cabang eksekutif dan administratif AS. Upaya AS untuk menciptakan peluang ekonomi yang setara lebih sederhana dan kurang berhasil. Di negara agraris, pola kepemilikan tanah sangat penting. Kecenderungan menuju konsentrasi properti yang lebih besar yang dimulai pada abad ke-19 terus berlanjut meskipun ada beberapa hambatan hukum

selama periode kolonialisme AS di Filipina.

Perkebunan milik AS yang luas diblokir, tetapi pembatasan hukum tidak banyak berdampak pada orang Filipina yang memiliki koneksi baik yang ingin mengumpulkan kekayaan.

Persentase petani penyewa berlipat ganda antara tahun 1900 dan 1935, dan frustrasi penyewa meletus dalam tiga pemberontakan kecil yang terjadi di pulau Luzon Tengah selama tahun 1920-an dan 1930-an: Kebijakan perdagangan AS mengarah pada penyebaran kekuatan ekonomi. Mulai tahun 1909, Undang-Undang Tarif Payne-Aldrich mengizinkan produk Filipina memasuki pasar AS secara bebas, sekaligus membebaskan produk AS yang diproduksi terutama di Filipina dari tarif Filipina. Arus bebas impor AS merupakan faktor penting dalam pertumbuhan industri Filipina. Produk pertanian berorientasi ekspor, terutama gula, laku keras di pasar AS yang terlindung.

c) Masa Awal Kemerdekaan

Pada bulan November 1965, Ferdinand E. Marcos terpilih sebagai Presiden Filipina. Pemerintahannya menghadapi masalah ekonomi yang serius, diperburuk oleh korupsi yang merajalela, penghindaran pajak dan penyelundupan.

¹³⁵ aliya hamida, "Perkembangan Partai Politik Di Amerika Serikat - Kompasiana.Com."

Pada tahun 1969 Marcos terpilih kembali sebagai Presiden Filipina, menjadi orang pertama yang memenangkan dua pemilihan berturut-turut. Program kampanyenya termasuk menegosiasikan kembali kesepakatan-kesepakatan besar dengan AS dan berdagang dengan negara-negara komunis. Gagasan Filipina sebagai pos terdepan Kristen di Asia semakin digantikan oleh keinginan untuk mengembangkan identitas budaya Asia. Artis, musisi, dan penulis mulai mencari tema pra-Spanyol untuk inspirasi. Hal penting dalam periode ini adalah kecenderungan mencari identitas budaya melalui bahasa nasional, Pilipino. Namun, bahasa Inggris tetap menjadi bahasa bisnis, sebagian besar dokumen pemerintah, dan sebagian besar Perguruan Tinggi¹³⁶.

Marcos mendekati akhir masa jabatannya. yang secara konstitusional dibatasi delapan tahun, memiliki tujuan yang lebih terbatas. Dia mendorong untuk mengadopsi gaya pemerintahan parlementer yang akan memungkinkan dia untuk tetap berkuasa. Dia khawatir konstitusi baru tidak akan berlaku sebelum dia kehilangan manfaat dari jabatannya. Pada saat yang sama, investor asing, terutama AS, merasakan tekanan yang meningkat dari nasionalis ekonomi di parlemen Filipina.

Pada bulan September 1972, Marcos mendeklarasikan darurat militer, mengklaim bahwa itu adalah pertahanan terakhir terhadap kekacauan yang berkembang yang disebabkan oleh demonstrasi mahasiswa yang semakin keras dan dugaan ancaman dari seorang komunis menjadi pesta.

¹³⁶ "Hari Ini Dalam Sejarah: Filipina Deklarasikan Kemerdekaan Dari Spanyol Halaman All - Kompas.Com."

Pemberontakan yang diselenggarakan oleh Partai Komunis Filipina (CPP) dan gerakan separatis Muslim Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF). Salah satu tindakan pertamanya adalah penangkapan politisi oposisi di Kongres dan Konvensi Konstitusi. Reaksi publik awal terhadap darurat militer sebagian besar positif, kecuali di wilayah Muslim selatan, di mana pemberontakan separatis yang dipimpin MNLF pecah pada tahun 1973. Meskipun upaya suam-suam kuku untuk menegosiasikan gencatan senjata, pemberontakan terus mengklaim ribuan tentara dan korban sipil. Pemberontakan komunis menyebar dengan pembentukan Front Demokratik Nasional (NDF), sebuah organisasi yang menaungi CPP dan kelompok komunis lainnya¹³⁷.

B. Bentuk Pemerintahan Negara Filipina

Filipina adalah negara republik. Kepala negara dan pemerintahan di Filipina adalah presiden, yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Presiden dipilih untuk masa jabatan enam tahun. Wakil presiden sekarang dipilih secara langsung dan terpisah dari pemilihan presiden. Negara kepulauan ini memiliki bendera biru, merah dan putih¹³⁸.

¹³⁷ Sardiman AM, *Kemenangan Komunis Vietnam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Asia Tenggara*

¹³⁸ Permadi Suntama, "Profil Negara Filipina: Bentuk Pemerintahan, Letak, Iklim, Penduduk."

Pada bagian putih terdapat simbol berupa matahari dan bintang. ²¹ Mata uang resmi Filipina adalah peso. Ibu kota Filipina adalah Manila. Pemerintah Filipina (Filipina: Pamahalaan ng Pilipinas) adalah pemerintah nasional Negara Kesatuan Filipina. Pemerintah Filipina mengadopsi sistem presidensial, demokrasi perwakilan, dan republik dimana Presiden Filipina sekaligus Kepala Negara kepala pemerintahan dalam pluriform sistem multi-partai.

Pemerintah terdiri dari tiga cabang yang saling bergantung: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan setiap cabang dijamin oleh Konstitusi Filipina sebagai berikut: Kekuasaan legislatif adalah bikameral (bikameral) Kongres Filipina – Senat adalah Majelis Tinggi dan Dewan adalah wakilnya adalah House of Commons Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden. Kekuasaan peradilan dilaksanakan di pengadilan dengan Mahkamah Agung Filipina sebagai badan peradilan tertinggi.

Data Filipina

Filipina adalah republik demokrasi kesatuan yang terdiri dari 76 provinsi. Sistem pemerintahan Filipina adalah presidensial. Filipina merupakan negara jajahan barat yang memperoleh kembali kemerdekaannya pada tanggal 4 Juli 1946 setelah dijajah oleh Spanyol selama 3 abad dan dimiliki oleh Amerika Serikat selama 50 tahun, dan negara tersebut dilatih dalam pemerintahan sendiri oleh Amerika Serikat.

Pemerintah Filipina berdasarkan Konstitusi Tahun 1, ¹⁸ Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Presiden dibantu oleh Kabinet Menteri. Badan legislatif terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Mahkamah Agung, yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung dan 14 Hakim Agung, diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Kehakiman. Pemerintah daerah dari 81 provinsi, 118 kota otonom, dan lebih dari 1.500 kotamadya memiliki pejabat lokal yang dipilih oleh rakyat tetapi berada di bawah kendali pemerintah pusat

Beberapa provinsi selatan dengan populasi Muslim besar ditetapkan sebagai provinsi atau daerah otonom dan menerima hak istimewa. Filipina memiliki badan legislatif bikameral yang disebut Kongres Filipina. House of Lords, atau Senat, memiliki 24 anggota yang dipilih secara langsung untuk dua periode berturut-turut. Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki maksimal 260 anggota dengan masa jabatan tiga tahun. 208 perwakilan dipilih secara langsung dan 52 orang dipilih secara tidak langsung dari daftar nominasi kelompok minoritas adat.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dibatasi untuk tiga kali masa jabatan berturut-turut. Dua pertiga suara di Kongres diperlukan untuk menolak hak veto sebuah RUU Usulan presiden. ²⁰ Dijabat 1907-1916 Komisi Filipina, dipimpin oleh Gubernur Jenderal Amerika Serikat, sebagai majelis tinggi parlemen kolonial saat menjalankan kekuasaan eksekutif. Pada tanggal 29 Agustus 1916, Kongres Amerika Serikat ²⁰ mengesahkan Undang-Undang Aturan Dalam Negeri Filipina, atau biasa dikenal sebagai

Undang-Undang Jones, yang membuka jalan bagi pembentukan Kongres Filipina dengan dua kamera. Senat bertindak sebagai majelis tinggi sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat bertindak sebagai majelis rendah. ²⁰ Presiden Komisaris Filipina Manuel L. Quezon mendorong Presidennya, Sergio Osmeña, untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Senat, tetapi Osmeña lebih memilih untuk mengepalai House of Commons. ²⁰ Quezon kemudian mencalonkan diri sebagai Senat dan menjabat sebagai Presiden Senat berikutnya selama 19 tahun (1916-1935)¹³⁹.

Presiden Senat, yang menjabat hingga tahun 2017, adalah Juan Ponce Enrile. Presiden Filipina kesebelas, Corazon Aquino, membentuk Komisi Konstitusi Filipina untuk mengumumkan Konstitusi 1. Konstitusi diadopsi melalui referendum. Hasil referendum 3 Februari 1 menunjukkan bahwa rakyat Filipina menerima konstitusi baru. Isi konstitusi adalah pembentukan perwakilan tripartit Filipina, yaitu eksekutif, legislatif dengan sistem bikameral dan yudikatif. Sistem pemerintahan sebelumnya, sistem parlementer, dikembalikan ke sistem presidensial.

Pemilihan presiden berlangsung setiap enam tahun. Sampai hari ini, konstitusi adalah hukum tertinggi di Filipina¹⁴⁰

¹³⁹ Oktaviyani DS, "Deskripsi Penyajian Dan Analisis Data" (2017): 82–103.

¹⁴⁰ Fatimah Mutiara Siregar, "Strategi Kemenangan Rodrigo Duterte Dalam Pemilu Presiden Di Filipina" (2017): 1–23.

A. Sistem Politik Filipina

1. Partai Politik

Partai politik merupakan bagian integral dari sistem politik suatu negara. Definisi partai politik, menurut Carl J. Friedrich, adalah sekelompok individu yang terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk mengambil atau mempertahankan pemerintahan untuk para pemimpin partai mereka, dan atas dasar itu menyediakan anggota pada cita-cita partisan dan persyaratan materialnya. Sementara itu, menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah kelompok politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan melalui pemilihan tersebut dapat mengajukan calon untuk jabatan publik. Demokrasi membutuhkan partai politik sebagai penghubung antara pemerintah dan desa. Partai politik berperan penting sebagai jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, dan aspirasi tersebut akan direspon oleh pemerintah. Partai politik di Filipina dicirikan oleh fakta bahwa anggota partai politik berasal dari kalangan elit. Karenanya adanya kepentingan kelas yang dominan dalam hal sosial dan ekonomi. Adanya kekuasaan kelas dalam partai telah menyebabkan terbentuknya partai-partai yang konservatif dan paternalistik. Untuk memenuhi kepentingan partai, partai mengumpulkan sumber-sumber kepentingan. Filipina adalah negara yang menganut sistem multi partai.

Anggota partai politik dapat berganti partai sesuai dengan kepentingannya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dalam karir politiknya. Filipina dikenal sebagai negara yang memiliki dinasti politik yang salah satunya dapat dikaitkan dengan lemahnya partai politik di negara tersebut. Beberapa pihak memilih menggunakan kerabat dekat sebagai pemimpin partai. Hal ini memicu persaingan politik di Filipina hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi.

2. Gambaran Beberapa Partai di Filipina

Filipina merupakan sebuah negara yang menganut sistem multipartai yang menciptakan banyaknya partai-partai yang bermunculan. Berikut gambaran beberapa partai yang ada di Filipina

- **Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP)**

Laban Ng Demokratikong Pilipino (LDP) merupakan Partai Demokrasi Perjuangan Filipina. Partai LDP didirikan pada tahun 1988. Partai ini memilih untuk melakukan koalisi dengan partai lain. Asal mulanya dalam pembentukan Lakas ng Bayan (Laban) di tahun 1978 oleh Benigno Aquino Jr, kemudian pada tahun 1983 Laban bergabung dengan Partido Democratico (Partai Demokrasi Filipina) sebagai PDP-Laban oleh Jose Cojuangco, adik dari Corazon Aquino.

- **Nacionalista Party (NP)**

Partai Nasional merupakan partai tertua di Filipina saat ini. Partai ini didirikan sejak Maret 1907 dan menjadi organisasi politik pertama penyokong kemerdekaan yang diperbolehkan setelah tergulingnya pemerintahan kolonial Amerika tahun 1898.¹⁴ Secara historis partai nasionalis merupakan partai konservatif Filipina.

Pada pemilu 1907, Partai Nasionalis memegang kekuasaan politik di Filipina. Kemenangan Partai Nasionalis menyebabkan masa jabatan pertama Presiden Manuel L. Quezon sebagai Presiden 2. Sejak awal, Partai Nasionalis telah memperjuangkan kemerdekaan dengan cara damai. Partai-partai nasionalis bersaing dengan partai-partai liberal, dan dalam beberapa pemilu partai-partai nasionalis kalah dari partai-partai liberal. Hingga pemilu 2016, Partai Nasionalis telah memenangkan 6 pemilu, yaitu pemilu 1935, 1941, 1953, 1957, 1965, dan 1969.

Sejak awal, partai nasionalis telah menetapkan tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Filipina dengan cara damai. Selama ini partai nasionalis bertujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan. kaum nasionalis secara damai berjuang untuk kemerdekaan. Partai-partai nasionalis bersaing dengan partai-partai liberal, dan dalam beberapa pemilu partai-partai nasionalis kalah dari partai-partai liberal. Hingga pemilu 2016, Partai

Nasionalistelah memenangkan 6 pemilu, yaitu pemilu 1935, 1941, 1953, 1957, 1965, dan 1969. Sejak awal berdirinya partai nasionalis memiliki tujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Filipina dengan cara-cara yang damai. Hingga sekarang partai nasionalis memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari belenggu kemiskinan.

- **Liberal Party (LP)**

Partai liberal merupakan sebuah partai politik pemerintahan dan partai liberal di Filipina didirikan oleh Presiden Senat Manuel Roxas pada tanggal 19 Januari 1946. Pada April 1945 partai liberal berhasil mengantarkan Manuel Roxas sebagai Presiden ke-5 Filipina. Partai ini terus mendapatkan kejayaannya sampai 2 periode berturut-turut pemilihan umum di Filipina. Partai ini kemudian memenangkan pemilu kembali pada tahun 1961 dengan mengantarkan Diosdado Macapagal sebagai Presiden Filipina ke-9. Setelah itu selama 45 tahun partai liberal tidak pernah lagi memegang kekuasaan. Partai liberal kembali memenangkan pemilu Presiden pada tahun 2010 yang menjadikan Benigno Aquino III sebagai seorang Presiden.

- **Nationalist People's Coalition (NPC)**

Partai Koalisi Rakyat Nasionalis adalah sebuah partai politik

konservatif Filipina yang didirikan sejak 1992 oleh seorang kandidat Presiden masa itu Eduardo Cojuangco, Jr. partai ini dibentuk setelah beberapa anggota Partai Nacionalista keluar karena berbeda pendapat dengan pemimpin partai Nacionalista dalam mengusung calon untuk pemilu 1992. Pada tahun 1998 partai NPC mendukung

Joseph Estrada sebagai calon Presiden dan berhasil memenangkan pemilu. NPC mengalami pasang surut dalam perpolitikan, tetapi hingga tahun 2016 partai ini tetap eksis dan menempatkan beberapa anggotanya dalam lembaga legislatif Filipina.

- **The Partido Demokratiko Pilipino-Lakas Ng Bayan (PDP-Laban)**

Partai Demokratik Filipina-Kekuatan Rakyat dikenal sebagai PDP-Laban merupakan salah satu partai politik yang berkuasa di Filipina pada tahun 2016. PDP-Laban merupakan gabungan antara Partido Demokratiko Pilipino dan Lakas Ng Bayan. PDP terbentuk pada tahun 1982 oleh Aquilino Pimentel, Jr dan beberapa kelompok yang menolak pemerintahan otoriter Ferdinand Marcos Presiden ke-10 Filipina.

Pada tahun 1986 PDP-Laban menjadi partai oposisi terbesar dalam pemilu Presiden Ferdinand Marcos dan mengusung Corazon

Aquino sebagai calon Presiden. Setelah ± 30 tahun berlalu, pada tahun 2016 PDP- Laban kembali mengikuti pemilu sebagai partai pengusung untuk calon Presiden Rodrigo Duterte. Dan PDP-Laban berhasil memenangkan pemilu dan menjadikan Rodrigo Duterte sebagai Presiden ke-16 Filipina.

- **National Unity Party (NUP)**

Partai Persatuan Nasional adalah partai politik baru di Filipina yang dibentuk pada tahun 2010. Partai ini kemudian mengajukan permohonan akreditasi pada 27 Januari 2011 oleh Komisi Pemilihan. Dan pada tanggal 5 Oktober 2011 partai ini telah resmi sebagai partai politik nasional di Filipina. Partai Persatuan Nasional memiliki slogan “One Nation, One Future” untuk menciptakan kesatuan sebagai dasar untuk pembangunan dan perdamaian di Filipina. Dalam pemilihan umum Presiden NUP pertama kali mengikuti pada tahun 2016 dengan mendukung Rodrigo Duterte sebagai calon Presiden yang kemudian berhasil memenangkan pemilu¹⁴¹

¹⁴¹ WIJI SETIAWAN, *PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA*, 2017.

C. Bukti Pelaksanaan

Sistem Pemilihan Umum Filipina

Pemilu (pemilu) telah menjadi bagian penting dari pemerintahan yang demokratis sejak abad ke-17. Pemilu merupakan mekanisme pemilihan wakil rakyat yang diharapkan dapat mewakili suara rakyat dalam pemerintahan. sehingga politisi bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan opini publik. Pemilihan umum saat ini merupakan salah satu ujian demokrasi. Amerika Serikat menjadi pelopor pembangunan demokrasi di Filipina pada era kolonial tahun 1898. Amerika Serikat membuat demokrasi Filipina menyerupai demokrasi Amerika. Ini terbukti di badan legislatif AS dan Filipina, yang memiliki Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kedua negara ini juga mengadakan pemilihan presiden dengan hak pilih universal. Dalam pemilihan presiden, Filipina menggunakan sistem mayoritas dimana calon dengan suara terbanyak dipastikan akan memenangkan pemilihan. Dalam pemilihan Filipina, tidak hanya presiden tetapi juga anggota parlemen yang dipilih. Menurut Harris G. Warren, pemilu adalah pemilu di mana warga negara memilih pejabat mereka dan memutuskan apa yang mereka inginkan dari pemerintah.

Dalam mengambil keputusan, warga negara menentukan hak apa yang mereka miliki dan ingin pertahankan.¹⁶ Pemilu digunakan masyarakat sebagai momen untuk memilih pemimpin yang diharapkan membawa perubahan baik di suatu negara.

Pemilu juga dijadikan sebagai barometer keberhasilan sebuah demokrasi di suatu negara. Dalam era demokrasi, masyarakat dan pemerintah dapat saling melengkapi untuk menjaga kelangsungan hidup suatu negara di masa depan. Filipina adalah salah satu negara dengan demokrasi yang kuat. Setiap 6 tahun, rakyat memilih presiden. Pemilihan ini tentunya dilakukan secara bertahap¹⁴².

Tahapan ini dimulai dengan pendaftaran pemilih, penetapan jumlah anggota yang akan dipilih per daerah pemilihan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan. Pemilu selalu identik dengan kampanye calon. Kampanye ini bertujuan untuk menyampaikan visi dan misi para calon agar masyarakat dapat dengan mudah menentukan calon mana yang sesuai dengan harapan masyarakat di pemerintahan. Kampanye tersebut dilakukan agar mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya dari masyarakat, yang juga merupakan salah satu strategi kandidat untuk memenangkan pemilu. Pemilu di Filipina diadakan setiap 6 tahun.

¹⁴² Alexander Haryanto, "Bagaimana Sistem Pemilihan Presiden Di Filipina & Apa Bedanya?"

Pemilu Filipina dilakukan untuk memilih Presiden secara langsung, pemilihan anggota senat, dan 18 juga anggota House of representative selama 3 tahun sekali. Sebagai negara demokrasi, pemilu Filipina dilakukan oleh rakyat yang telah berusia minimal 18 tahun saat pemilu berlangsung. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan untuk masa jabatan 6 tahun hal ini tertuang dalam konstitusi 1987 dan Presiden hanya diperbolehkan menjabat selama 2 periode ¹⁴³.

D. Kekurangan Dan Kelebihan Pemerintahan Filipina

Sistem pemerintahan presidensial sendiri tidak luput dari nilai kelebihan dan kekurangannya dalam penerapannya di dalam negeri, dari segi kelebihan dan kekurangan tersebut, kekurangannya adalah adanya konflik antara eksekutif dan legislatif mungkin menjadi kebutuhan adalah hasil dari konkordansi dua badan independen yang dibuat oleh pemerintah presidensial, yang mungkin akan berkonflik. Kekuatan sementara. Mandat terakhir Presiden pada tahun mewakili periode waktu yang terbatas dan tidak berkelanjutan, itulah sebabnya dia tidak mengizinkan beberapa penyesuaian yang diperlukan oleh keadaan. Menurut Bagehot, sistem ini kurang elastis, semuanya kaku dan sikap revolusioner yang dituntut pemerintah sama sekali tidak ada.

¹⁴³ "BAB II DINAMIKA POLITIK FILIPINA."

Sistem ini bekerja atas dasar pemenang atas semua. Aturan yang cenderung menjadikan politik demokrasi sebagai permainan dengan segala macam konflik sedangkan keunggulannya adalah stabilitas lembaga eksekutif berdasarkan mandat presiden. Ini berbeda dengan sistem parlementer di mana kantor eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen.

Dalam sistem presidensial, kabinet tidak bergantung pada mosi legislatif, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Pemilihan kepala pemerintahan oleh rakyat dapat dikatakan lebih demokratis daripada pemilihan tidak langsung. Demokrasi tidak mengharuskan pemilihan semua pejabat pemerintah oleh rakyat, tetapi argumen bahwa perdana menteri, yang merupakan pejabat terpenting dan berkuasa dalam pemerintahan demokratis, harus dipilih langsung oleh rakyat, memiliki validitas yang kuat. Pemisahan kekuasaan berarti pemerintahan yang dibatasi, perlindungan kebebasan individu dari tirani negara

Keuntungan dari sistem presidensial adalah yang menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat dipraktikkan sekaligus menerapkan sistem multipartai yang dapat mengakomodasi konfigurasi kekuasaan politik dalam masyarakat yang dikaruniai ketentuan konstitusional untuk mengurangi dampak negatif atau kelemahan yang melekat pada sistem presidensial.

Berdasarkan berbagai karakteristik, kelebihan dan kekurangan analisis sistem presidensial, hampir semua ahli sepakat bahwa salah satu ciri utama

sistem presidensial adalah presiden memiliki peran ganda, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Meski sulit membedakan secara jelas jabatan Presiden sebagai kepala negara, namun dapat dikatakan bahwa itu adalah lambang negara. Dalam konteks negara-negara besar dengan populasi yang beragam dan besar, sistem presidensial ini cukup dan efektif untuk menjamin sistem pemerintahan yang kuat, namun permasalahan terkait dinamika demokrasi seringkali muncul karena kuatnya otoritas yang dimiliki seseorang. Indonesia dan Filipina termasuk negara dengan sistem pemerintahan presidensial, yang karena kelemahan yang muncul memicu gelombang demokratisasi yang kuat dan akhirnya berhasil menggulingkan rezim otoriter di kedua negara tersebut.

Untuk memastikan bahwa kelemahan yang melekat pada sistem presidensial dapat diatasi, kedua negara telah menetapkan batasan yang dirancang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan yang kuat dan efektif dapat diterapkan secara terbatas dan bertanggung jawab.

¹² Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial: Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun. Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya. Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan

eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Sedangkan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial: Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak. Sistem pertanggung jawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama¹⁴⁴.

¹⁴⁴ diah senja, "PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN FILIPINA" (2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Rachman, Serafica Ghisca. "Bentuk Dan Sistem Pemerintahan Yang Berlaku Dunia." *KOMPAS.Com*. Last Modified 2022. Accessed November 3, 2022.
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/08/190000969/Bentuk-Dan-Sistem-Pemerintahan-Yang-Berlaku-Dunia-?Page=All>.
- Adryamarthanino, Verelladevanka. "Resume Sejarah Kemerdekaan Indonesia." *KOMPAS.Com*. Last Modified 2022. Accessed November 27, 2022.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/08/16/170000379/Resume-Sejarah-Kemerdekaan-Indonesia?Page=All>.
- Aulia. "Bentuk Pemerintahan Parlemen Dan Politik Di Negara Thailand - Gurupkn.Com."
- Ibrahim, Muh. Nur El. *Bentuk Negara Dan Pemerintah RI*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2010.
- Moh. Koesnardi, Bintan R.Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1995.
- Norhikmah. "Bab III. Kerangka Teori." In *Tinjauan Yuridis Terhadap Penguatan Konsep Sistem Pemerintahan Presidensil Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945*, 23–45. Riau: Repository-Uin-Suska.Ac.Id, 2022.
<https://repository.uin-suska.ac.id/58634/>.
- Pamungkas, Fikry Z. "Sistem Pemerintahan Negara Di ASEAN Secara Singkat," 2022. Prof.Drs.C.S.T Kansil, S.H., And M.H. Christine S.T.Kansil, S.H. *Sistem*

Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Salsabila, Desri Tiara. "Pengertian Dan Macam-Macam Bentuk Negara"

(2020). Septian Wira, Prianto. "BAB II. Tinjauan Pustaka." In *Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan Undang-Undnag Dasar Tahun 1945*, 1:5–24, 2018.

Budiman, Muslimin. "Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial."

Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum 20, No. 1 (2017): 29–47.

CNBC, Tim Redaksi. "Sah! Indonesia Kini Punya 38 Provinsi, Ini Daftar

Lengkapny."

 Accessed November 27, 2022.

[https://www.cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-daftar-lengkapny)

[389088/Sah-Indonesia-Kini-Punya-38-Provinsi-Ini-DaftarLengkapny.](https://www.cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-daftar-lengkapny)

Fisipol. "Kelebihan Dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan

Parlementer · Fakultas Isipol Terbaik Di Sumut." *Fisipol.Uma.Ac.Id*. Accessed

November 27, 2022. [https://fisipol.uma.ac.id/kelebihan-dan-kekurangan-](https://fisipol.uma.ac.id/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer/)

[sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer/.](https://fisipol.uma.ac.id/kelebihan-dan-kekurangan-sistem-pemerintahan-presidensial-dan-parlementer/)

Konstitusi, Mahkamah. "Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945||Latar Belakang, Proses, Dan Hasil

Pembahasan, 1999-2002." In *Buku I Edisi Revisi*, 225. Jakarta: Sekretariat

Jenderal, N.D.

Marzuki, Masnur. "Pemisahan Kekuasaan Dan Prinsip Checks And Balances

Dalam UUD 1945. . Makalah Pada Acara Pendidikan Kesadaran Berkonstitusi

Untuk Guru SMP." Kota Yogyakarta, N.D. Ricklefs, MC. *Sejarah Indonesia*

Modern 1200-2008. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Sunarti, Linda. "Sejarah Indonesia Dalam Konteks Politik Global Dan Regional."

Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya 10, No.

2(2016): 161–173.

Widihastuti, Ratna. "Sejarah Singkat Kemerdekaan Indonesia." *KOMPASIANA*. Last

Modified 2012. Accessed November 27, 2022.

[https://www.kompasiana.com/widihastuti.ratna/551c12d7813311b67f9de25](https://www.kompasiana.com/widihastuti.ratna/551c12d7813311b67f9de257/sejarah-singkat-kemerdekaan-indonesia)

[7/sejarah-singkat-kemerdekaan-indonesia](https://www.kompasiana.com/widihastuti.ratna/551c12d7813311b67f9de257/sejarah-singkat-kemerdekaan-indonesia).

Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek

Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12,

No. 2 (2018): 119.

Abdul Rozak S.Pd. "Penjelasan Sistem Pemerintahan Malaysia, Ciri, Kelebihan,

Dan Kekurangannya – Dosenppkn.Com."

Adryamarthanino, Verelladevanka. "Siapa Yang Pernah Menjajah Malaysia?"

Halaman All - Kompas.Com."

Early, Ani. "Mengenal Sejarah Kemerdekaan Malaysia - Qelola Blog."

Ginting, Moniqui. "(8) Sistem Pemerintahan Negara Malaysia | Monique Ginting

-Academia.Edu."

Hak-Hak, Dan, Malaysia Di, Laut Teritorial, And Dan Perairan. "UU No 1 Th 1983

Ttg Pengesahan Perjanjian Antara RI Dan Malaysia Compiled By: 21 Yayasan

Titian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1983 Tentang

Pengesahan Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Malaysia Tentang Rejim

Hukum Negara Nusantara P” (2001).

Nadia, Yopi. “Bentuk-Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN Halaman All - Kompas.Com.”

Nadilla Syabriya. “Sejarah Berdirinya Negara Malaysia : Okezone News.”

Okto Dellon Sunuraz Putra, S.Pd. “Orde Baru.”

Reditya, Tito Hilmawan. “Berbeda Dengan Indonesia, Begini Cara Kerja Dan Sistem Pemilu Di Malaysia Halaman All - Kompas.Com.”

Fauzi, A. “[Rangkuman] Materi Lengkap: Bentuk Pemerintahan Thailand!”

Houton, J. *Geek In Thailand: Discovering The Land Of Golden Buddhas, Pad ThaiAnd Kickboxing*. Tuttle Publishing, 2016.

Kislenko, A. *Culture And Customs Of Thailand*. Culture And Customs Of Asia. Greenwood Press, 2004.

Manjakan. “Sistem Pemerintahan Thailand : Beserta Struktur, Tugas Dan Fungsinya.”

Mishra, P P. *The History Of Thailand*. Greenwood Histories Of The Modern Nations. Greenwood, 2010.

Rusdi, Ahmad. “Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia & Thailand.”

Adryamarthanino, Verelladevanka. “Ngo Dinh Diem, Presiden Pertama Vietnam Selatan.” Accessed November 27, 2022.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/30/190000279/ngo-dinh-diem-presiden-pertama-vietnam-selatan?page=all>.

Gischa, Serafica. “Bentuk-Bentuk Pemerintahan Negara ASEAN.” *KOMPAS.Com*.

Last Modified 2022. Accessed November 27, 2022.

<https://www.kompas.com/skola/read/2022/09/05/183000169/bentuk-bentuk-pemerintahan-negara-asean?page=all>.

Imamal-Haq, M Ridla, Kurnia Islami, Hendro Prasetyo, And Aisyah Permata Erisnaeni. "REPUBLIK DEMOKRATIS LAOS (Lao People ' S Democratic Republic)" (2015).

Koesrianti. *Association Of South East Asian Nation (ASEAN): Sejarah Konstitusi DanIntegrasi Kawasan*. Surabaya: Airlangga University Press., 2014.

MS, Zulfikar. *Kaffahisme: Ideologi Ekonomi Masa Depan*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.

Ningsih, Widya Lestari. "Apakah Vietnam Masih Negara Komunis?" *KOMPAS.Com*.

Last Modified 2021. Accessed November 27, 2022.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/30/080000079/apakah-vietnam-masih-negara-komunis?page=all>.

———. "Bersatunya Vietnam Utara Dan Selatan." *KOMPAS.Com*. Last Modified 2021. Accessed November 27, 2022.
<https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/29/150000279/bersatunya-vietnam-utara-dan-selatan?page=all>.

Novia Aisyah. "Profil Negara Berbentuk Republik Sosialis Di Asia Tenggara & Kepala Negaranya." Last Modified 2021. Accessed November 27, 2022.
<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5727876/profil-negara-berbentuk-republik-sosialis-di-asia-tenggara--kepala-negaranya>.

Putri, Vanya Karunia Mulia. "Vietnam, Negara ASEAN Yang Pernah Terbagi Menjadi 2." *KOMPAS.Com*. Last Modified 2021. Accessed November 27,

2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/05/153359169/vietnam-negara-asean-yang-pernah-terbagi-dua?page=all>.

Setiawan., Alan. “Hubungan Bilateral Vietnam - Amerika Serikat Dalam Bidang Politik Dan Ekonomi Periode 2001-2010” (2016): 1–32.

Siti Nazura. “MAKALAH DAMPAK PENERAPAN IDEOLOGI KOMUNIS,” 2016.

Zulfikar, Fahri. “Negara Vietnam: Ibu Kota, Letak Geografis, Dan Kondisi Alamnya.” *DetikEdu*. Last Modified 2021. Accessed November 27, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5665118/negara-vietnam-ibu-kota-letak-geografis-dan-kondisi-alamnya>.

“American Soldiers’ Lives : The Vietnam War.” *Greenwood Press* (2007): 50. “Daftar Presiden Vietnam.” *Profilpelajar.Com*. Last Modified 2022. Accessed November 27, 2022. https://profilpelajar.com/daftar_presiden_vietnam.

The Wars In Vietnam. 1975. Hippocrene Books, Inc, N.D.

Admin. “Kelebihan Dan Kekurangan Monarki Parleментар.” Accessed November 26, 2022. <https://hasilcopa.com/kelebihan-dan-kekurangan-monarki-parleментар>.

Budiana, M. “Politik Dan Pemerintahan Serta Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kerajaan Kamboja.” *Jurnal Online Westphalia* 12, No. 2 (2013): 365–378.

Budiana, Oleh M. “Politik Dan Pemerintahan Serta Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Kerajaan Kamboja” (2013): 14. <http://files/70/budiana-2013-politik-dan-pemerintahan-serta-pelaksanaan-pemilih.pdf>.

Putri, Vanya Karunia Mulia. “Kondisi Geografis Negara Kamboja.” *KOMPAS.Com*.

Last Modified 2022. Accessed November 26, 2022.
<https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/30/070000169/kondisi-geografis-negara-kamboja>.

Septiani, Angelina. "Nasionalisme Negara Kamboja." *Kompasiana.Com*. Last Modified 2021. Accessed November 26, 2022.
<https://www.kompasiana.com/angelinaseptiani0650/60cd9c0006310e7c59440672/nasionalisme-negara-kamboja>.

Yulianty, Diana. "PEMERINTAHAN KHMER MERAH DI KAMBOJA DAN KEJATUHANNYA (1975—1979)" (2009): 89. <http://files/84/yulianty-2009-pemerintahan-khmer-merah-di-kamboja-dan-kejatuhann.pdf>.

Zulfikar, Fahri. "Negara Kamboja: Ibu Kota, Bentuk Pemerintahan, Dan Letak Geografisnya." *Detikedu*. Last Modified 2021. Accessed November 26, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5664837/negara-kamboja-ibu-kota-bentuk-pemerintahan-dan-letak-geografisnya>.

Aljunied, Derek Heng And Syed Muhd Khairudin. "Singapore In Global Histo" 14(2014).

Christiastuti, Novi. "Fakta-Fakta Halimah Yacob, Muslimah Yang Jadi Presiden Singapura." *Detiknews*. Last Modified 2017. Accessed November 26, 2022. <https://news.detik.com/internasional/d-3641453/fakta-fakta-halimah-yacob-muslimah-yang-jadi-presiden-singapura>.

Damayanti, Seruni. "The Origin Of Singapore(Asal Usul Negara Singapura)." *Majalahjustforkid.Com*.

Dwijayanti, Rizky. "Kontestasi Triple Minority Pada Diri Halimah Yacob Pada

- Pemilihan Presiden Singapura Tahun 2017 Ditinjau Dari Prespektif Politik Identitas.” *Jurnal Unair* (2018).
https://Repository.Unair.Ac.Id/79892/3/JURNAL_TP.34_18_Dwi_K.Pdf.
- Fallo, Adriana Rodina. “KUALITAS PEMIMPIN DALAM ORGANISASI SERTA IMPLEMENTASINYA SECARA EMPIRIS DI INDONESIA.”
- Fitriani, Annisa. “Gaya Kepemimpinan Perempuan.” *Jurnal Tapis* 11, No. 2 (2015): 1–23.
- Majid, A. “Belajar Dari Kegagalan Pemimpin.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 12, No. 1 (2014): 19–24.
- Putro, Bambang Dharwiyanto. ““ Cruel Temtation ': A Case Study Of A Korean Drama And Its Reception In The Singaporean Community”,” No. 3 (2021).
- Rahmasari, Dianti Ayunisa. “GAYA KEPEMIMPINAN HALIMIAH YACOB SEBAGAI PRESIDEN SINGAPURA” (2022): 0–13.
- Tantra, Ignatius Hubert. “Singapore, A Growing Economic Titan From South East Asia.” *Jurnal Sentris* 2, No. 2 (2020): 42–54.
- Butler, R., & Hinch, T. *Tourism And Indegenous Peoples: Issues And Implications*. United Kingdom(UK): Elsevier Ltd, 2007.
- Dayley, R., & Neher, C. D. *Southeast Asia In The New International Era*. United States. United States: Westview Press, 2013.
- Harrison, D., & Schipani, S. “Lao Tourism And Poverty Alleviation: Community-Based Tourism And The Private Sector.” *Current Issues In Tourism* (2007): 194–230.
- Imamal-Haq, M Ridla, Kurnia Islami, Hendro Prasetyo, And Aisyah Permata

Erisnaeni. "REPUBLIK DEMOKRATIS LAOS (Lao People ' S Democratic Republic)" (2015).

RIDWAN, RIFLAN RIFALDI. "ANALISIS PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH LAOS PADA SEKTOR PARIWISATA UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN ERA KHAMTAI SIPHANDON-CHOUMMALY SAYASONE." *Https://Dspace.Uii.Ac.Id* 63, No. 2 (2018): 1-3.

[Http://Forschungsunion.De/Pdf/Industrie_4_0_Umsetzungsempfehlungen.Pdf](http://Forschungsunion.De/Pdf/Industrie_4_0_Umsetzungsempfehlungen.Pdf)
%0Ahttps://Www.Dfki.De/Fileadmin/User_Upload/Import/9744_171012-KI-Gipfelpapier-Online.Pdf%0Ahttps://Www.Bitkom.Org/Sites/Default/Files/Pdf/Presse/Anhaenge-An-Pis/2018/180607-Bitkom.

Stuart-Fox, M. *A History Of Laos*. Australia: Cambridge University Press, 1997.

Zulfikar, Fahri. "Negara Laos: Ibu Kota, Sistem Pemerintahan, Dan Kondisi Geografisnya." *Detikedu*. Last Modified 2021. Accessed November 26, 2022.
[Https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5664839/Negara-Laos-Ibu-Kota-Sistem-Pemerintahan-Dan-Kondisi-Geografisnya](https://Www.Detik.Com/Edu/Detikpedia/D-5664839/Negara-Laos-Ibu-Kota-Sistem-Pemerintahan-Dan-Kondisi-Geografisnya).

"Disadvantages Of Communism." *Boundless Business*.

"SEJARAH LAOS." *Https://P2k.Unkris.Ac.Id/*. Last Modified 2021. Accessed November 26, 2022. [Http://P2k.Unkris.Ac.Id/Id3/2-3065-2962/Laos_42999_P2k-Unkris.Html](http://P2k.Unkris.Ac.Id/Id3/2-3065-2962/Laos_42999_P2k-Unkris.Html).

"The Benefits Of Communism." *Boundless*. Last Modified 2015.
[Https://Www.Boundless.Com/Business/Textbooks/Boundless-Business-Textbook/Economics-And-Business-%0A2/Businesses-Under-Communist-](https://Www.Boundless.Com/Business/Textbooks/Boundless-Business-Textbook/Economics-And-Business-%0A2/Businesses-Under-Communist-)

Systems-31/The-Benefits-Of-Communism-166-7381/.

Alfian. *Militer Dan Politik : Pengalaman Beberapa Negara*. Jakarta: LIPI, 1970.

Dewi, Mutiara Ita. *Pengalaman Militer Burma : Ebuah Analisis Historis-Politis*,

N.D. Feit, Edward. *The Armed Bureaucrats*. Boston: Houghton Mifflin Company, 1973.

Garmabar, Padlika, And Universitas Singaperbangsa Karawang. "RESPON DUNIA TERHADAP KUDETA MILITER MYANMAR" 3, No. November 2020 (2021): 179–188.

Gischa, Vaanya Karunia Dan Serafica. "Sistem Pemerintahan Dan Penduduk Di Myanmar." *KOMPAS.Com*. Last Modified 2021. Accessed October 25, 2022.

<https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/30/130642769/Sistem-Pemerintahan-Dan-Penduduk-Di-Myanmar>.

Guyot, Dorothy. "The Burma Independence Army: A Political Movement In Military Garb Dalam Verinder Grover Ed." In *Politic And Government Of Asian Countries, Series 10 : Myanmar*, 169. New Delhi: Deep And Deep Publications Pvt.Ltd, 2000.

Huntington, Samuel P. *The Soldier And State*. Cambridge: Harverd University Press, 1957.

Ningsih, Verelladevanka Adryamarthanino, Widya Lestari. "Aung San Suu Kyi, Sosok Kontroversial Yang Terancam 150 Tahun Penjara." *KOMPAS.Com*. Last

Modified 2022. Accessed October 25, 2022.
<https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/04/090000779/Aung-San-Suu-Kyi-Sosok-Kontroversial-Yang-Terancam-150-Tahun-Penjara?Page=All>.

Perlmutter, Amos. *Militer Dan Politik*. Jakarta: Rajawali Pers, 1985.

Transnasional, Jurnal. "Reformasi Politik Dan Ekonomi Di Myanmar Pada Masa Pemerintahan Presiden U Thein Sein (2011-2013)" 6, No. 1 (2014): 1181–1193.

"Sejarah Singkat Myanmar Halaman 1 - Kompasiana.Com." Accessed October 18, 2022.
<https://www.kompasiana.com/yuniaindahl/60d15ff6bb4486391b679b44/Sejarah-Singkat-Myanmar>.

AM, Sardiman. *Kemenangan Komunis Vietnam Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Politik Di Asia Tenggara*. Liberty, 1976.

DS, Oktaviany. "Deskripsi Penyajian Dan Analisis Data" (2017): 82–103.

Griffith, Ernest S. "The Splendid Adventure. By The Rt. Honorable W. M. Hughes. (London: Ernest Benn, Limited. 1929. Pp. Xviii, 456.)." *American Political Science Review* 24, No. 1 (February 1930): 195–197.

Hamida, Aliya. “Perkembangan Partai Politik Di Amerika Serikat - Kompasiana.Com.”

Haryanto, Alexander. “Bagaimana Sistem Pemilihan Presiden Di Filipina & Apa Bedanya?”

Kahin, George McTurnan. “Nationalism And Revolution In Indonesia / George McTurnan Kahin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

Kardiyat Wiharyanto, A. “Lokasi: Sejarah Asia Tenggara, Dari Awal Tumbuhnya Nasionalisme Sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN.”

———. “Pembentukan Negara-Negara Nasional Di Asia Tenggara.” *Historia Vitae* 22 (2008).

Puspaningrum, Bernadette Aderi. “Sejarah Berdirinya Amerika Serikat Hingga Pembentukan Konstitusinya Halaman All - Kompas.Com.”

Senja, Diah. “PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN FILIPINA” (2017).

SETIAWAN, WIJI. *PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA*, 2017.

Siregar, Fatimah Mutiara. “Strategi Kemenangan Rodrigo Duterte Dalam Pemilu Presiden Di Filipina” (2017): 1–23.

Soham, M. “(1) Sejarah Dan Perkembangan Filipina | Manap Soham - Academia.Edu.”

Suntama, Permadi. “Profil Negara Filipina: Bentuk Pemerintahan, Letak, Iklim, Penduduk.”

“BAB I PENDAHULUAN.”

“BAB II DINAMIKA POLITIK FILIPINA.”

“Hari Ini Dalam Sejarah: Filipina Deklarasikan Kemerdekaan Dari Spanyol Halaman

All - Kompas.Com.”

“SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILIPINA DARI ERA KOLONIAL
HINGGA SEKARANG.”

AM, Sardiman. *Kemenangan Komunis Vietnam Dan Pengaruhnya Terhadap
Perkembangan Politik Di Asia Tenggara*. Liberty, 1976.

DS, Oktaviany. “Deskripsi Penyajian Dan Analisis Data” (2017): 82–103.

Griffith, Ernest S. “The Splendid Adventure. By The Rt. Honorable W. M. Hughes.
(London: Ernest Benn, Limited. 1929. Pp. Xviii, 456.)” *American Political
Science Review* 24, No. 1 (February 1930): 195–197.

Hamida, Aliya. “Perkembangan Partai Politik Di Amerika Serikat - Kompasiana.Com.”

Haryanto, Alexander. “Bagaimana Sistem Pemilihan Presiden Di Filipina & Apa
Bedanya?”

Kahin, George McTurnan. “Nationalism And Revolution In Indonesia / George
McTurnan Kahin | OPAC Perpustakaan Nasional RI.”

Kardiyat Wiharyanto, A. “Lokasi: Sejarah Asia Tenggara, Dari Awal Tumbuhnya
Nasionalisme Sampai Terbangunnya Kerja Sama ASEAN.”

———. “Pembentukan Negara-Negara Nasional Di Asia Tenggara.” *Historia Vitae*
22 (2008).

Puspaningrum, Bernadette Aderi. “Sejarah Berdirinya Amerika Serikat Hingga
Pembentukan Konstitusinya Halaman All - Kompas.Com.”

Senja, Diah. “PERBANDINGAN SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN FILIPINA” (2017).

SETIAWAN, WIJI. *PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM ANTARA INDONESIA DAN FILIPINA*, 2017.

Siregar, Fatimah Mutiara. “Strategi Kemenangan Rodrigo Duterte Dalam Pemilu Presiden Di Filipina” (2017): 1–23.

Soham, M. “(1) Sejarah Dan Perkembangan Filipina | Manap Soham - Academia.Edu.”

Suntama, Permadi. “Profil Negara Filipina: Bentuk Pemerintahan, Letak, Iklim, Penduduk.”

“BAB I PENDAHULUAN.”

“BAB II DINAMIKA POLITIK FILIPINA.”

“Hari Ini Dalam Sejarah: Filipina Deklarasikan Kemerdekaan Dari Spanyol Halaman All - Kompas.Com.”

“SEJARAH DAN PERKEMBANGAN FILIPINA DARI ERA KOLONIAL HINGGA SEKARANG.”

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si lahir di Jember pada 09 Juli 1965. Menyelesaikan S-1 Prodi Akidah Filsafat di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Jember, S-2 Prodi Ilmu Administrasi di Universitas Jember (UNEJ), dan S-3 Prodi Ilmu Administrasi di Universitas Jember (UNEJ). Sekarang bekerja menjadi dosen di Universitas Panca Marga Probolinggo. Adapun bidang ilmu atau matakuliah yang diampu meliputi kebijakan publik, seminar isu kebijakan publik, seminar isu pemerintahan, kepemimpinan. Di samping mengajar beliau pun menjabat sebagai Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universitas Panca Marga Probolinggo 2018-2027.

Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. Si

ANALISIS BENTUK PEMERINTAHAN DI LINGKUP NEGARA ASEAN

ASEAN merupakan singkatan dari *Association Of Southeast Asian Nations* (Himpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Negara di ASEAN memiliki macam-macam bentuk dalam menjalankan sebuah pemerintahannya. Masing-masing negara di ASEAN pastinya memiliki bentuk pemerintahan berbeda dan masing-masing negara tersebut saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi dan keadaan yang saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, buku ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa atau pembaca, khususnya dalam memahami Bentuk Pemerintahan Di Lingkup Negara Asean. Segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan dari buku ini.

Selamat Membaca

Analisis Bentuk Pemerintahan di Lingkup Negara ASEAN

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	artjeniusbenz.blogspot.com Internet Source	1%
2	Submitted to Heriot-Watt University Student Paper	1%
3	bradsknutson.com Internet Source	1%
4	Ahmad Yani. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945", Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2018 Publication	1%
5	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
6	Jeronimo, Advento. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Penegakan Hukum Pada Pemilihan Umum Parlemen Nasional di Timor-Leste Yang Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1%
7	guruppkn.com	

Internet Source

1 %

8

doku.pub

Internet Source

1 %

9

carano.pustaka.unand.ac.id

Internet Source

1 %

10

journal.unpar.ac.id

Internet Source

1 %

11

digilib.unhas.ac.id

Internet Source

1 %

12

12derian.files.wordpress.com

Internet Source

1 %

13

repository.untag-sby.ac.id

Internet Source

1 %

14

jurnal.unsyiah.ac.id

Internet Source

1 %

15

e-jurnal.unisda.ac.id

Internet Source

1 %

16

12gandhi.blogspot.com

Internet Source

1 %

17

robisevilla.blogspot.com

Internet Source

1 %

18

nekoama.wordpress.com

Internet Source

1 %

19 kelas-la2-16.blogspot.com 1 %
Internet Source

20 henyprihastiwi.wordpress.com 1 %
Internet Source

21 bljar.com 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On